



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 336 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang sesuai dengan prinsip *Good Governance* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penetapan Peta Proses Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Peta Proses Bisnis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjelaskan hubungan kerja antar unit organisasi dalam lingkup Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan fungsinya, terdiri dari Peta Proses Bisnis Level 0, Peta Proses Bisnis Level 1 dan Peta Proses Bisnis Level 2.
- KETIGA : Setiap unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja antar unit organisasi sesuai tugas fungsinya wajib mengacu pada Peta Proses Bisnis.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Oktober 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN PETA PROSES
BISNIS LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 363 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 OKTOBER 2023

**PETA PROSES BISNIS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

DAFTAR PETA PROSES BISNIS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor	Nama Proses	Nama Sub-Proses	Level Proses	Halaman Lampiran
-	Peta Proses Bisnis Level 0 (<i>Value Chain</i>)	-	0	10
LKPP.PA.L1.MS/2023.01	Manajemen Strategi	-	1	12
LKPP.PA.L2.MS/2023.01	Manajemen Strategi	-	2	13
LKPP.PA.L1.TK/2023.02	Tata Kelola	-	1	16
LKPP.PA.L2.TK/2023.02	Tata Kelola	-	2	17
LKPP.PA.L1.MR/2023.03	Manajemen Risiko	-	1	19
LKPP.PA.L2.MR/2023.03	Manajemen Risiko	-	2	20
LKPP.PA.L1.PI/2023.04	Pengawasan Intern	-	1	22
LKPP.PA.L2.PI/2023.03	Pengawasan Intern	-	2	23
LKPP.PU.L1.PKPBJ/2023.05	Perumusan Kebijakan PBJP	-	1	25
LKPP.PU.L2.PKPBJ/2023.05	Perumusan Kebijakan PBJP	-	2	26
LKPP.PU.L1.PSD/2023.06	Pengembangan Sistem Digital PBJP	-	1	27
LKPP.PU.L2.PSD/2023.06	Pengembangan Sistem Digital PBJP	-	2	28

Nomor	Nama Proses	Nama Sub-Proses	Level Proses	Halaman Lampiran
LKPP.PU.L1.IKPBJ/2023.07	Implementasi Kebijakan PBJP	-	1	30
LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-01	Implementasi Kebijakan PBJP	Pembentukan Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	2	31
LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-02	Implementasi Kebijakan PBJP	Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	2	32
LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-03	Implementasi Kebijakan PBJP	Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)	2	33
LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-04	Implementasi Kebijakan PBJP	Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ)	2	34
LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-05	Implementasi Kebijakan PBJP	Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	2	35
LKPP.PU.L1.PDPBJ/2023.08	Pembinaan dan Dukungan PBJP	-	1	36
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-01	Pembinaan dan Dukungan PBJP	Peningkatan Kapabilitas UKPBJ	2	37
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-02	Pembinaan dan Dukungan PBJP	Peningkatan Kapabilitas LPPBJ	2	38
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-03	Pembinaan dan Dukungan PBJP	<i>Knowledge Management</i>	2	39

Nomor	Nama Proses	Nama Sub-Proses	Level Proses	Halaman Lampiran
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-04A	Pembinaan dan Dukungan PBJP	Pembinaan SDM PBJ: A. Pembinaan JF PPBJ	2	40
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-04B	Pembinaan dan Dukungan PBJP	Pembinaan SDM PBJ: A. Pembinaan Kepala UKPBJ	2	41
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-05	Pembinaan dan Dukungan PBJP	Pembentukan <i>Clearing House</i>	2	42
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-06	Pembinaan dan Dukungan PBJP	Konsultasi/Advokasi/Pendampingan	2	43
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-07	Pembinaan dan Dukungan PBJP	Penyelesaian Sengketa Kontrak	2	44
LKPP.PU.L1.LPN/2023.09	Layanan Pengadaan Nasional	-	1	45
LKPP.PU.L2.LPN/2023.09-01	Layanan Pengadaan Nasional	Pengelolaan Katalog	2	46
LKPP.PU.L2.LPN/2023.09-02	Layanan Pengadaan Nasional	Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	2	47
LKPP.PU.L2.LPN/2023.09-03	Layanan Pengadaan Nasional	Sertifikasi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	2	48
LKPP.PU.L1.PEP/2023.10	Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan PBJP	-	1	50
LKPP.PU.L2.PEP/2023.10	Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan PBJP	-	2	51

Nomor	Nama Proses	Nama Sub-Proses	Level Proses	Halaman Lampiran
LKPP.PP.L1.PHKM/2023.11	Pelayanan Hukum	-	1	43
LKPP.PP.L2.PHKM/2023.11	Pelayanan Hukum	-	2	54
LKPP.PP.L1.PHU/2023.12	Pelayanan Humas	-	1	56
LKPP.PP.L2.PHU/2023.12-01	Pelayanan Humas	Peliputan	2	57
LKPP.PP.L2.PHU/2023.12-02	Pelayanan Humas	Kerjasama	2	58
LKPP.PP.L2.PHU/2023.12-03	Pelayanan Humas	Publikasi	2	59
LKPP.PP.L1.PENGADAAN/2023.13	Pelayanan Pengadaan	-	1	60
LKPP.PP.L2.PENGADAAN/2023.13-01	Pelayanan Pengadaan	Pengadaan Melalui Penyedia	2	61
LKPP.PP.L2.PENGADAAN/2023.12-02	Pelayanan Pengadaan	Pengadaan Melalui Swakelola	2	64
LKPP.PP.L1.PUMUM/2023.13	Pelayanan Umum	-	1	66
LKPP.PP.L1.PUMUM/2023.13-01	Pelayanan Umum	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	1	67
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-01	Pelayanan Umum	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	2	68
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02	Pelayanan Umum	Layanan Tata Usaha (Buku, Dokumen Naskah Dinas dan Arsip)	1	69
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02A	Pelayanan Umum	Layanan Tata Usaha: A. Buku Perpustakaan	2	70
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02B	Pelayanan Umum	Layanan Tata Usaha: B. Dokumen Naskah Dinas	2	71

Nomor	Nama Proses	Nama Sub-Proses	Level Proses	Halaman Lampiran
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02C	Pelayanan Umum	Layanan Tata Usaha: C. Arsip	2	72
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-03	Pelayanan Umum	Layanan Keprotokolan dan Layanan Pimpinan	1	73
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-03A	Pelayanan Umum	Layanan Keprotokolan dan Layanan Pimpinan: A. Layanan Keprotokolan	2	74
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-03B	Pelayanan Umum	Layanan Keprotokolan dan Layanan Pimpinan: A. Layanan Pimpinan	2	75
LKPP.PP.L1.PSDM/2023.14	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	-	1	76
LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-01	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Desain Organisasi	2	77
LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-02	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Perencanaan Kebutuhan dan Pemenuhan; Pengadaan Pegawai; dan Administrasi Pegawai	2	78
LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-03	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi; dan Pengelolaan Kinerja	2	79
LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-04	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Karir; dan Pengelolaan Penggajian	2	80
LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-05	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Pengelolaan Penghargaan; dan Pemberhentian	2	81

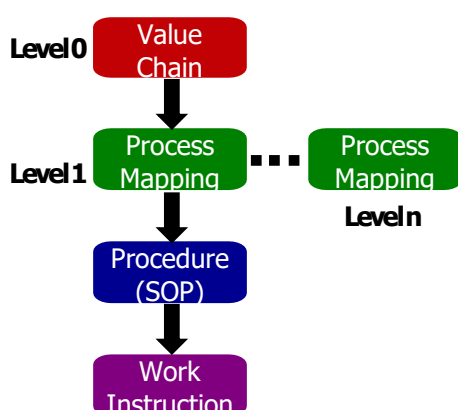
Nomor	Nama Proses	Nama Sub-Proses	Level Proses	Halaman Lampiran
LKPP.PP.L1.RND/2023.15	Pengkajian dan Pembangunan	-	1	82
LKPP.PP.L2.RND/2023.15	Pengkajian dan Pembangunan	-	2	83
LKPP.PP.L1.TIK/2023.16	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	-	1	84
LKPP.PP.L1.TIK/2023.16-01	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pengelolaan Sistem dan Infrastruktur	1	85
LKPP.PP.L2.TIK/2023.16-01	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pengelolaan Sistem dan Infrastruktur	2	86
LKPP.PP.L1.TIK/2023.16-02	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pengelolaan Data dan Informasi	1	88
LKPP.PP.L2.TIK/2023.16-02	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pengelolaan Data dan Informasi	2	89
LKPP.PP.L1.KEU/2023.17	Pengelolaan Keuangan	-	1	90
LKPP.PP.L2.KEU/2023.17	Pengelolaan Keuangan	-	2	91

BAB I PENDAHULUAN

Definisi Peta Proses Bisnis menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Lembaga Kebijakan Pengadaa Barang/Jasa Pemeerintah (LKPP) telah menyusun Peta Proses Bisnis pada tahun 2019 yang disahkan dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Peta Proses Bisnis tersebut mengacu pada Rencana Strategis LKPP 2015 – 2019 serta Organisasi dan Tata Kerja LKPP berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada tahun 2020, atas dasar arahan Presiden untuk penyederhaan organisasi dan penyederhanaan jabatan serta beberapa dinamika organisasi, LKPP melaksanakan restrukturisasi organisasi. Selain itu, di tahun 2020 LKPP juga menerbitkan Renstra 2020 – 2024. Hal-hal tersebut menjadi dasar penyusunan Peta Proses Bisnis LKPP yang baru agar Peta Proses Bisnis LKPP dapat menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi guna menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.



Tingkatan atau level proses bisnis sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah terdiri atas:

- A. Level 0 (Value Chain)
- B. Level 1 – Level n (Process Mapping)

C. SOP (Standar Operasional Prosedur)

Gambar 1. Level Proses Bisnis

D. Instruksi Kerja

Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini terdiri atas:

1. Peta Proses Bisnis Level 0 (Value Chain)

Terdiri dari Proses Pengarah; Proses Utama; dan Proses Pendukung.

a. Proses Pengarah terdiri dari Manajemen Strategi; Tata Kelola; Manajemen Risiko; dan Pengendalian Internal.

b. Proses Utama dimulai dari Perumusan Kebijakan PBJP; Pengembangan Sistem Digital PBJP; Implementasi Kebijakan PBJP; Pembinaan & Dukungan PBJP; Layanan Pengadaan Nasional; hingga Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan PBJP.

c. Proses Pendukung terdiri dari Pelayanan Hukum; Pelayanan Humas; Pelayanan Pengadaan; Pelayanan Umum; Pengelolaan SDM; Penelitian & Pengembangan; Pengelolaan TIK; dan Pengelolaan Keuangan.

2. Peta Proses Bisnis Level 1, merupakan turunan dari Proses Bisnis Level 0 menjelaskan masing-masing proses dalam Proses Pengarah, Proses Utama, dan Proses Pendukung.

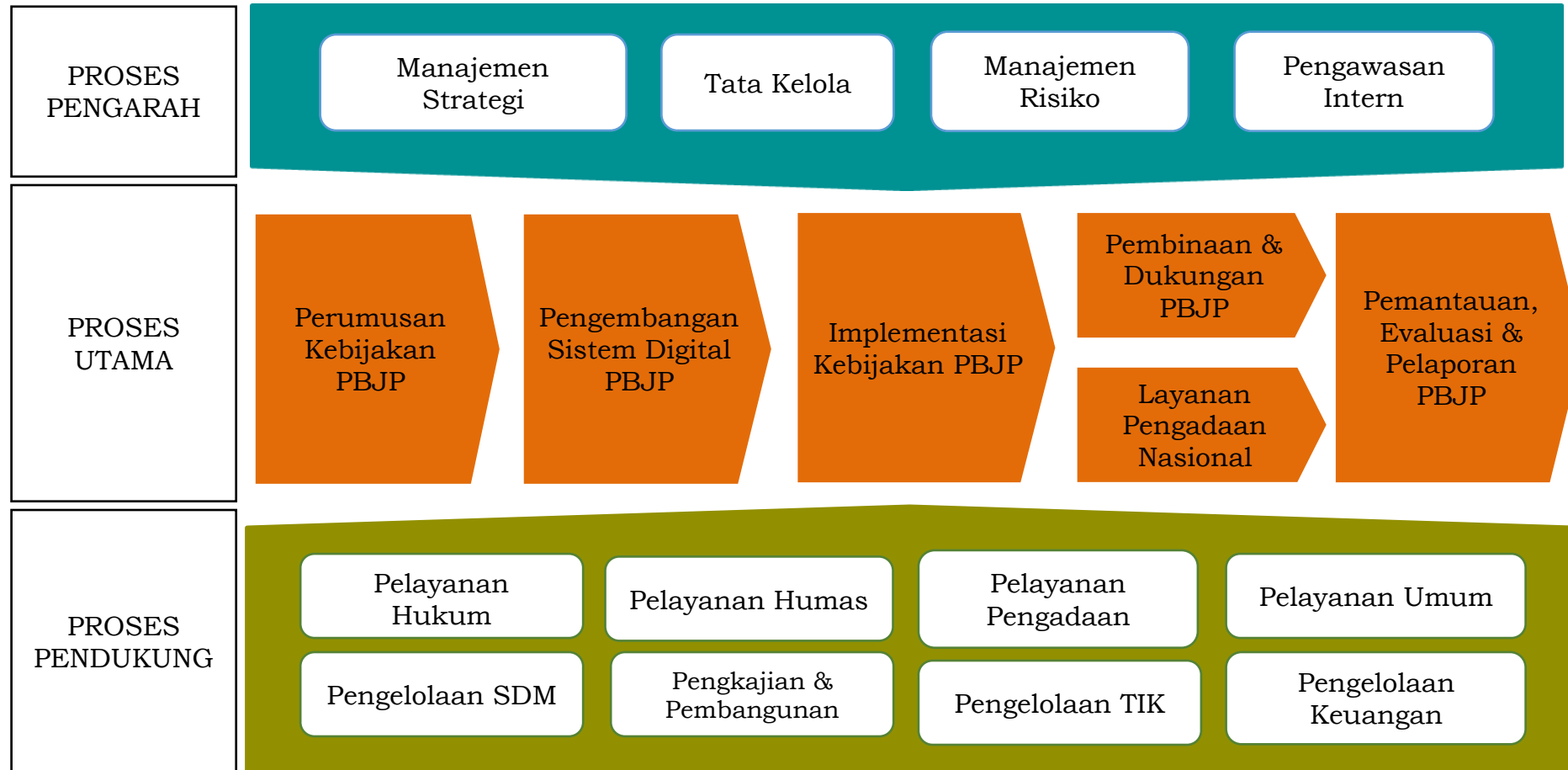
3. Peta proses Bisnis Level 2, merupakan turunan dari Proses Bisnis Level 1 yang mendetilkan proses pada masing-masing Level 1.

Peta Proses Bisnis ini menggambarkan proses logis yang secara umum berlaku dari mulai hingga akhir, namun untuk beberapa kegiatan mungkin saja ada satu proses atau lebih yang dilewati. Peta Proses Bisnis ini akan menjadi acuan penyesuaian dan penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) LKPP.

BAB II

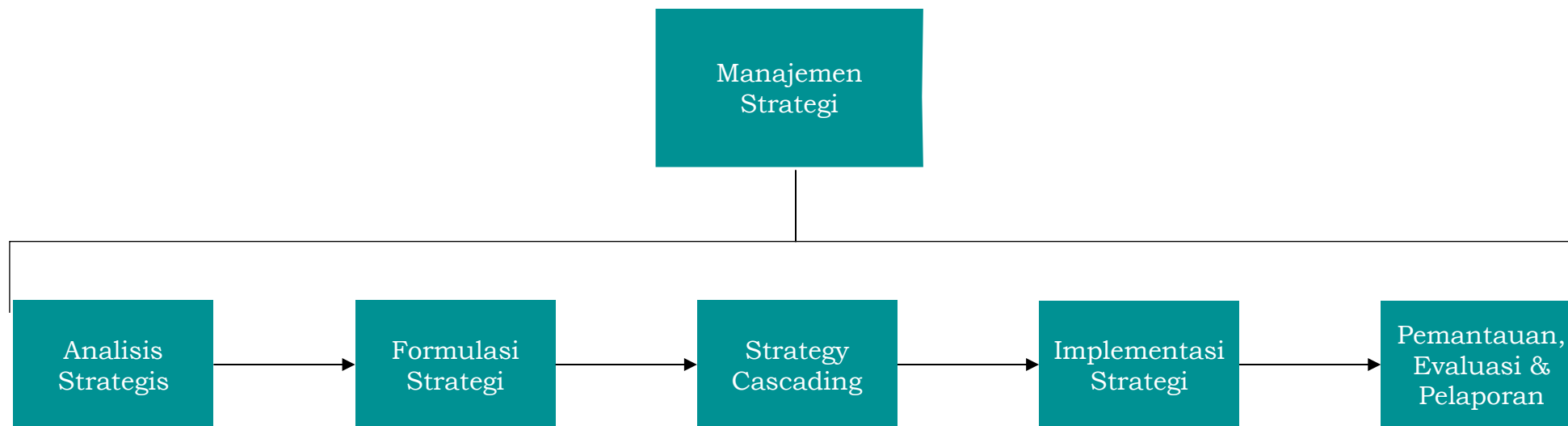
PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 (VALUE CHAIN)

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

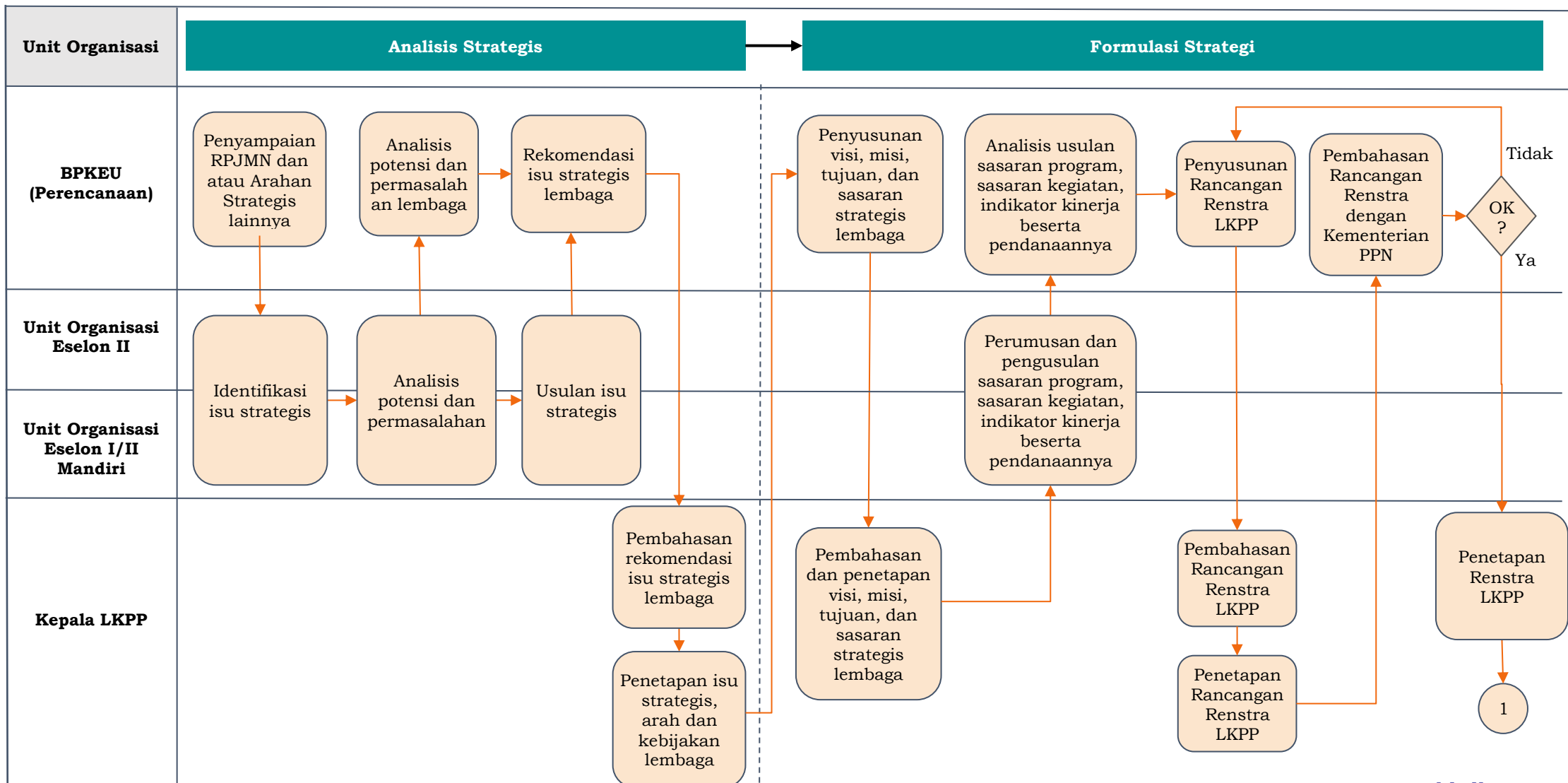


BAB III
PROSES PENGARAH
LEVEL 1 & 2

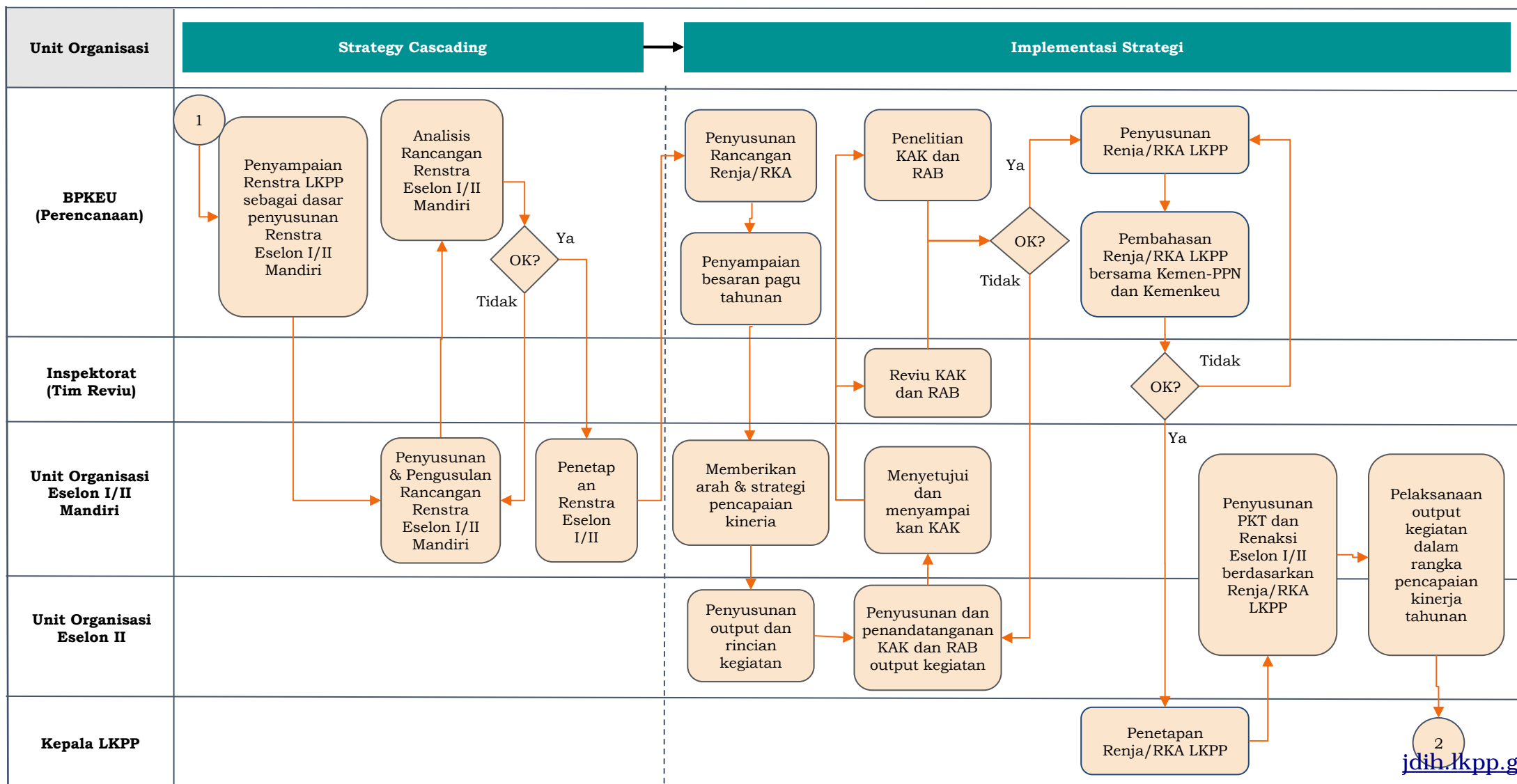
NOMOR	LKPP.PA.L1.MS/2023.01		
PROSES	MANAJEMEN STRATEGI	LEVEL	1
MULAI	Analisis Strategis	OUTPUT	RENSTRA, RENJA, dan RKA
AKHIR	Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan		
KETERANGAN	Proses pengelolaan strategi mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi dan monitoring strategi, termasuk manajemen kinerja unit.		



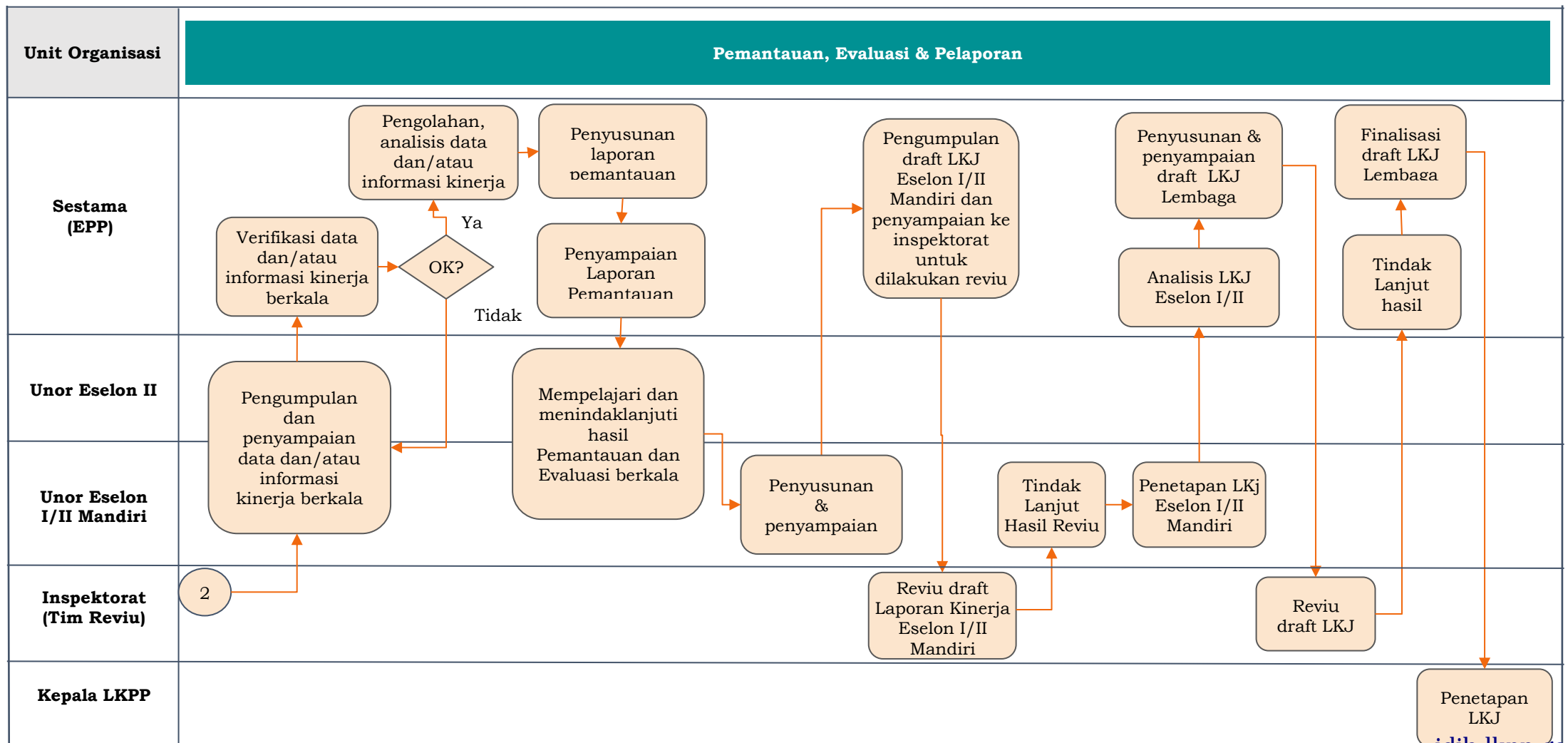
NOMOR	LKPP.PA.L2.MS/2023.01	HALAMAN	1
PROSES	MANAJEMEN STRATEGI	LEVEL	2



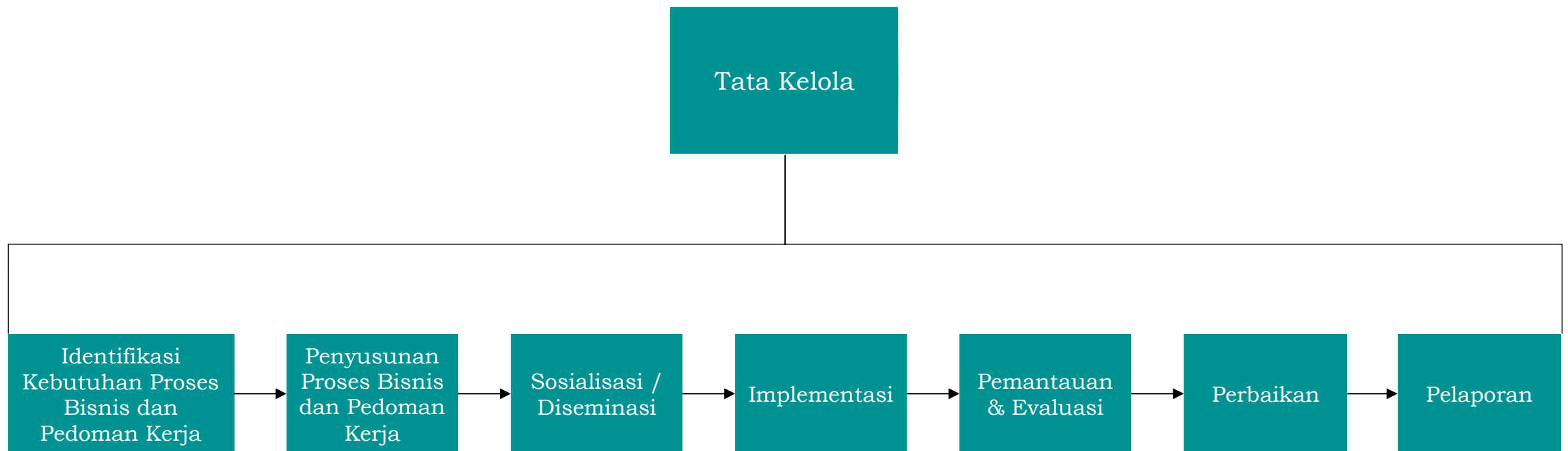
NOMOR	LKPP.PA.L2.MS/2023.01	HALAMAN	2
PROSES	MANAJEMEN STRATEGI	LEVEL	2



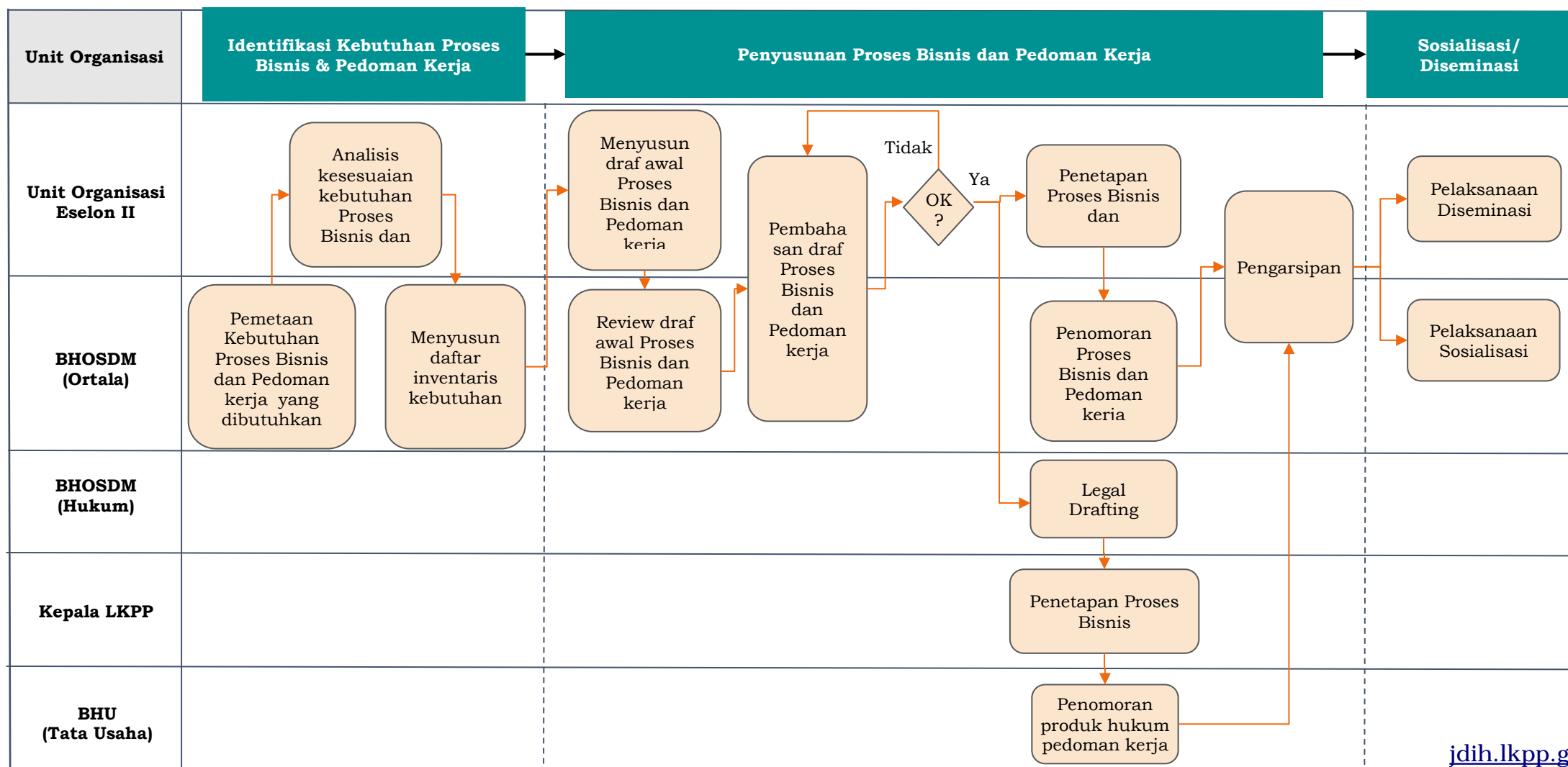
NOMOR	LKPP.PA.L2.MS/2023.01	HALAMAN	3
PROSES	MANAJEMEN STRATEGI	LEVEL	2



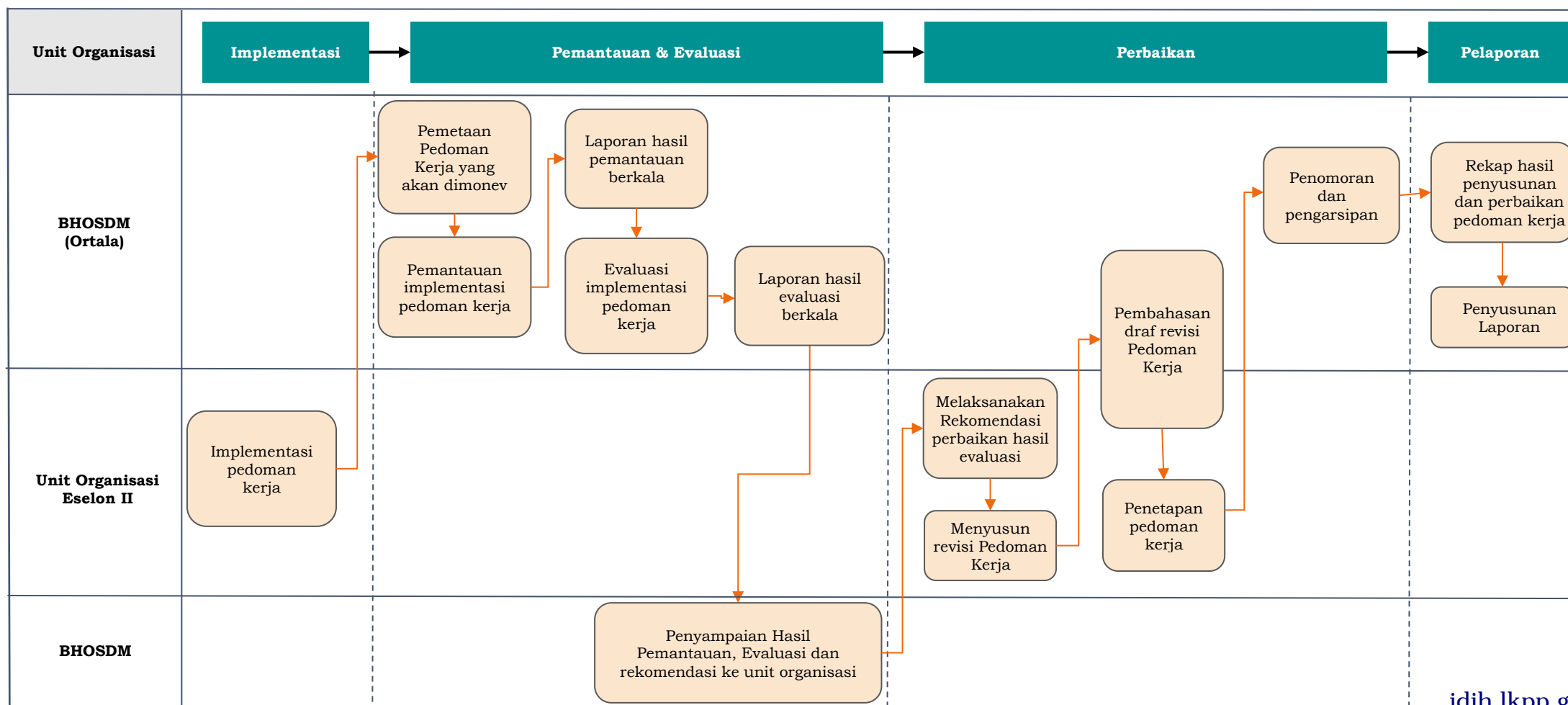
NOMOR	LKPP.PA.L1.TK/2023.02		
NAMA PROSES	TATA KELOLA	LEVEL	1
MULAI	Identifikasi Kebutuhan Proses dan Pedoman kerja	OUTPUT	Proses Bisnis, Dokumen Pedoman Kerja antara lain SOP dan Instruksi Kerja.
SELESAI	Pelaporan		
KETERANGAN	Pengelolaan proses kerja yang ada di LKPP, termasuk pengembangan berkesinambungan (<i>continuous improvement</i>) dari proses-proses yang ada.		



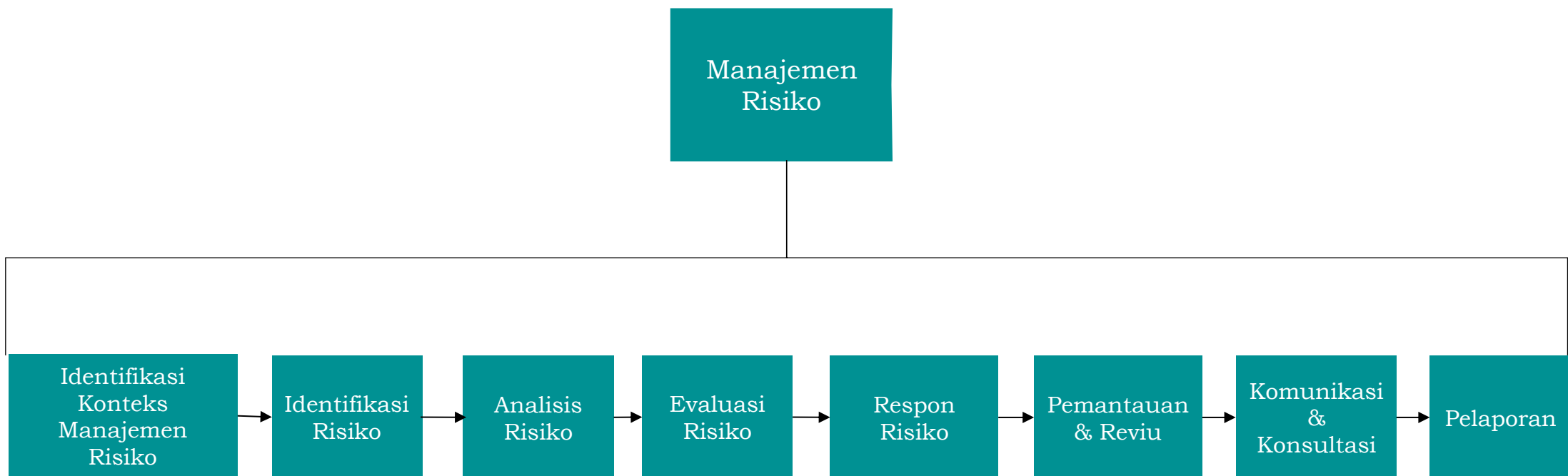
NOMOR	LKPP.PA.L2.TK/2023.02	HALAMAN	1
PROSES	TATA KELOLA	LEVEL	2



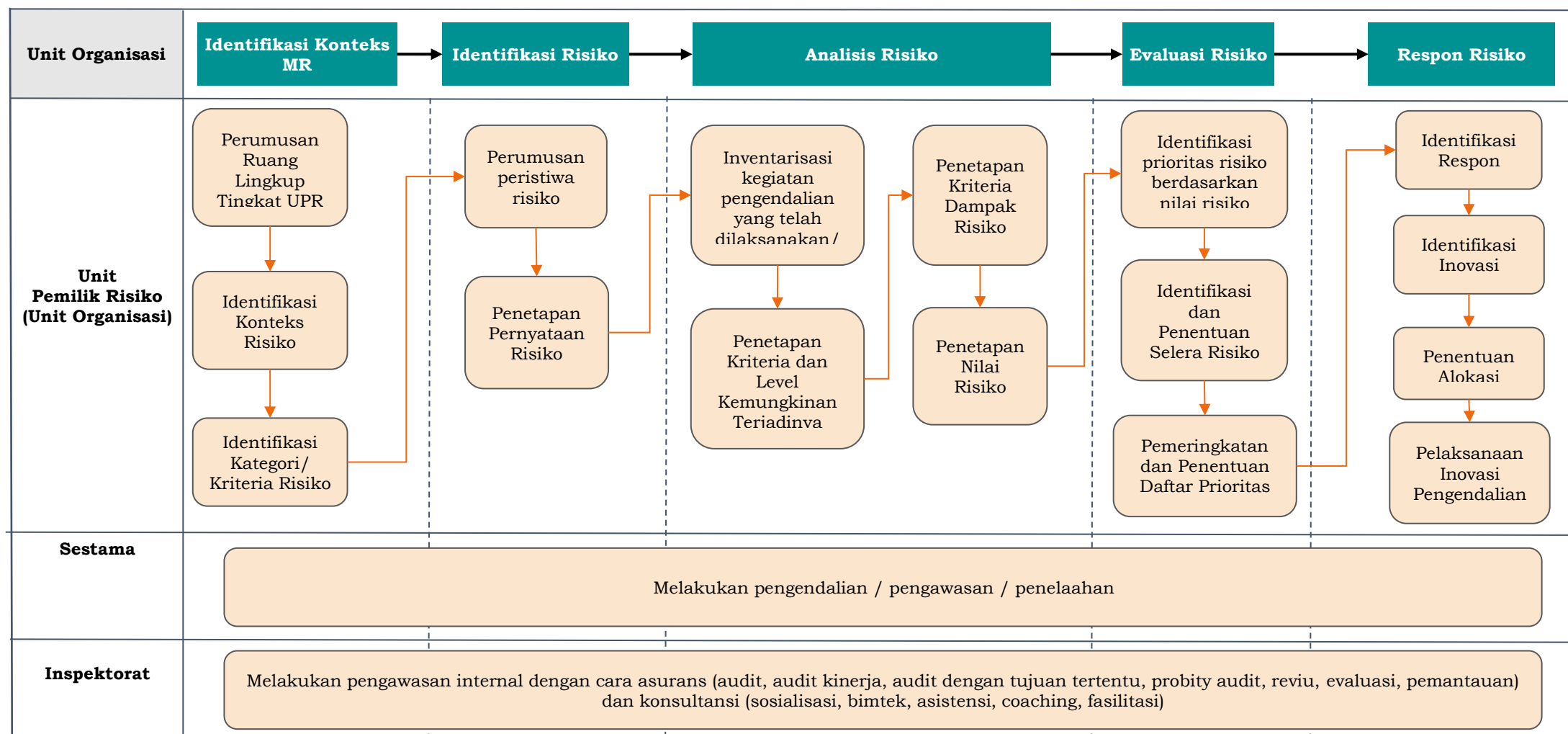
NOMOR	LKPP.PA.L2.TK/2023.02	HALAMAN	2
PROSES	TATA KELOLA	LEVEL	2



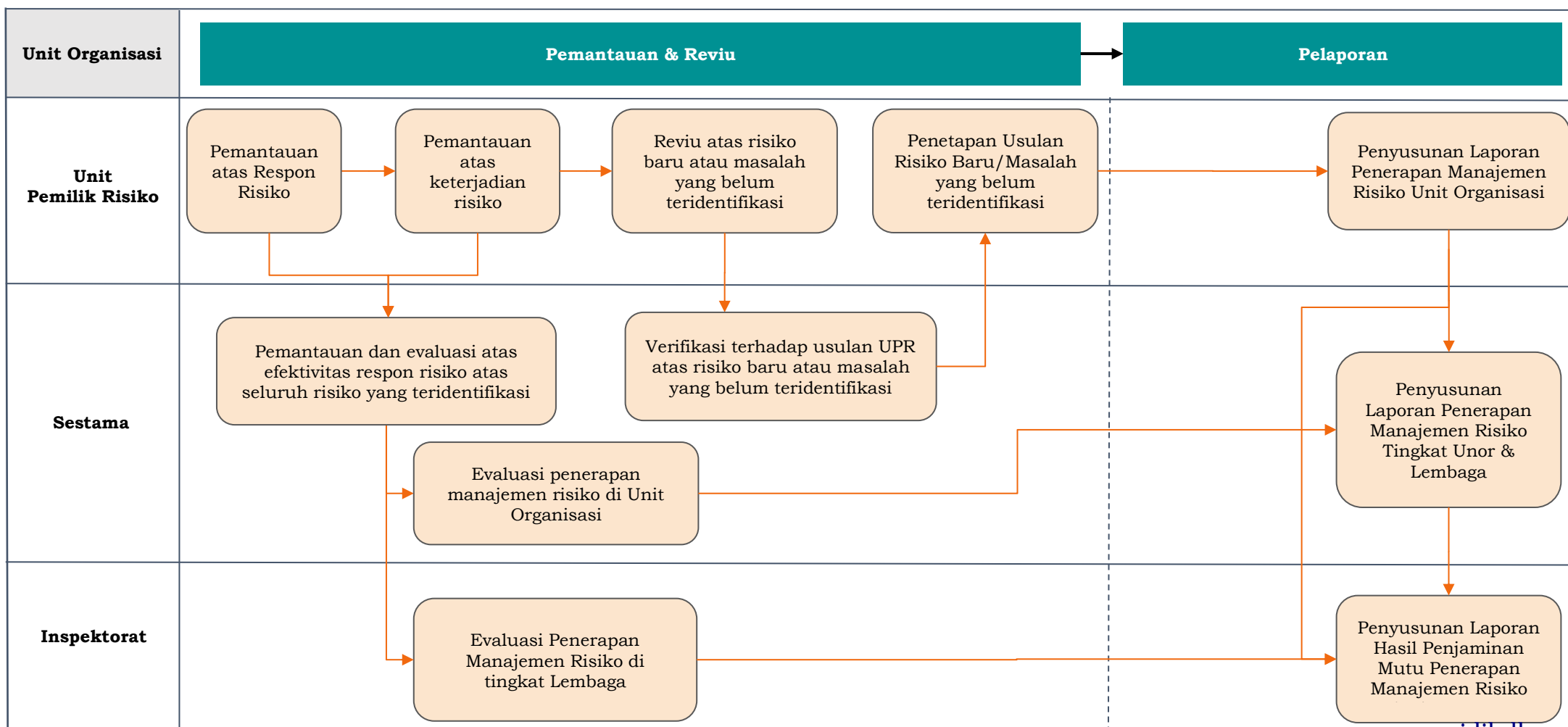
NOMOR	LKPP.PA.L1.MR/2023.03		
PROSES	MANAJEMEN RISIKO	LEVEL	1
MULAI	Identifikasi Konteks Manajemen Risiko	OUTPUT	Profil Risiko, Kegiatan Mitigasi, dan Peta Risiko
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	Proses pengelolaan risiko dalam organisasi LKPP, mulai dari identifikasi, mitigasi dan monitoring risiko.		



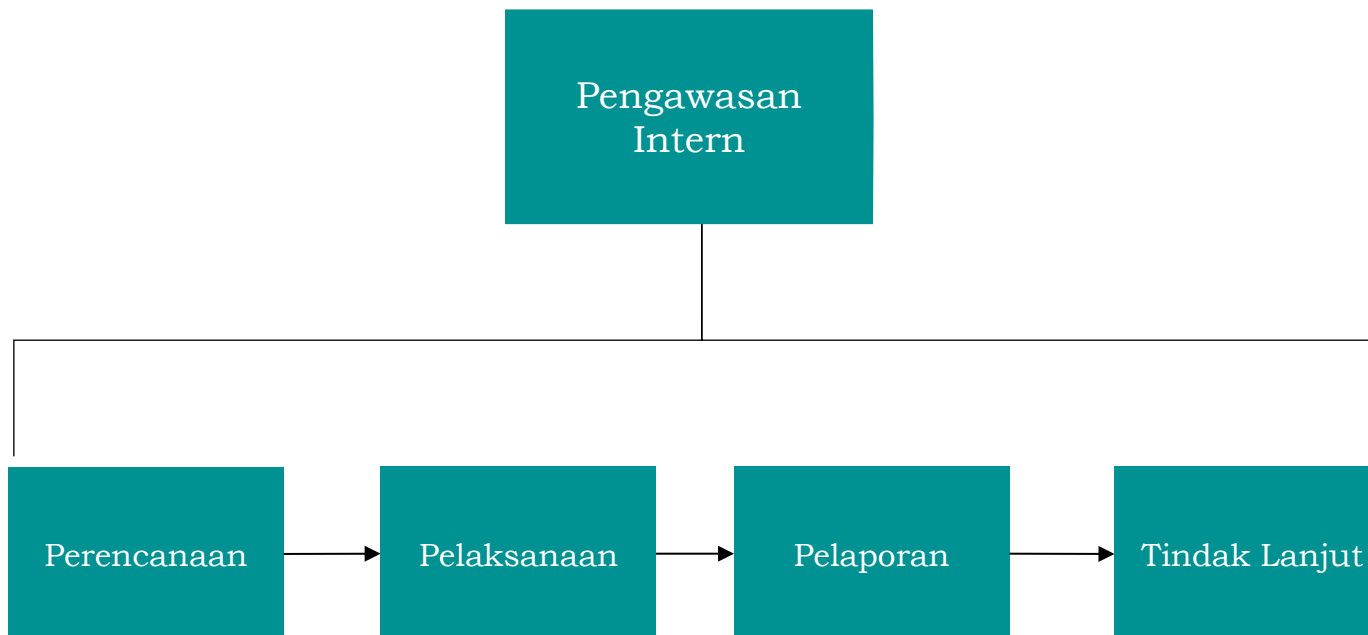
NOMOR	LKPP.PA.L2.MR/2023.03	HALAMAN	1
PROSES	MANAJEMEN RISIKO	LEVEL	2



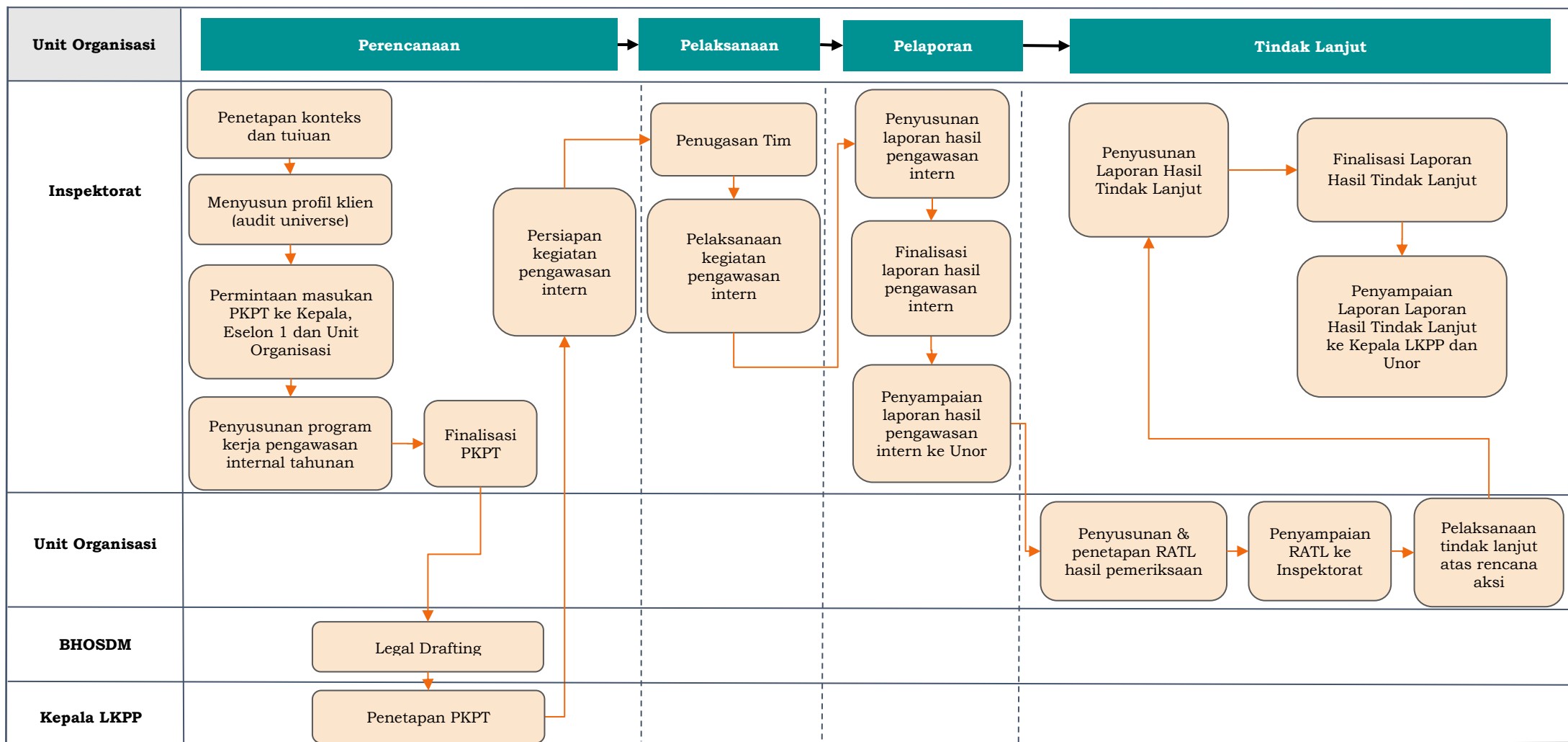
NOMOR	LKPP.PA.L2.MR/2023.03	HALAMAN	2
PROSES	MANAJEMEN RISIKO	LEVEL	2



NOMOR	LKPP.PA.L1.PI/2023.04		
PROSES	PENGAWASAN INTERN	LEVEL	1
MULAI	Perencanaan	OUTPUT	Indeks Kepatuhan
AKHIR	Tindak Lanjut		
KETERANGAN	Proses yang mengendalikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di internal LKPP untuk memastikan kepatuhan (<i>compliance</i>) dan <i>Good Governance</i> .		

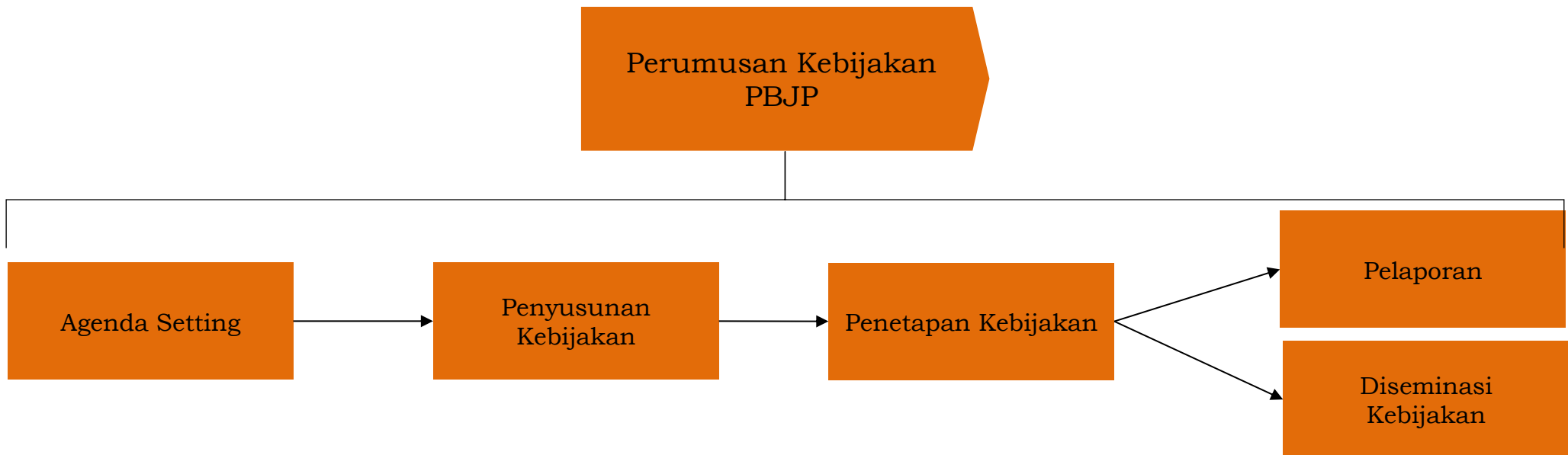


NOMOR	LKPP.PA.L2.PI/2023.03		
PROSES	PENGAWASAN INTERN	LEVEL	2

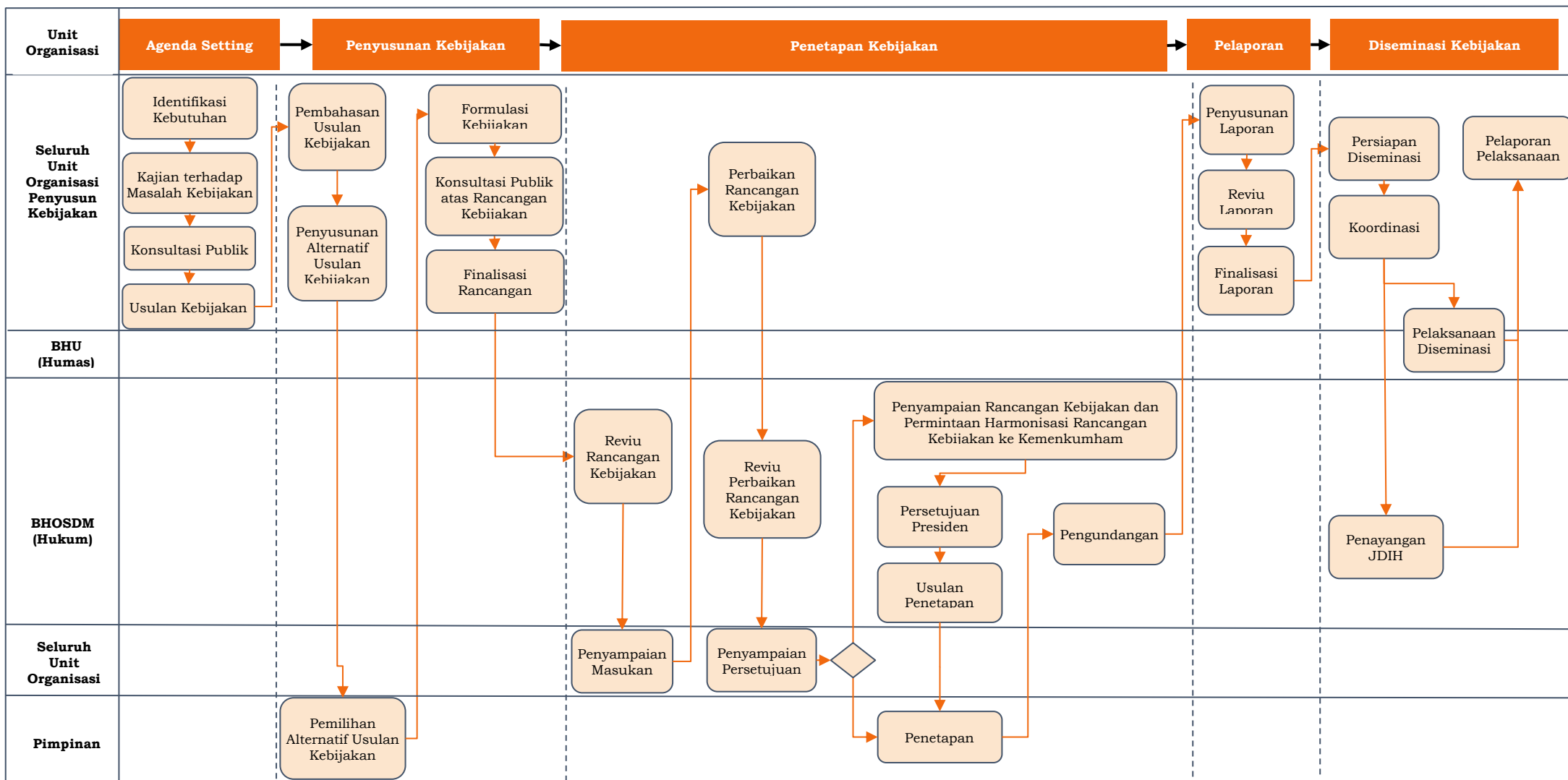


BAB IV
PROSES UTAMA
LEVEL 1 & 2

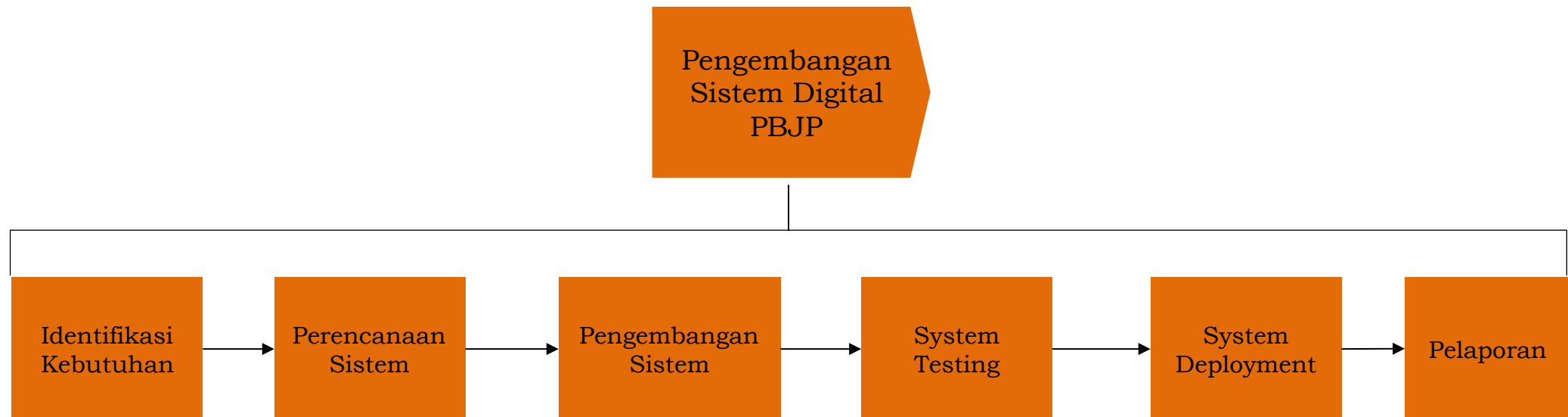
NOMOR	LKPP.PU.L1.PKPBj/2023.05		
PROSES	PERUMUSAN KEBIJAKAN PBJP	LEVEL	1
MULAI	Penetapan Agenda Kebijakan	OUTPUT	Kebijakan PBJP yang telah disosialisasikan
AKHIR	Diseminasi Kebijakan		
KETERANGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fungsi utama LKPP dalam perumusan dan penetapan Kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang akan menjadi rujukan bagi Instansi Pemerintah dan/atau pihak lain dalam melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. • Kebijakan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - pengadaan barang/jasa Pemerintah - pengembangan dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia PBJP - pengembangan dan pembinaan digital PBJP - pemantauan, evaluasi dan pelaporan • Kebijakan dapat berupa Surat Edaran, Keputusan Deputi, Keputusan Kepala LKPP, Peraturan Kepala LKPP, Peraturan Presiden, atau peraturan lainnya. 		



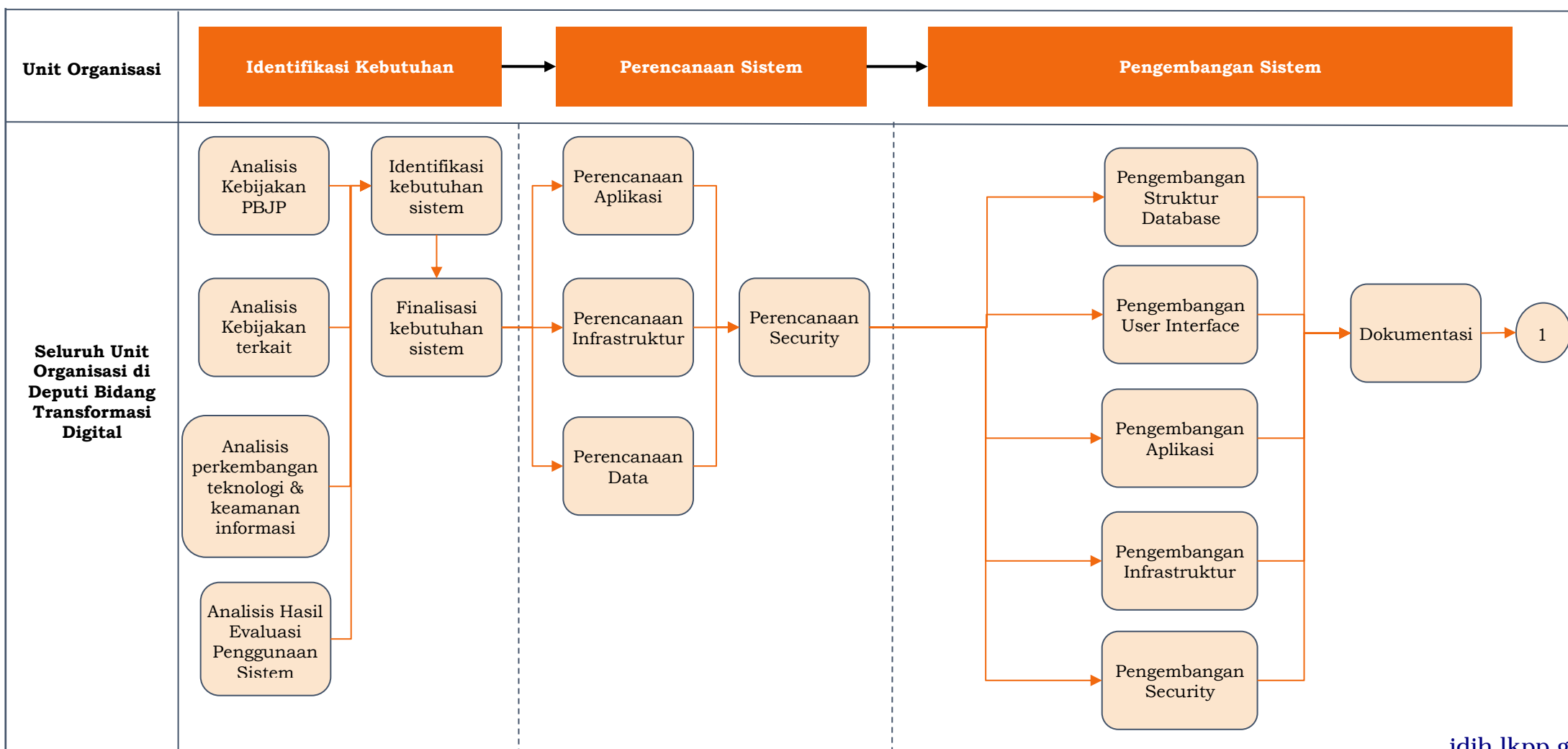
NOMOR	LKPP.PU.L2.PKPBJ/2023.05		
PROSES	PERUMUSAN KEBIJAKAN PBJP	LEVEL	2



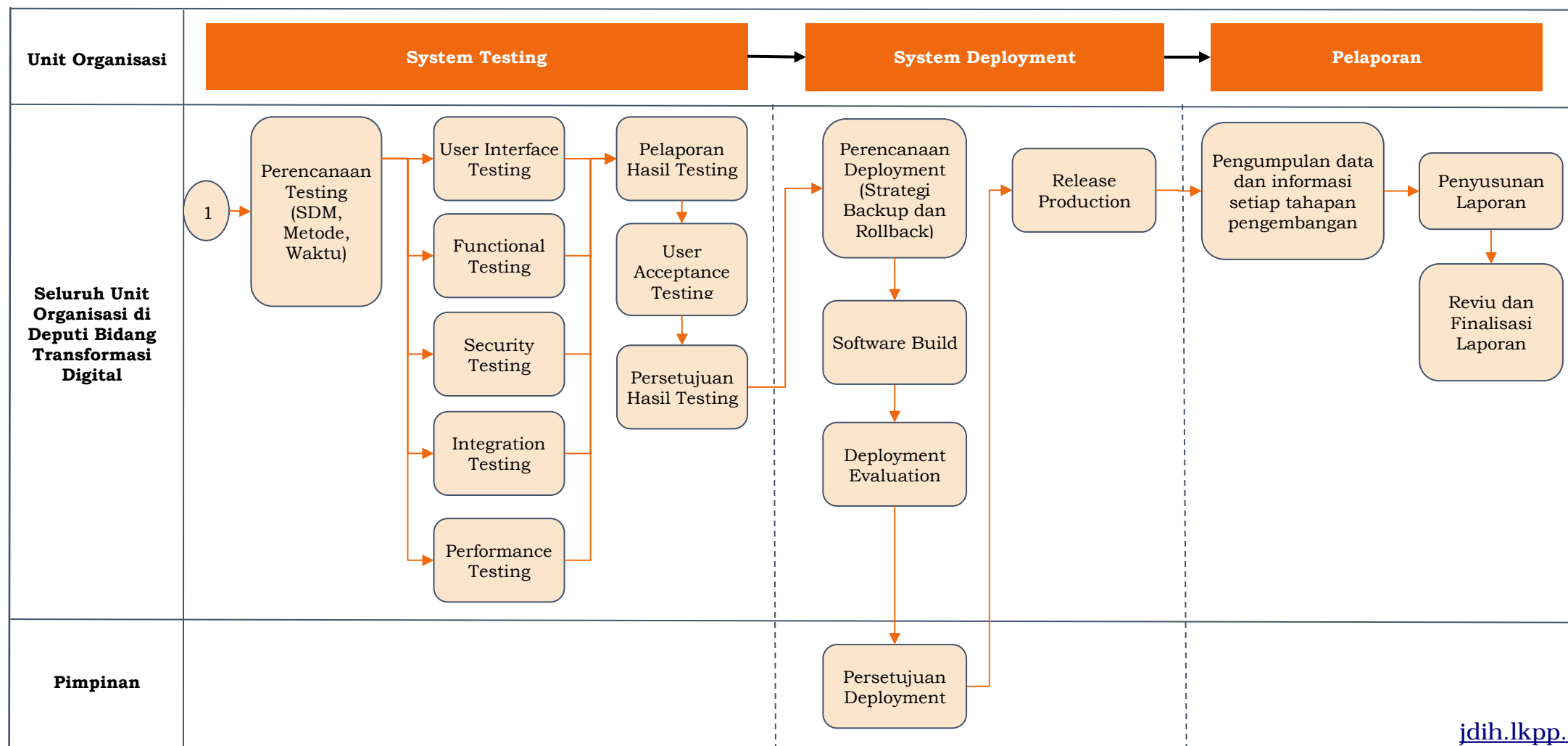
NOMOR	LKPP.PU.L1.PSD/2023.06		
PROSES	PENGEMBANGAN SISTEM DIGITAL PBJP	LEVEL	1
MULAI	Identifikasi kebutuhan pengembangan sistem	OUTPUT	Sistem/aplikasi hasil pengembangan yang siap digunakan
AKHIR	Sistem deployment		
KETERANGAN	Sesuai dengan fungsinya, LKPP melakukan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (Digital) dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengembangan digital termasuk penggunaan teknologi terbaru sesuai dengan perkembangan teknologi dan arahan kebijakan LKPP. Sistem digital mencakup aplikasi (<i>software</i>), infrastruktur, jaringan (<i>network</i>), <i>database</i> , dan sistem keamanannya		



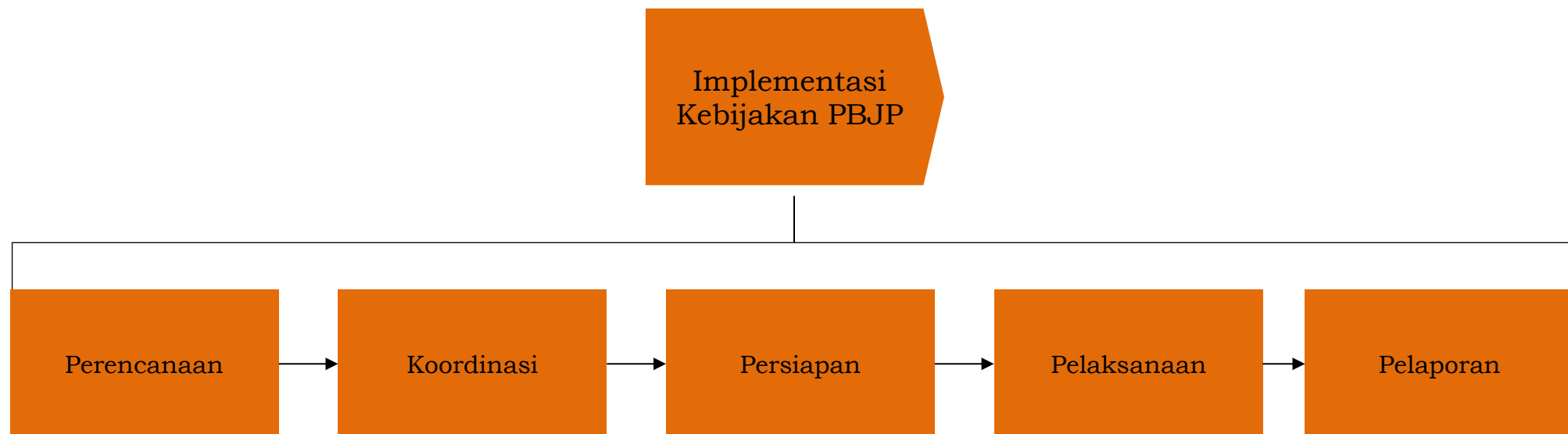
NOMOR	LKPP.PU.L2.PSD/2023.06	HALAMAN	1
PROSES	PENGEMBANGAN SISTEM DIGITAL PBJP	LEVEL	2



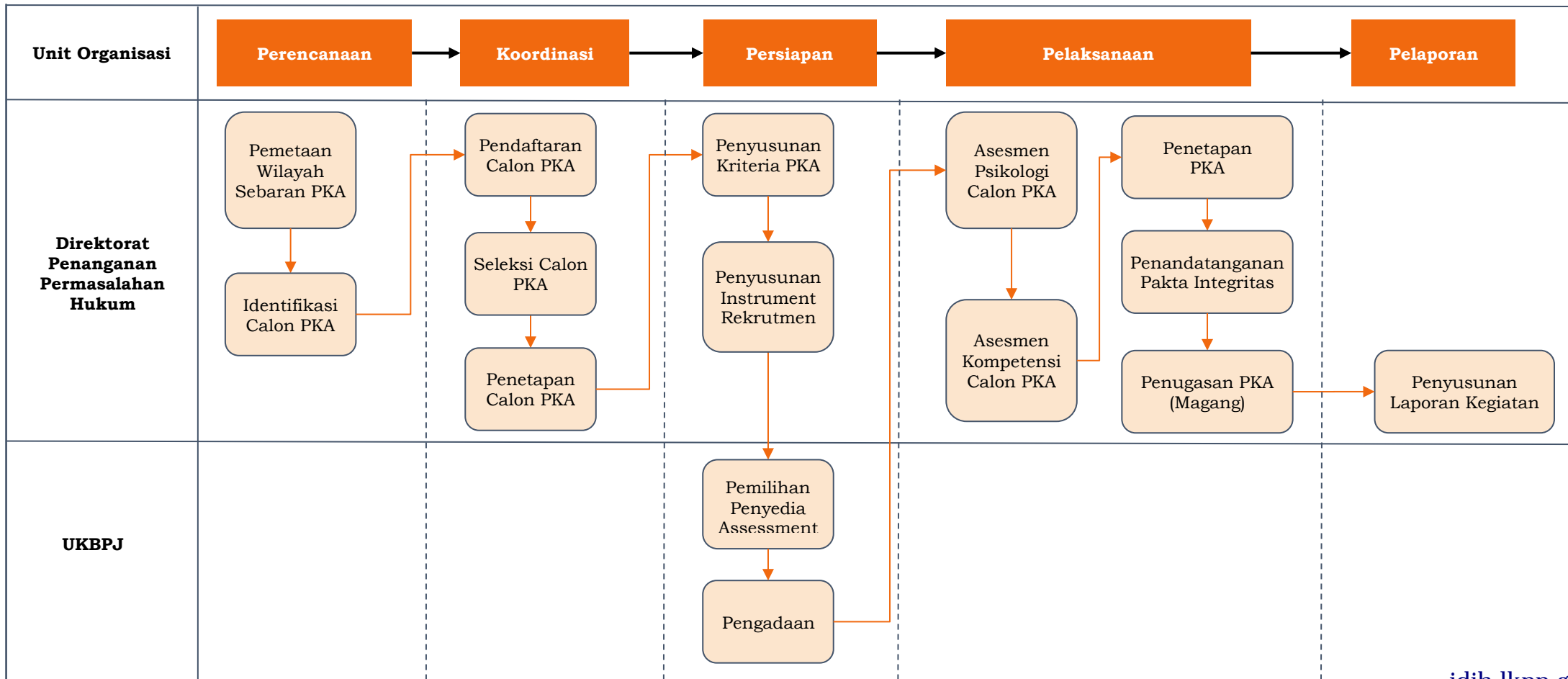
NOMOR	LKPP.PU.L2.PSD/2023.06	HALAMAN	2
PROSES	PENGEMBANGAN SISTEM DIGITAL PBJP	LEVEL	2



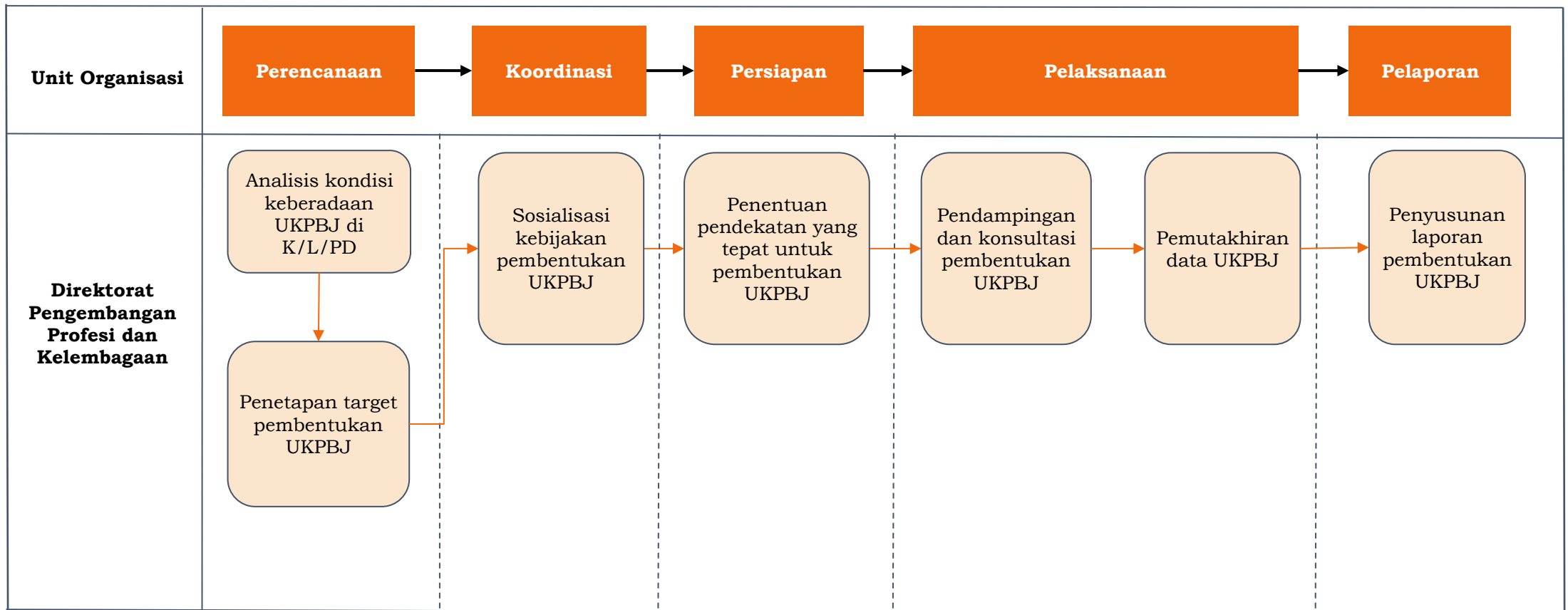
NOMOR	LKPP.PU.L1.IKPBJ/2023.07		
PROSES	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PBJP	LEVEL	1
MULAI	Perencanaan implementasi	OUTPUT	Penerapan Kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah di K/L/PD yang salah satunya adalah Indeks Tata Kelola Pengadaan.
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	<ul style="list-style-type: none">• Merupakan proses implementasi dari kebijakan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah yang membutuhkan peran serta LKPP sebagai pendorong implementasi (driver). Dalam hal ini, LKPP akan bekerja sama dengan Instansi terkait untuk memastikan implementasi berjalan dengan baik.• Kegiatan implementasi antara lain : Pembentukan UKPBJ, Pembentukan JF PPBJ, Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa, Penerapan SPSE, Pembentukan <i>Clearing House</i>, dan Pembentukan Pemberian Keterangan Ahli.		



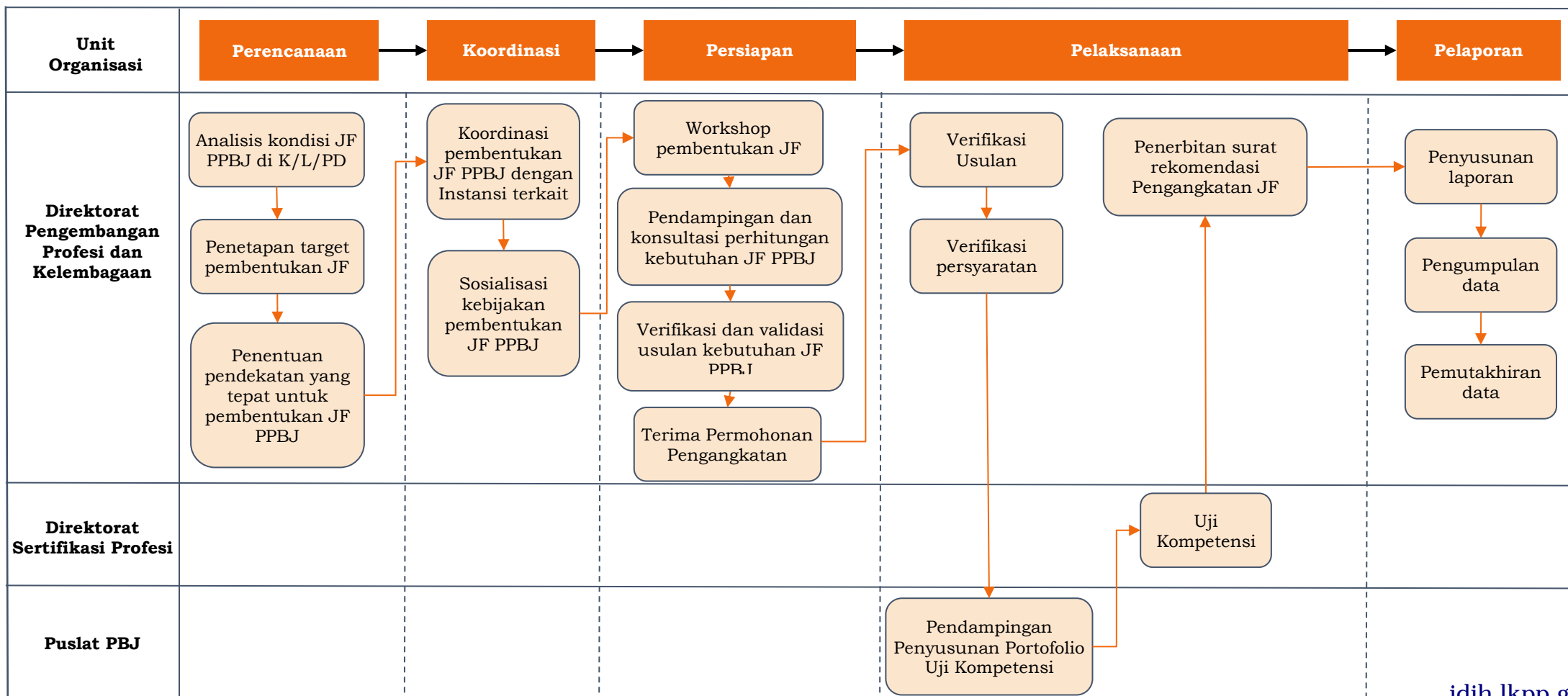
NOMOR	LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-01		
PROSES	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PBJP	LEVEL	2
SUB-PROSES	PEMBENTUKAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI (PKA)		



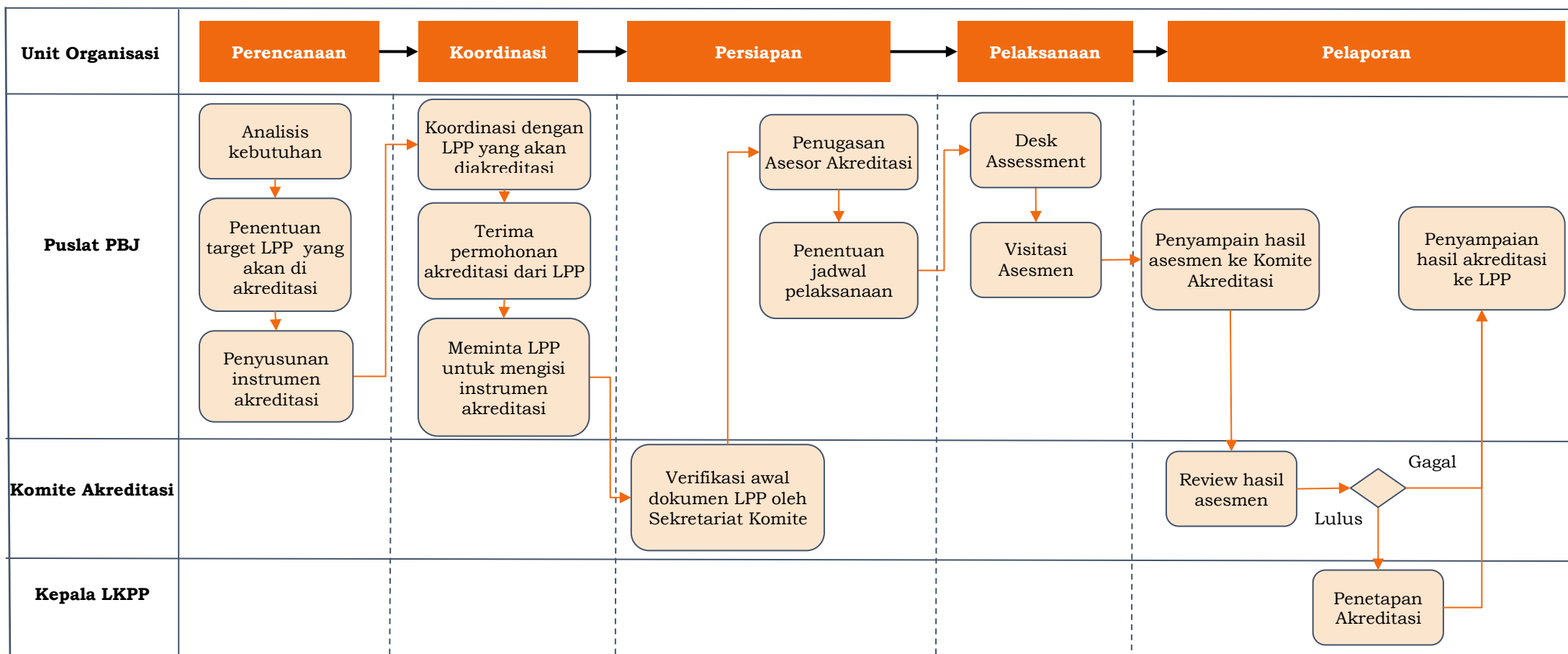
NOMOR	LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-02		
PROSES	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PBJP	LEVEL	2
SUB-PROSES	PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)		



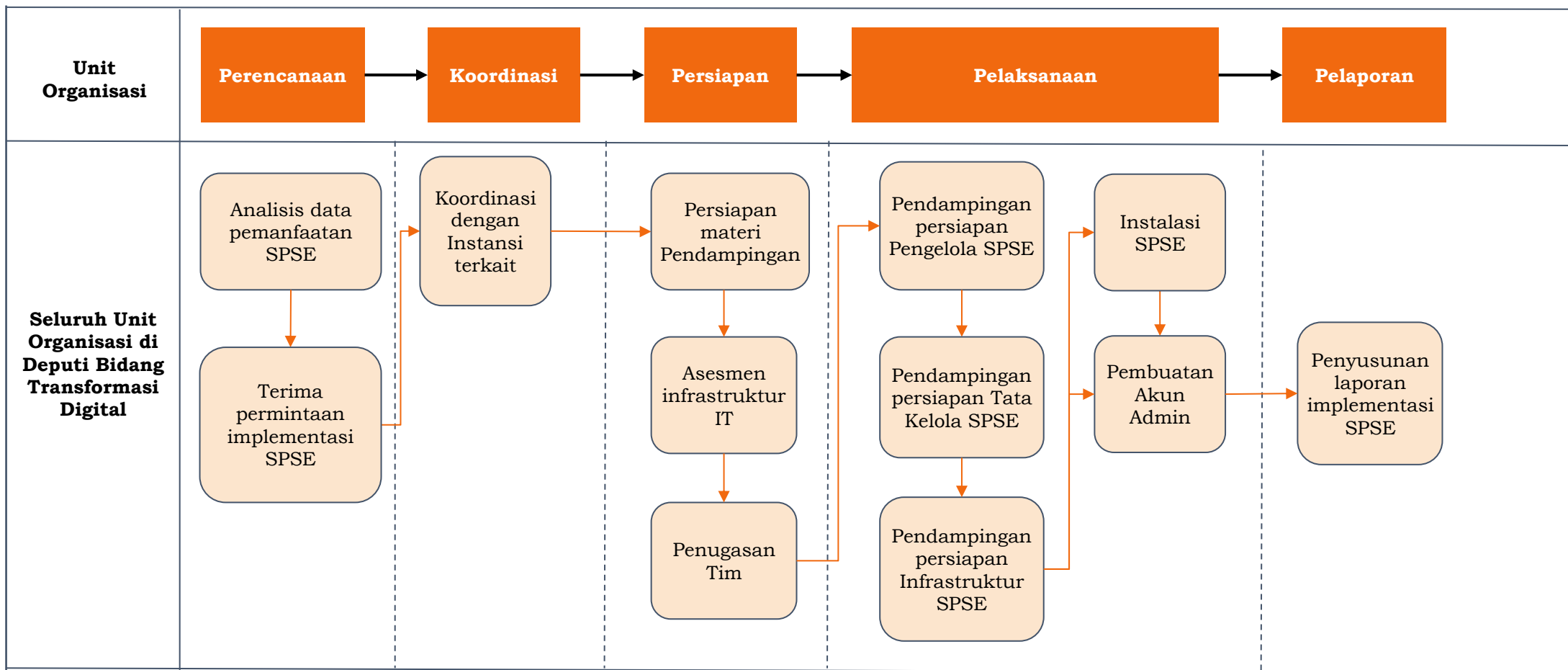
NOMOR	LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-03		
PROSES	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PBJP	LEVEL	2
SUB-PROSES	PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (JF PPBJ)		



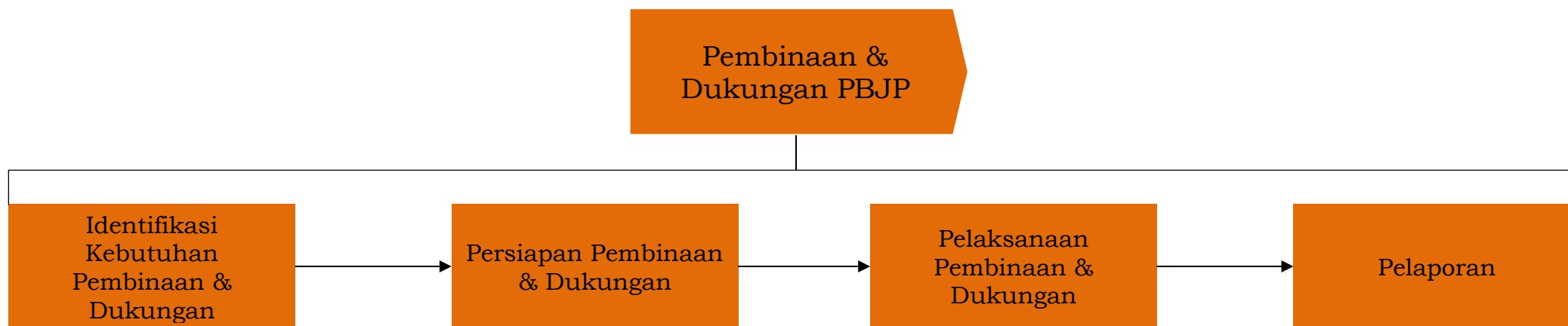
NOMOR	LKPP.PU.L2.IKPBJS/2023.07-04		
PROSES	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PBJP	LEVEL	2
SUB-PROSES	AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (LPPBJ)		



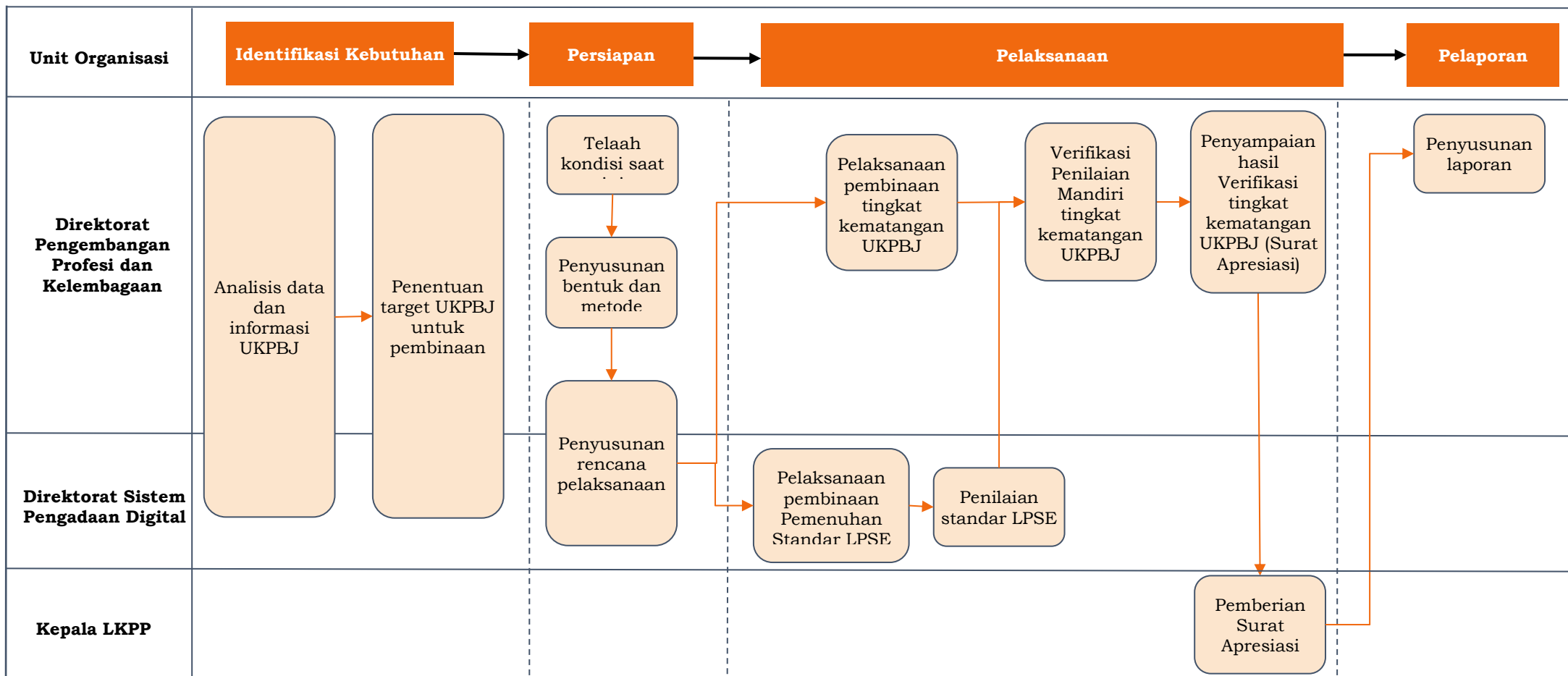
NOMOR	LKPP.PU.L2.IKPBK/2023.07-05		
PROSES	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PBJP	LEVEL	2
SUB-PROSES	PENERAPAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)		



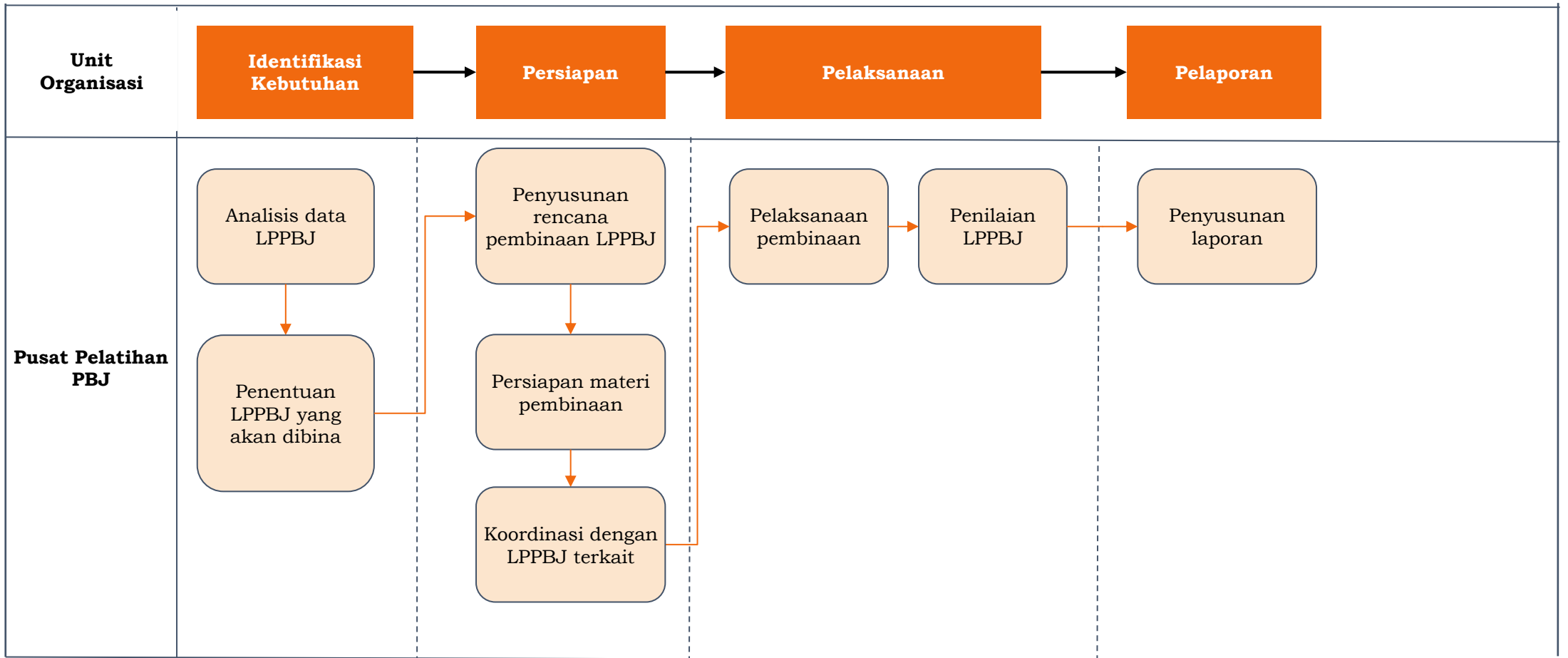
NOMOR	LKPP.PU.L1.PDPBJ/2023.08		
PROSES	PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP	LEVEL	1
MULAI	Identifikasi kebutuhan pembinaan & dukungan	OUTPUT	Peningkatan kapasitas Instansi Pemerintah; Layanan terkait pengembangan kompetensi SDM PBJ & Pelaku Usaha; dan Indeks Kepuasan K/L/PD atas layanan LKPP
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Adalah kegiatan pembinaan dalam hal kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Kegiatan pembinaan antara lain adalah: <ul style="list-style-type: none"> - sosialisasi/bimtek - <i>reward & punishment</i> - pengawasan penyelenggaraan sistem pengadaan secara elektronik - pengelolaan maturitas UKPBJ (survailans, penilaian, pemingkatan, reward & punishment) - peringkat Lembaga Pelatihan PBJ, dan SDM PBJ lainnya. • LKPP memberikan dukungan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada stakeholder terkait, antara lain dalam bentuk konsultasi baik pengaduan maupun diluar pengaduan, advokasi, pendampingan, Layanan Penyelesaian Sengketa. Dukungan dapat dilakukan melalui berbagai media. 		



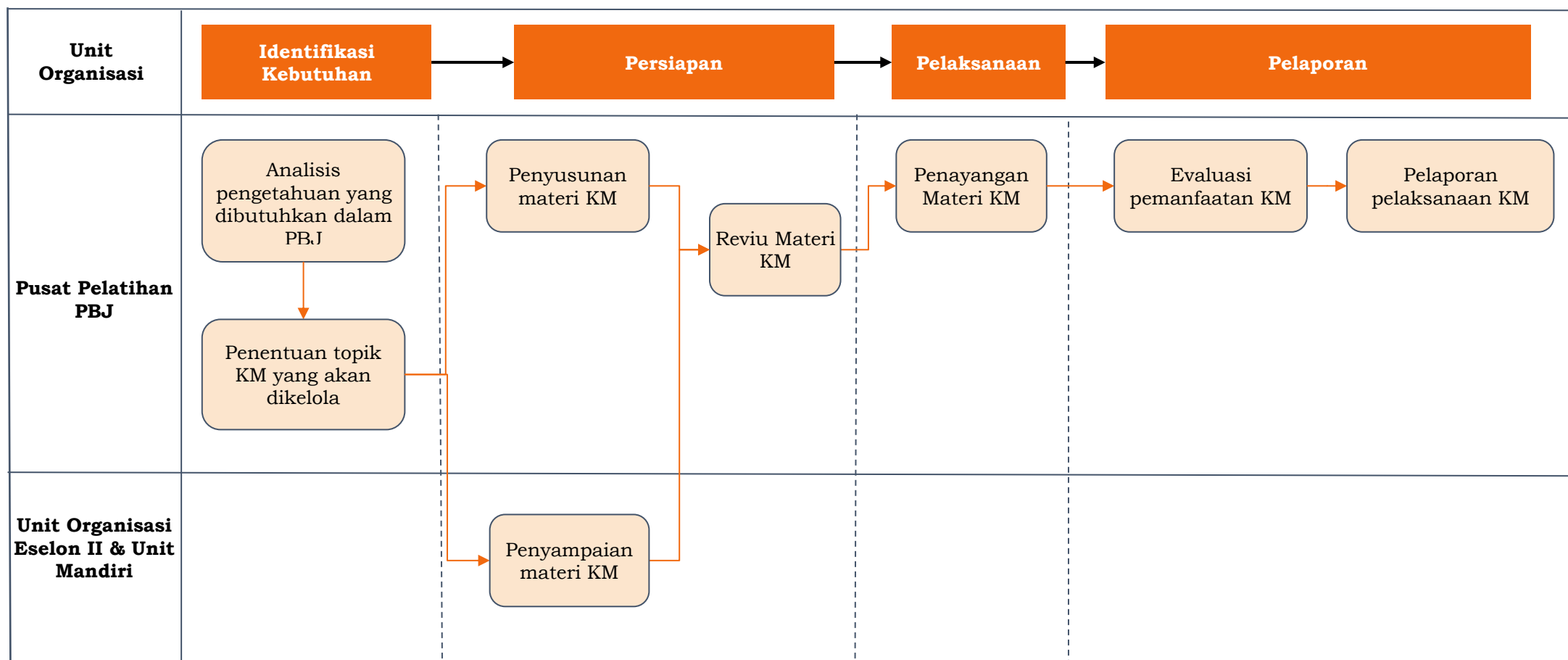
NOMOR	LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-01		
PROSES	PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP	LEVEL	2
SUB-PROSES	PENINGKATAN KAPABILITAS UKPBJ		



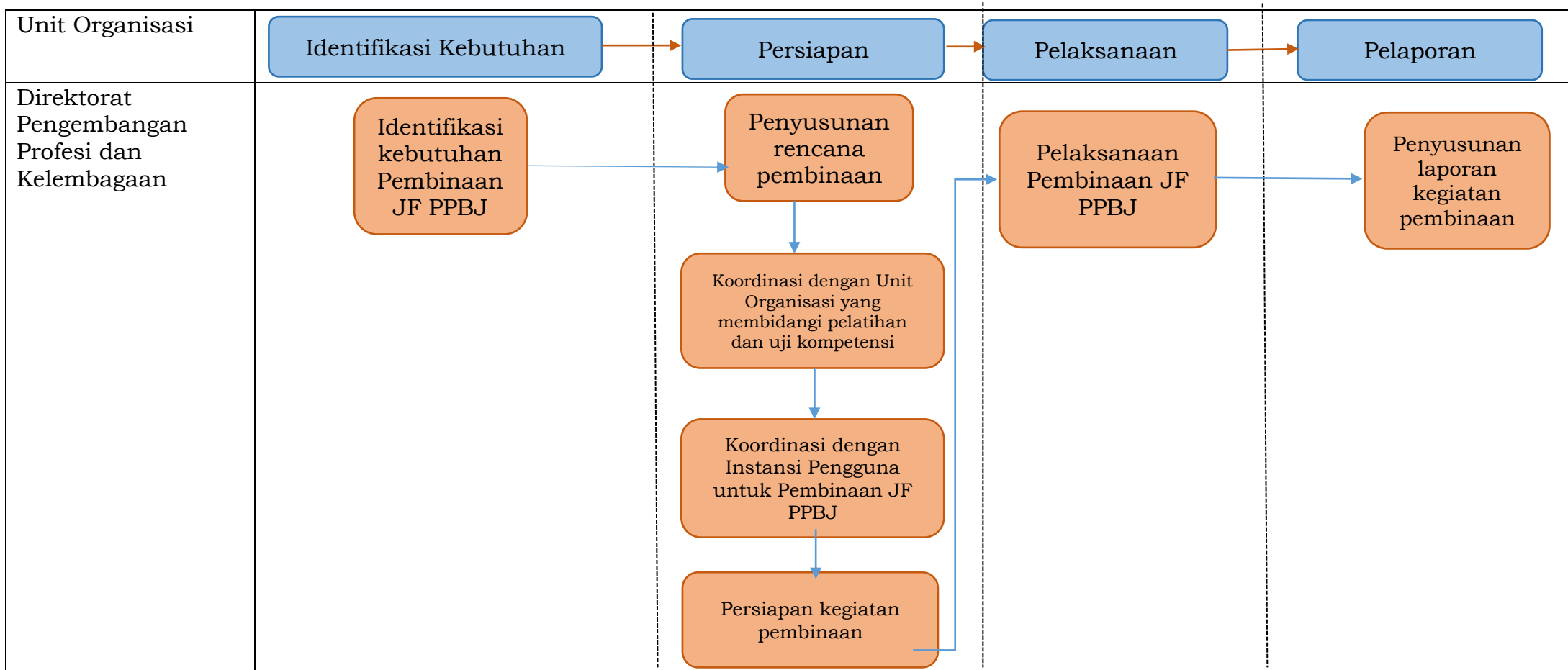
NOMOR	LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-02		
PROSES	PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP	LEVEL	2
SUB-PROSES	PENINGKATAN KAPABILITAS LPPBJ		



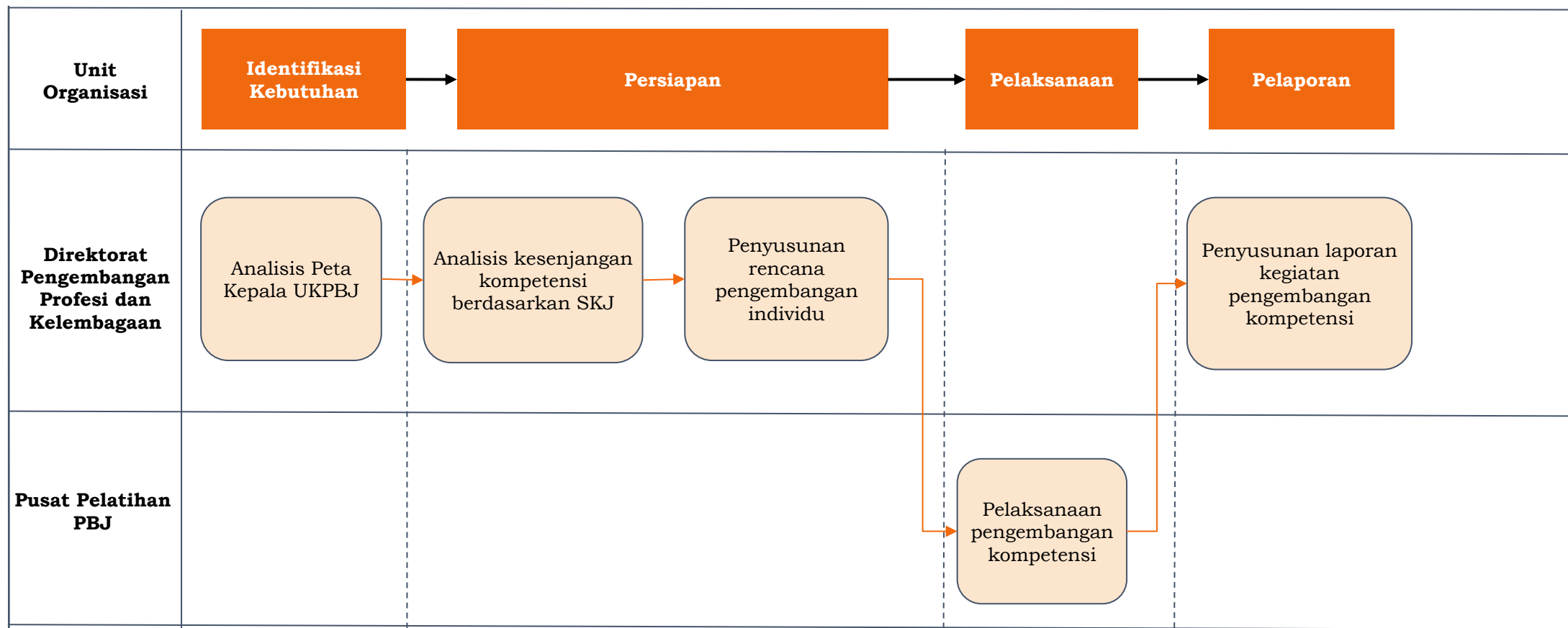
NOMOR	LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-03		
PROSES	PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP	LEVEL	2
SUB-PROSES	KNOWLEDGE MANAGEMENT		



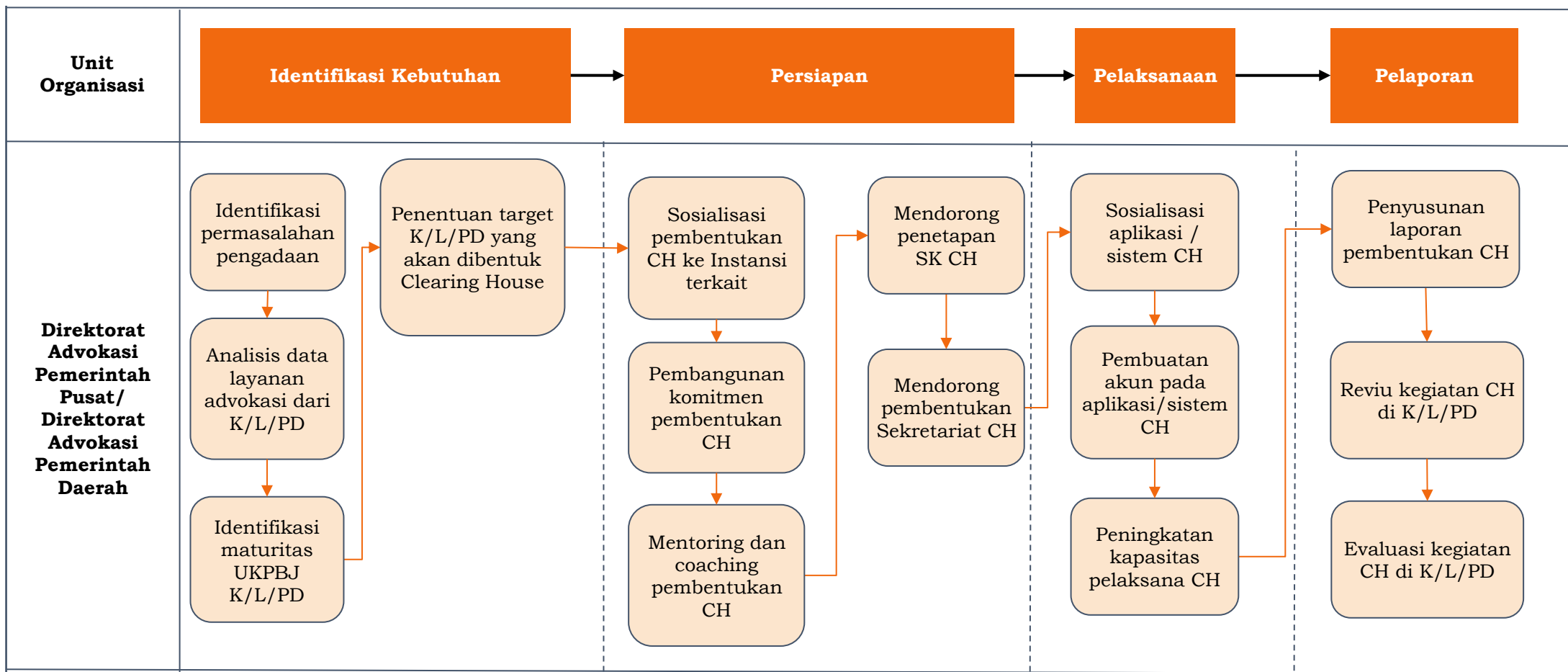
NOMOR	LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-04A		
PROSES	PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP	LEVEL	2
SUB-PROSES	PEMBINAAN SDM PBJ: A. PEMBINAAN JF PPBJ		



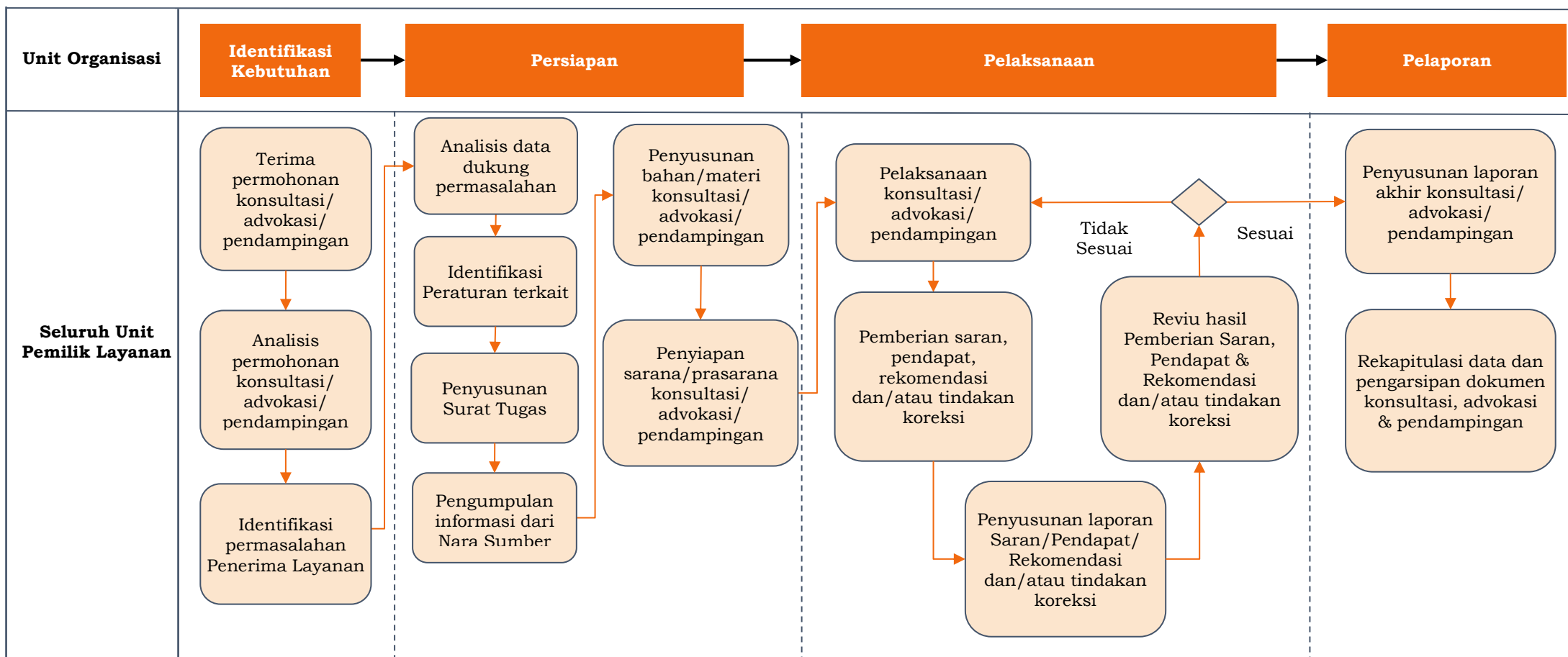
NOMOR	LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-04B		
PROSES	PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP	LEVEL	2
SUB-PROSES	PEMBINAAN SDM PBJ: B. PEMBINAAN KEPALA UKPBJ		



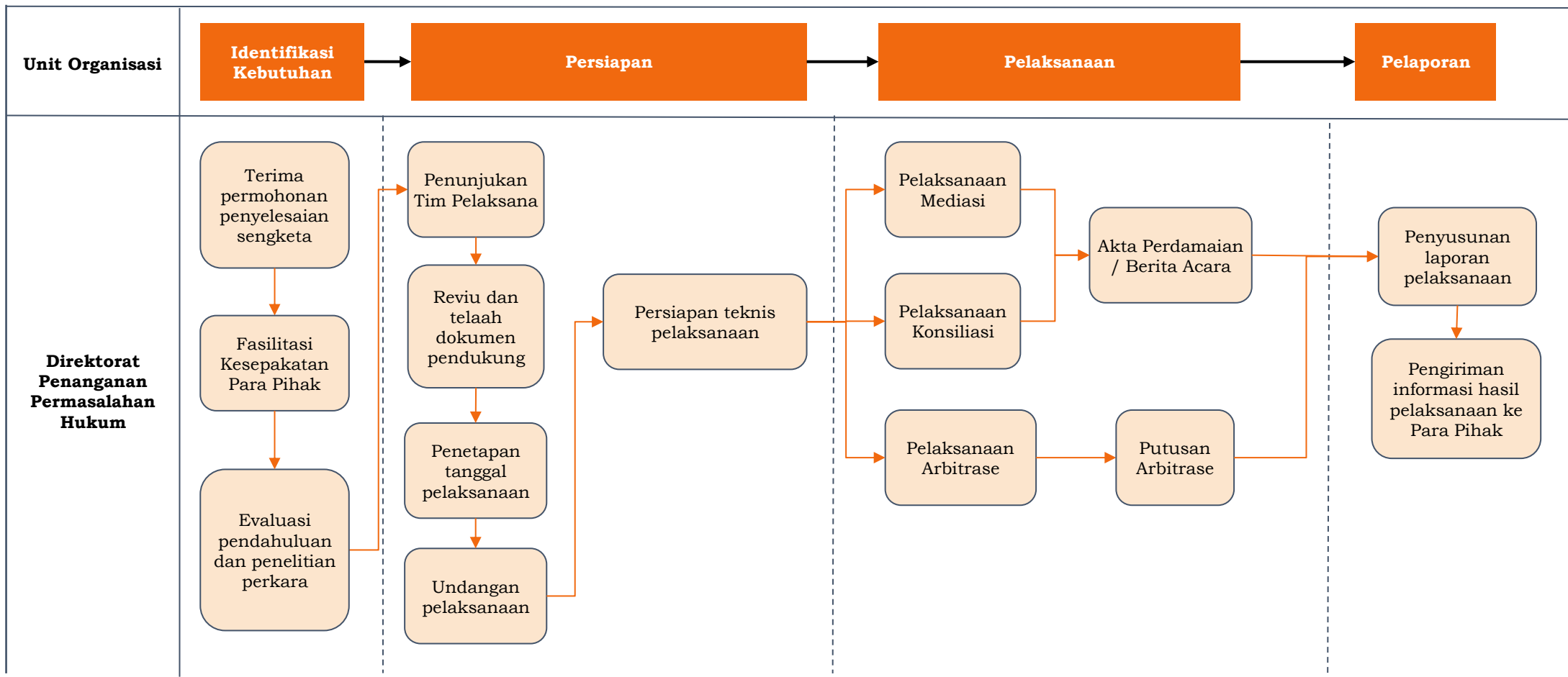
NOMOR	LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-05		
PROSES	PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP	LEVEL	2
SUB-PROSES	PEMBENTUKAN CLEARING HOUSE		



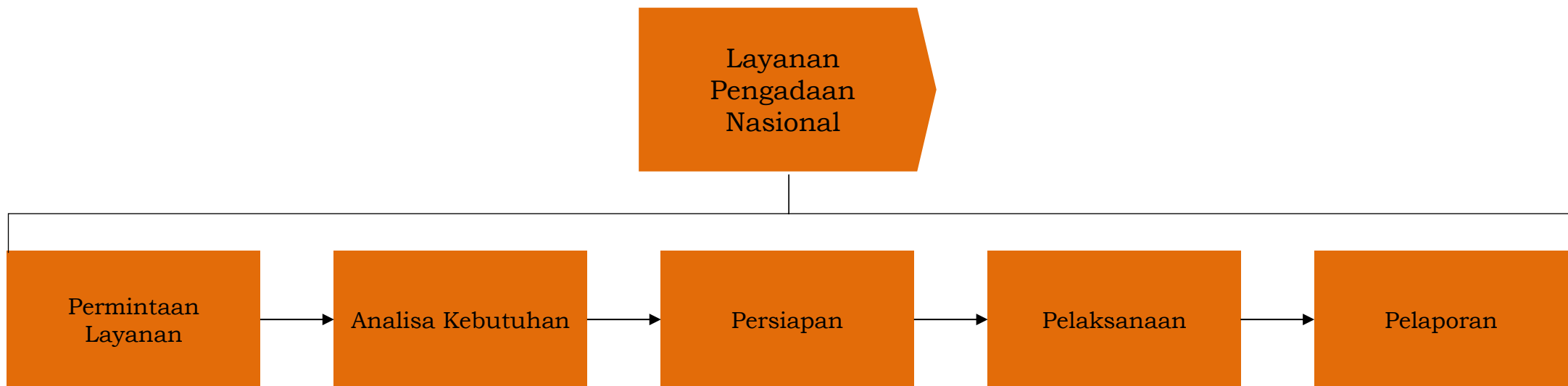
NOMOR	LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-06		
PROSES	PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP	LEVEL	2
SUB-PROSES	KONSULTASI/ADVOKASI/PENDAMPINGAN		



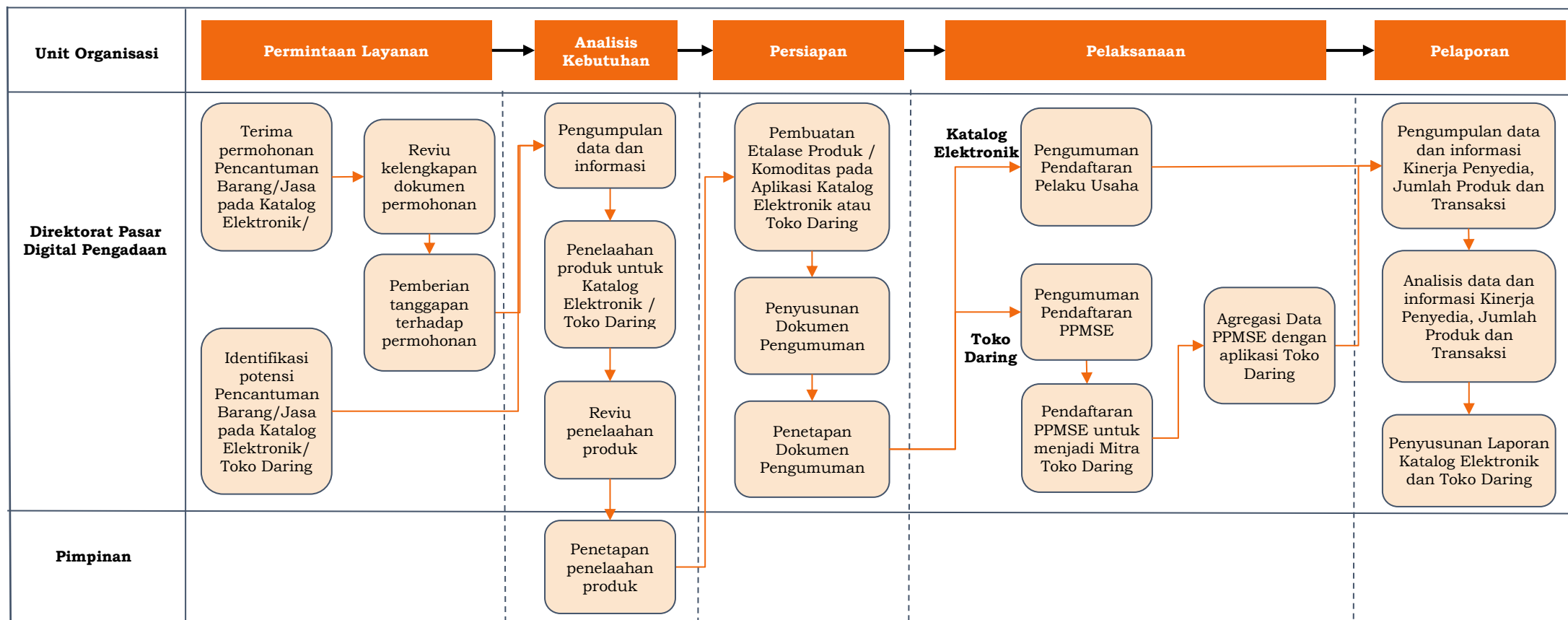
NOMOR	LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-07		
PROSES	PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP	LEVEL	2
SUB-PROSES	PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK		



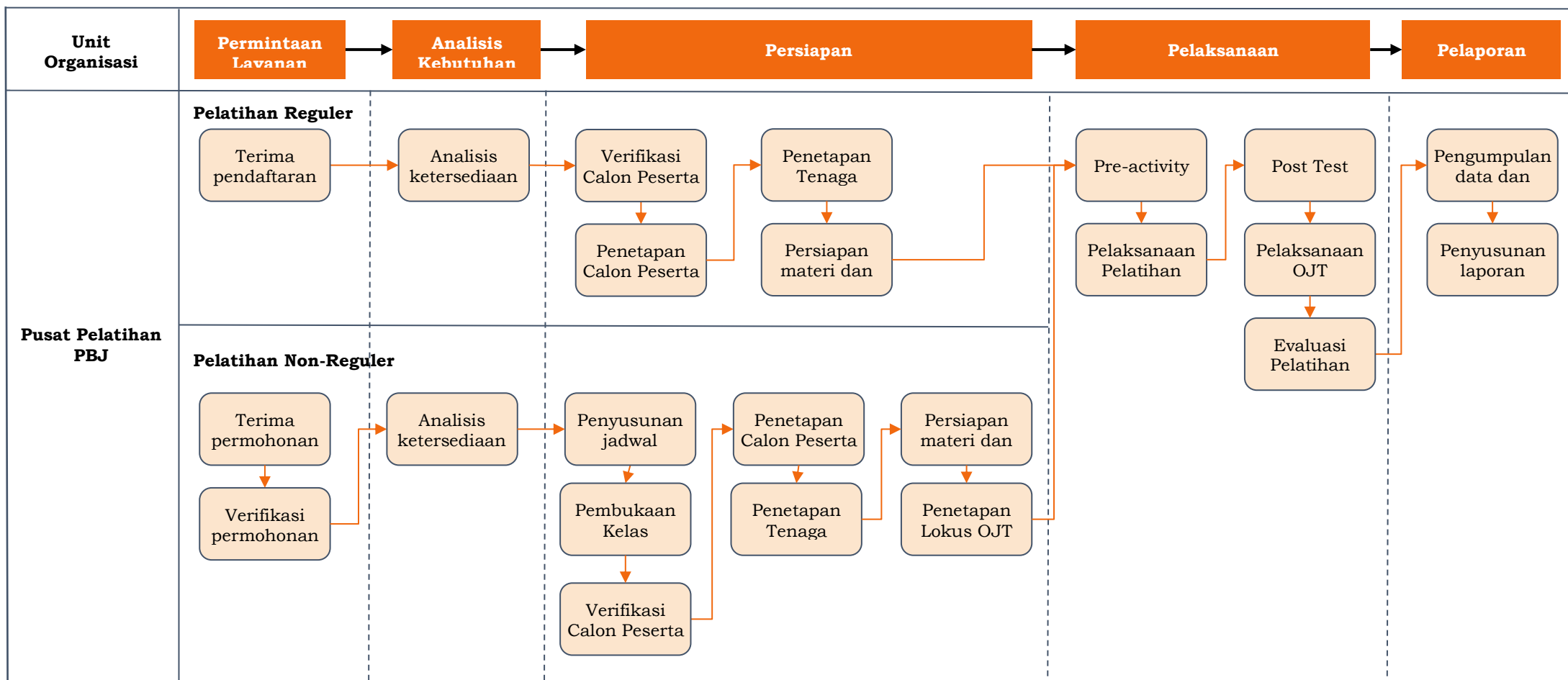
NOMOR	LKPP.PU.L1.LPN/2023.09		
PROSES	LAYANAN PENGADAAN NASIONAL	LEVEL	1
MULAI	Permintaan Kebutuhan	OUTPUT	Terpenuhinya permintaan Instansi lainnya baik dalam bentuk pengadaan barang/jasa, penayangan katalog/toko daring, dan pelatihan terkait PBJP
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	<ul style="list-style-type: none"> Selain sebagai lembaga penyusun kebijakan, LKPP juga menyediakan beberapa layanan dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Nasional untuk Instansi lain. Kegiatan layanan tersebut antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional/toko daring - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Instansi lain - Pelatihan dan sertifikasi SDM PBJ oleh LKPP Proses Layanan PBJP ini dapat dihilangkan dari Proses Bisnis Level 0 LKPP jika sudah tidak dilakukan lagi. 		



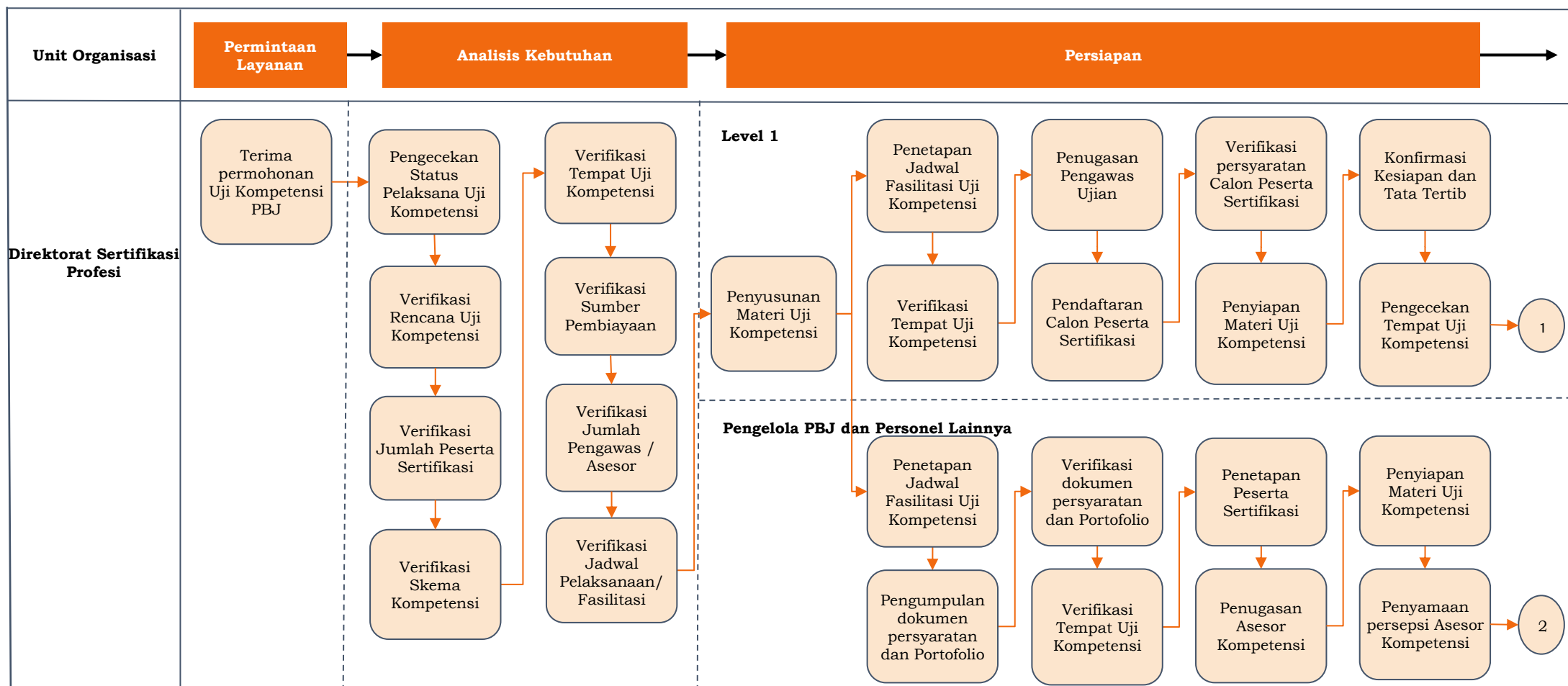
NOMOR	LKPP.PU.L2.LPN/2023.09-01		
PROSES	LAYANAN PENGADAAN NASIONAL	LEVEL	2
SUB-PROSES	PENGELOLAAN KATALOG		



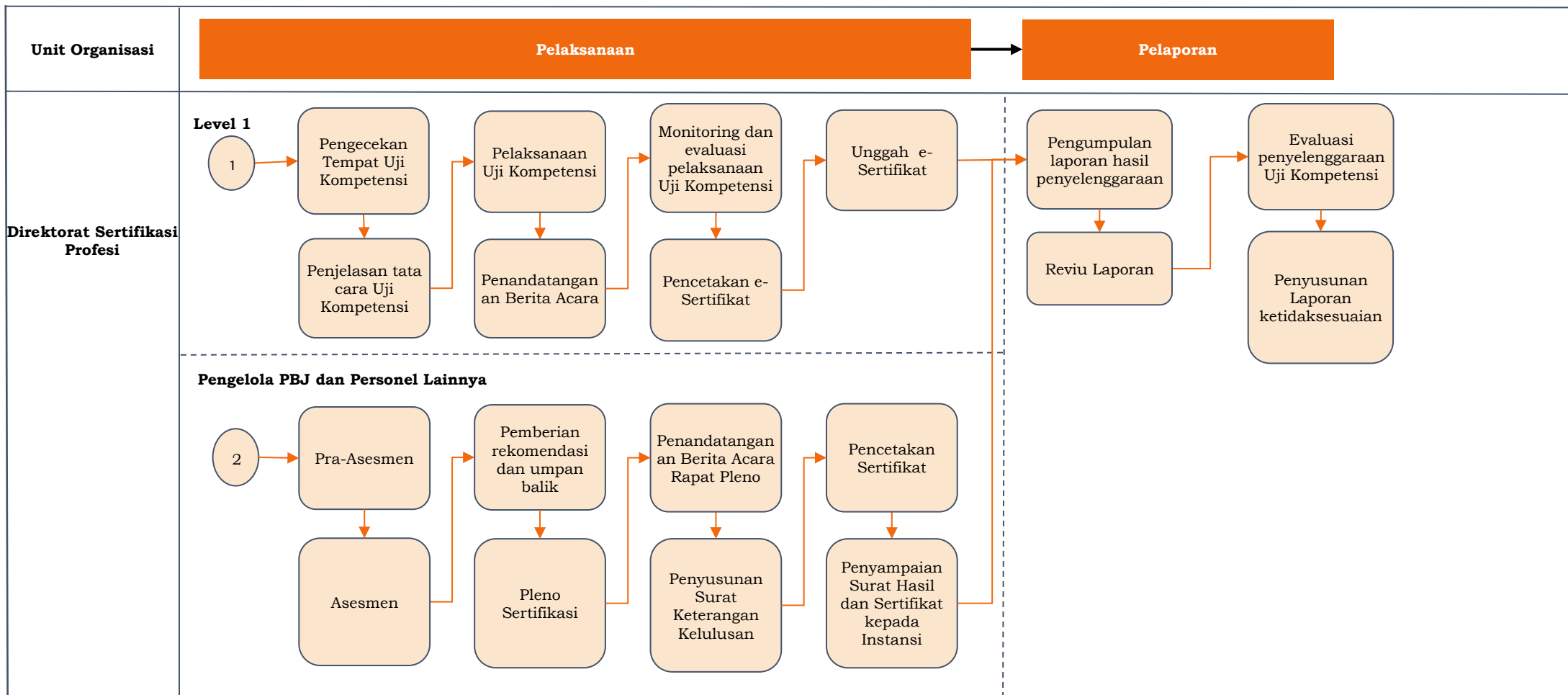
NOMOR	LKPP.PU.L2.LPN/2023.09-02		
PROSES	LAYANAN PENGADAAN NASIONAL	LEVEL	2
SUB-PROSES	PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA		



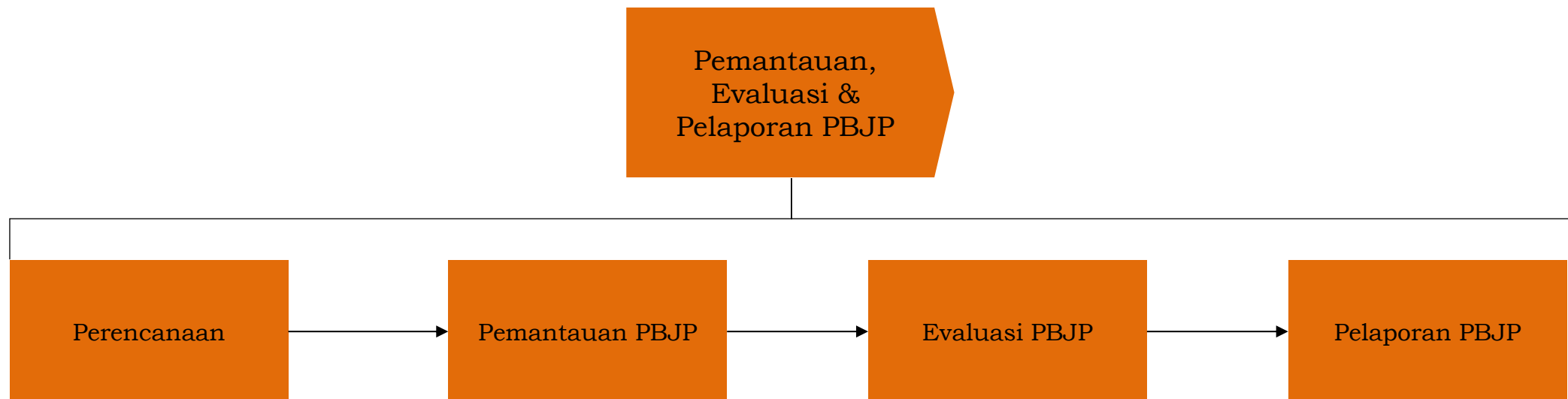
NOMOR	LKPP.PU.L2.LPN/2023.09-03	HALAMAN	1
PROSES	LAYANAN PENGADAAN NASIONAL	LEVEL	2
SUB-PROSES	SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA		



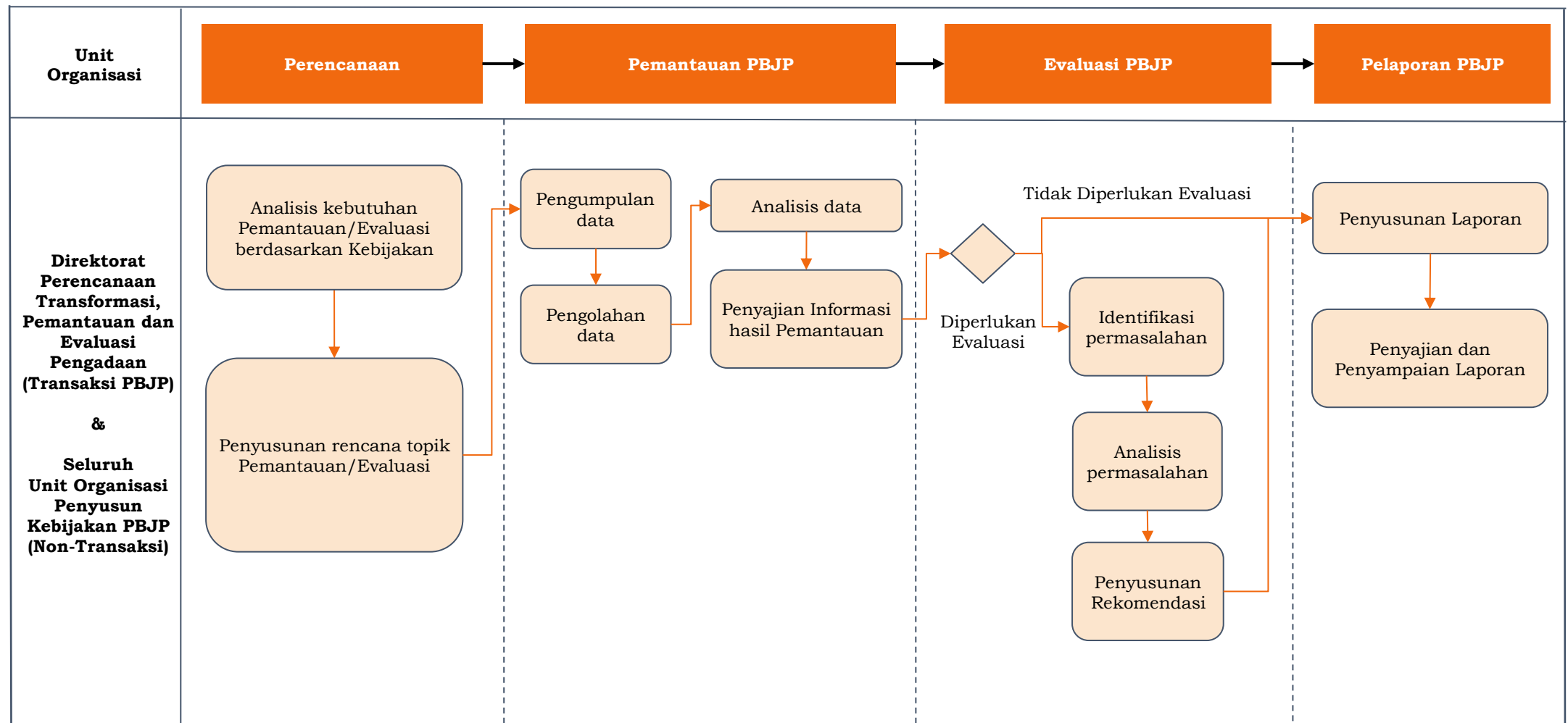
NOMOR	LKPP.PU.L2.LPN/2023.09-03	HALAMAN	2
PROSES	LAYANAN PENGADAAN NASIONAL	LEVEL	2
SUB-PROSES	SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA		



NOMOR	LKPP.PU.L1.PEP/2023.10		
PROSES	PEMANTAUAN, EVALUASI & PELAPORAN PBJP	LEVEL	1
MULAI	Perencanaan	OUTPUT	Laporan agregat terkait PBJP dan kualitas kebijakan
AKHIR	Pelaporan PBJP		
KETERANGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan LKPP untuk memastikan implementasi dari kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. • LKPP juga melakukan proses evaluasi untuk memastikan kualitas dan efektifitas kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hasil evaluasi akan menjadi masukan dalam proses Perumusan Kebijakan maupun Pengembangan Sistem Digital. • Proses pelaporan adalah kegiatan penyusunan laporan dan penyediaan informasi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, termasuk pengkomunikasiannya kepada pemangku kepentingan seperti Presiden, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat. 		

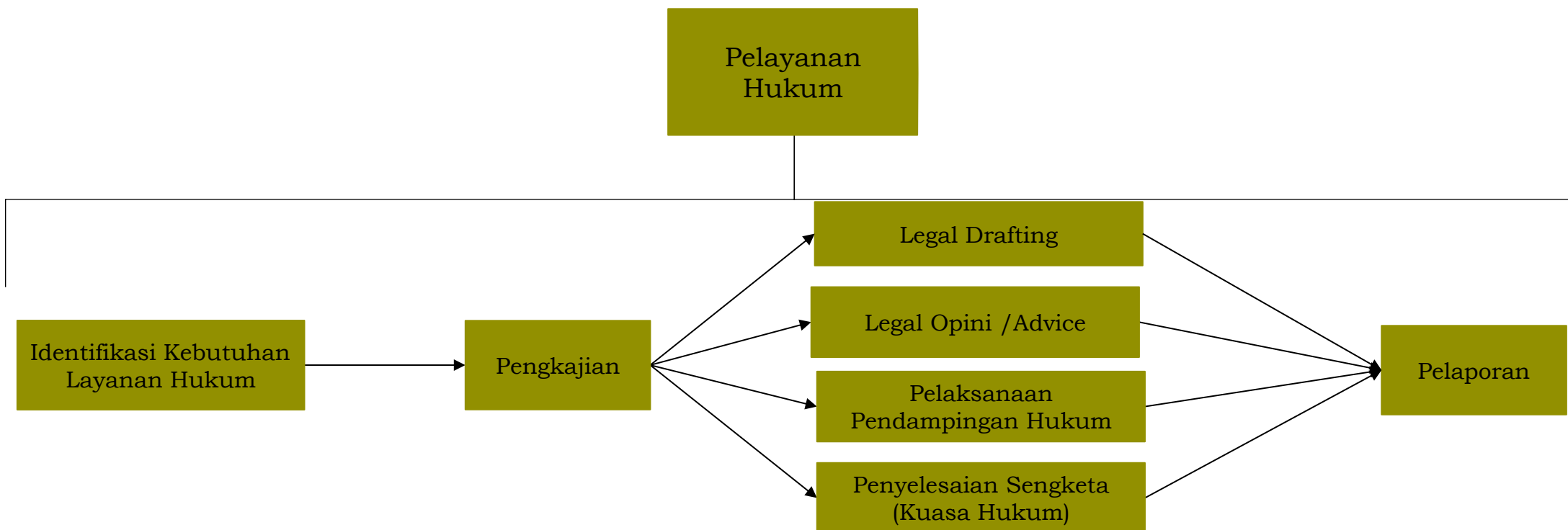


NOMOR	LKPP.PU.L2.PEP/2023.10		
PROSES	PEMANTAUAN, EVALUASI & PELAPORAN PBJP	LEVEL	2

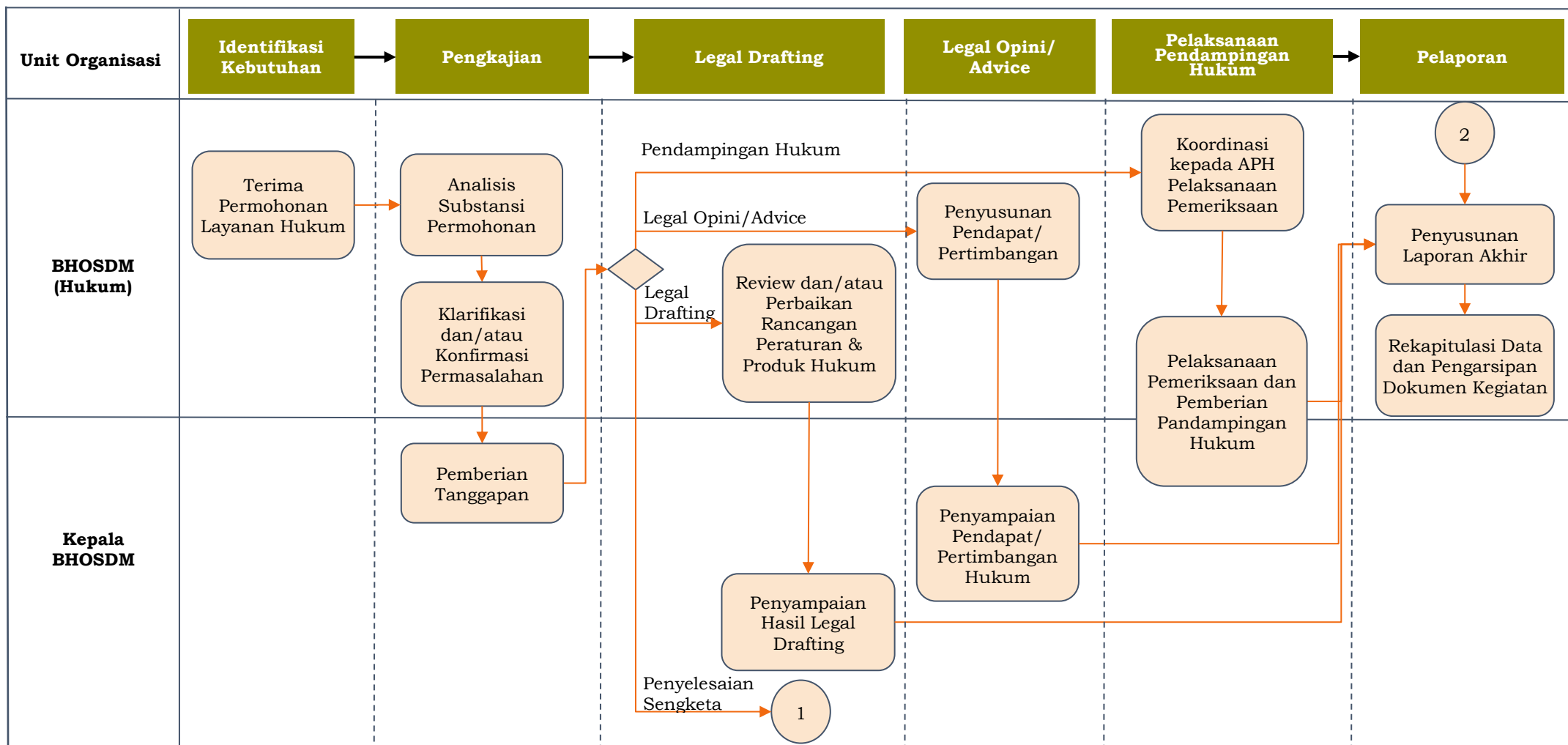


BAB V
PROSES PENDUKUNG
LEVEL 1 & 2

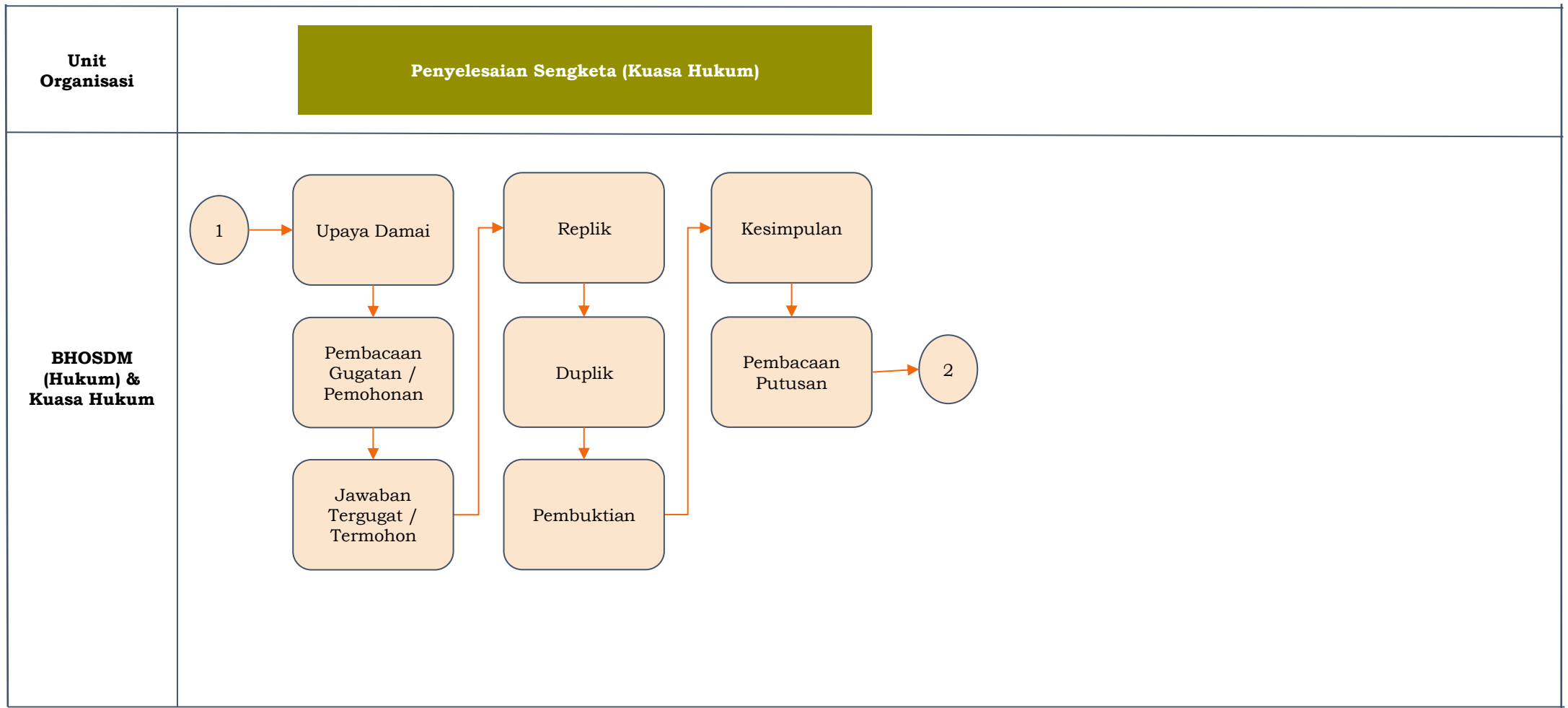
NOMOR	LKPP.PP.L1.PHKM/2023.11		
PROSES	PELAYANAN HUKUM	LEVEL	1
MULAI	Identifikasi Kebutuhan Layanan Hukum	OUTPUT	Legal Drafting, Legal Advice, dan layanan hukum lainnya
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	Proses layanan dalam hal kebutuhan legal dan hukum internal LKPP		



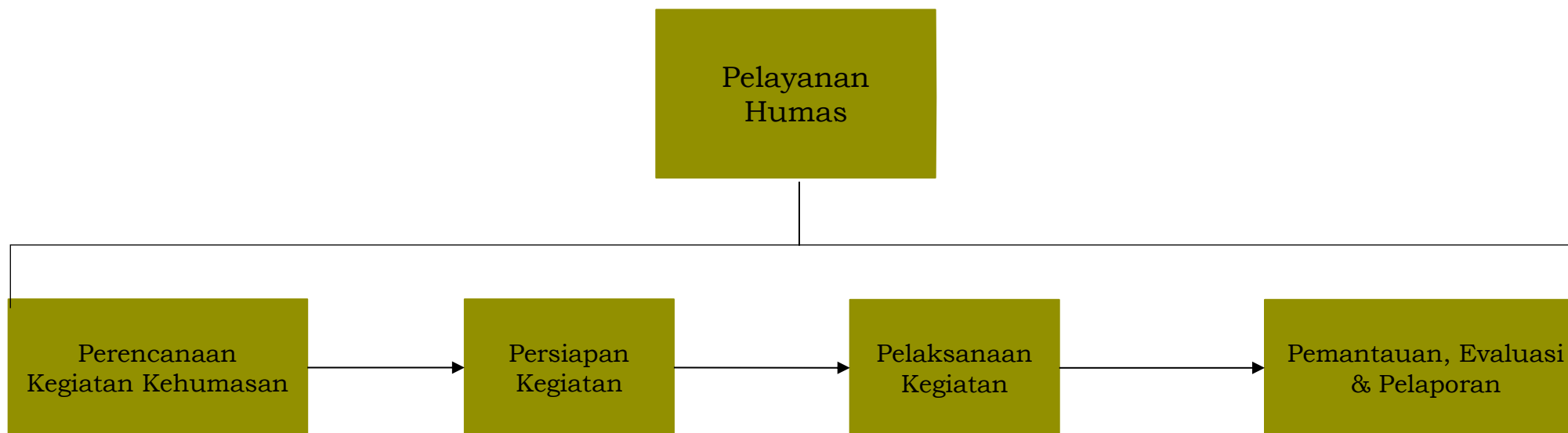
NOMOR	LKPP.PP.L2.PHKM/2023.11	HALAMAN	1
PROSES	PELAYANAN HUKUM	LEVEL	2



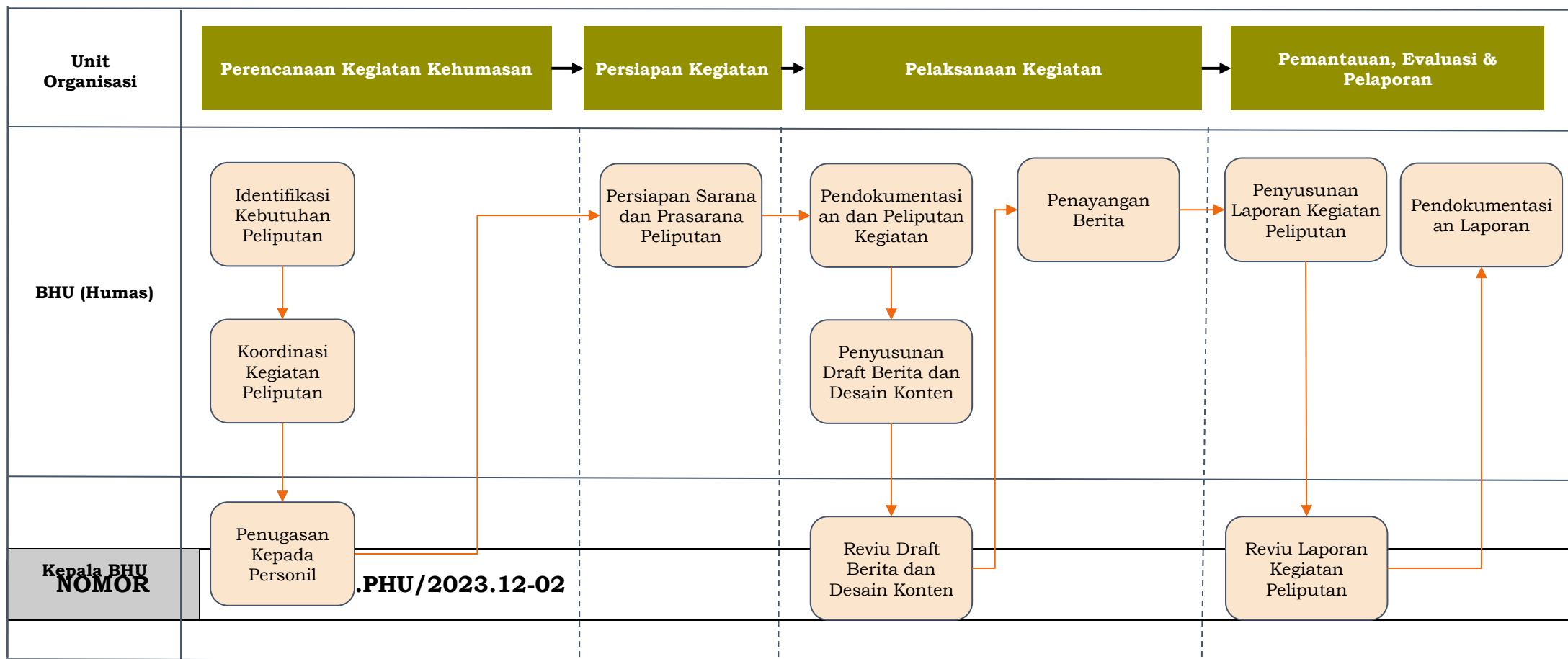
NOMOR	LKPP.PP.L2.PHKM/2023.11	HALAMAN	2
PROSES	PELAYANAN HUKUM	LEVEL	2



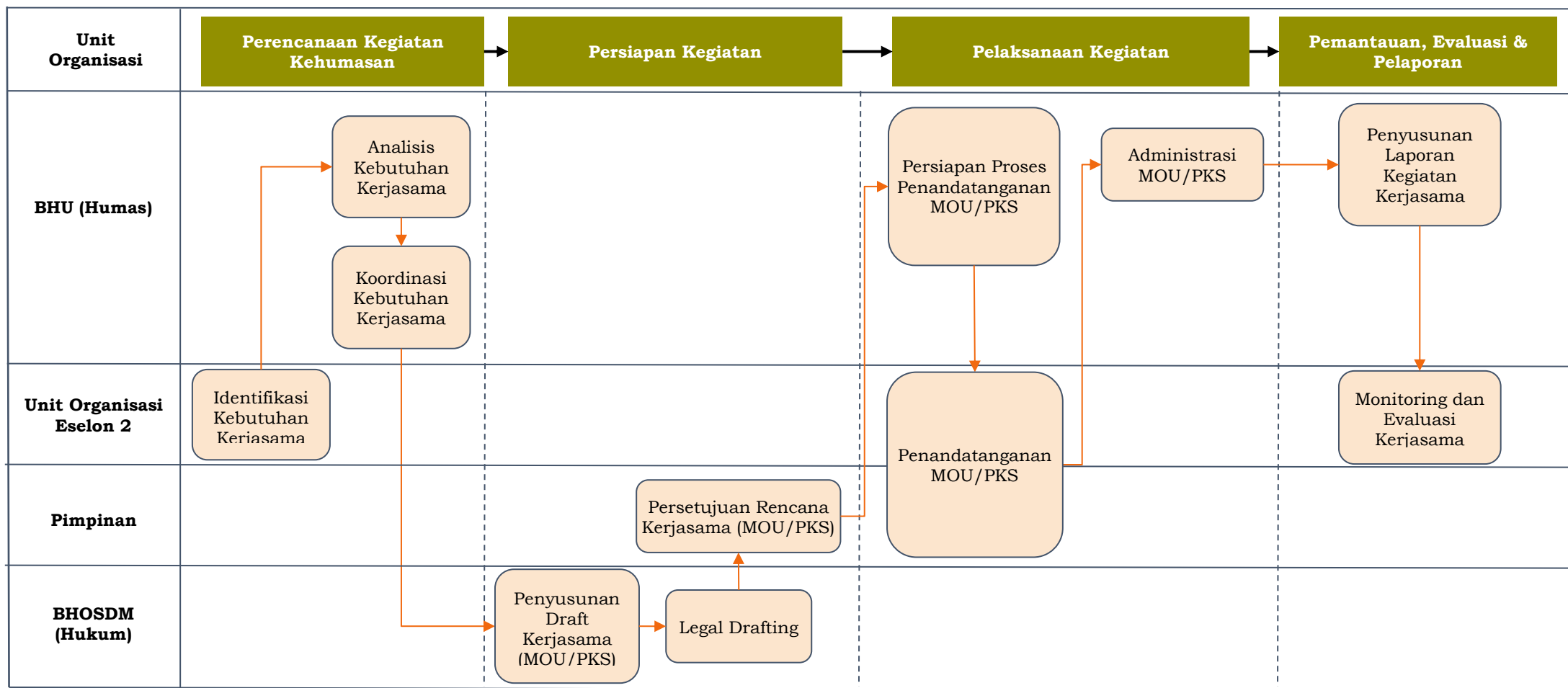
NOMOR	LKPP.PP.L1.PHU/2023.12		
PROSES	PELAYANAN HUMAS	LEVEL	1
MULAI	Perencanaan Kegiatan Kehumasan	OUTPUT	Publikasi, dokumentasi, dan informasi
AKHIR	Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan		
KETERANGAN	Proses layanan hubungan masyarakat, mencakup antara lain layanan publikasi, layanan dokumentasi, dan layanan informasi		



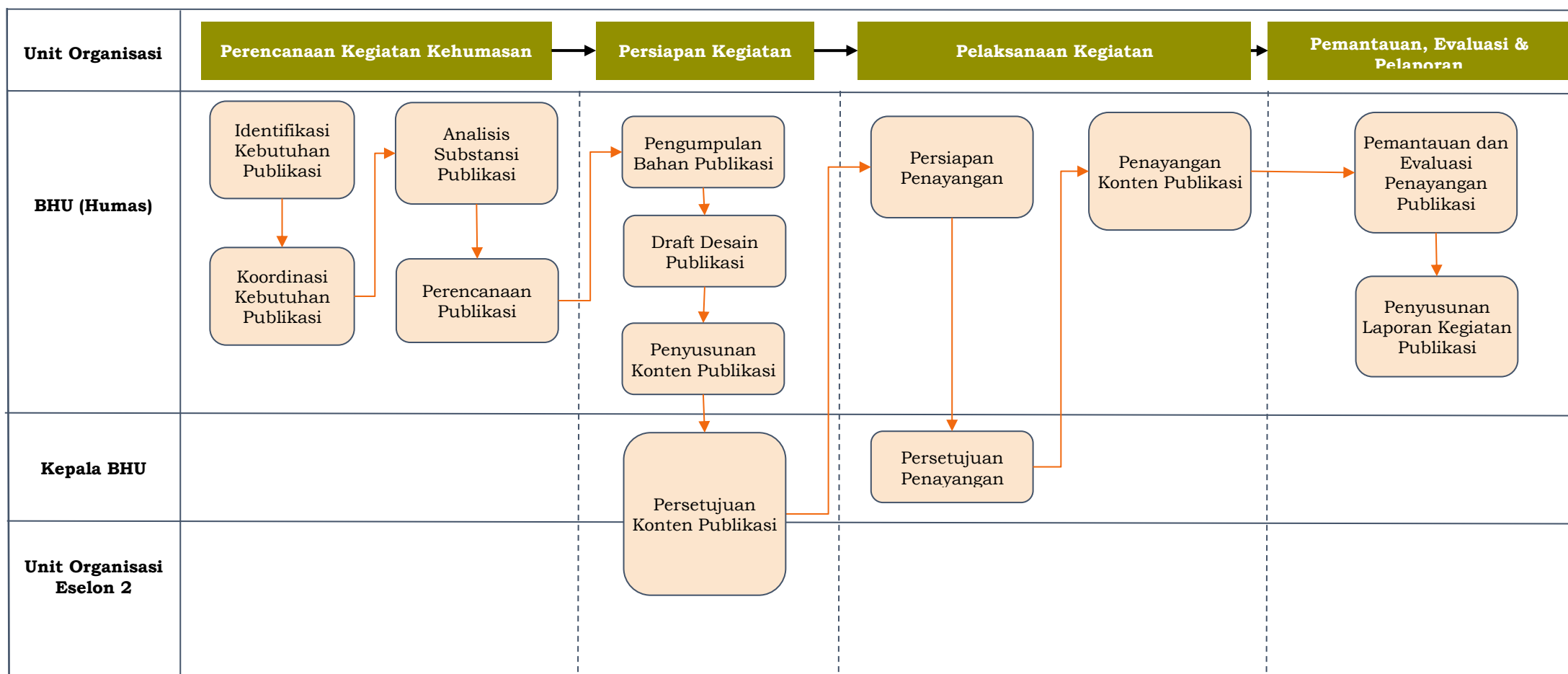
NOMOR	LKPP.PP.L2.PHU/2023.12-01		
PROSES	PELAYANAN HUMAS	LEVEL	2
SUB-PROSES	PELIPUTAN		



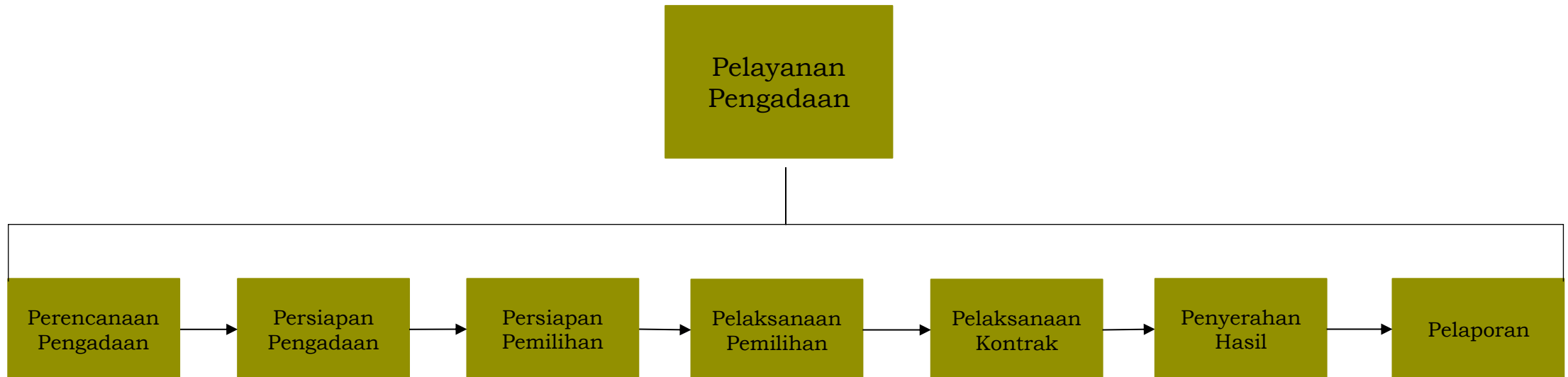
PROSES	PELAYANAN HUMAS	LEVEL	2
SUB-PROSES	KERJASAMA		



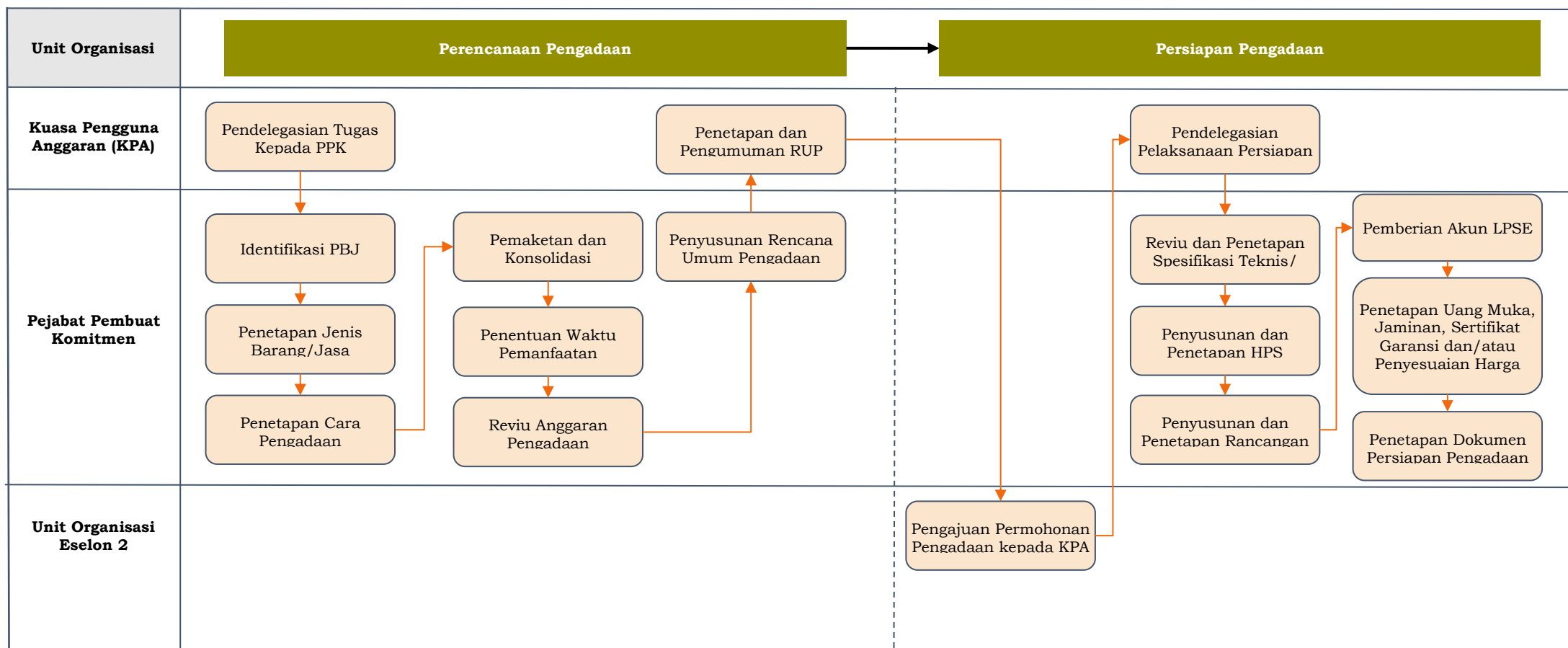
NOMOR	LKPP.PP.L2.PHU/2023.12-03		
PROSES	PELAYANAN HUMAS	LEVEL	2
SUB-PROSES	PUBLIKASI		



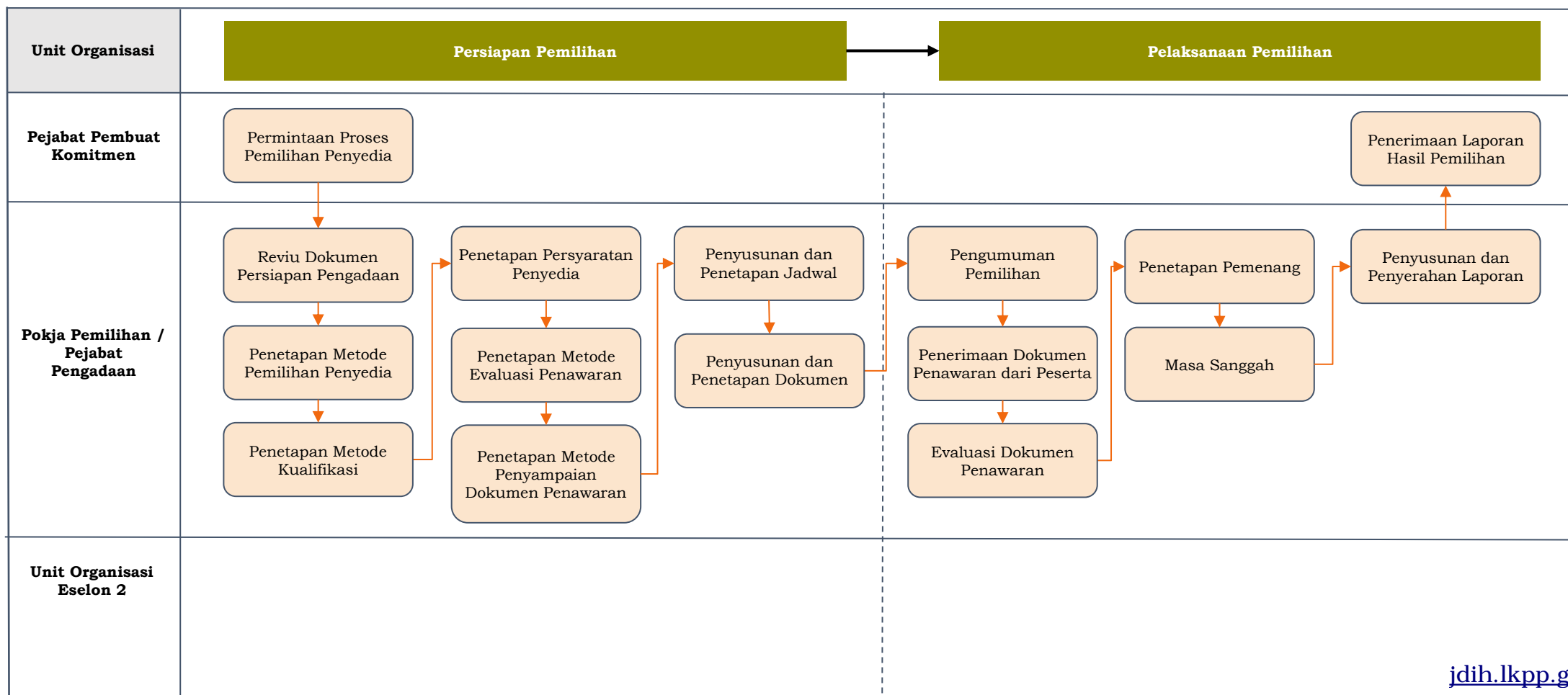
NOMOR	LKPP.PP.L1.PENGADAAN/2023.13		
PROSES	PELAYANAN PENGADAAN	LEVEL	1
MULAI	Perencanaan Pengadaan	OUTPUT	Hasil pengadaan
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	Proses layanan kegiatan pengadaan di internal LKPP		



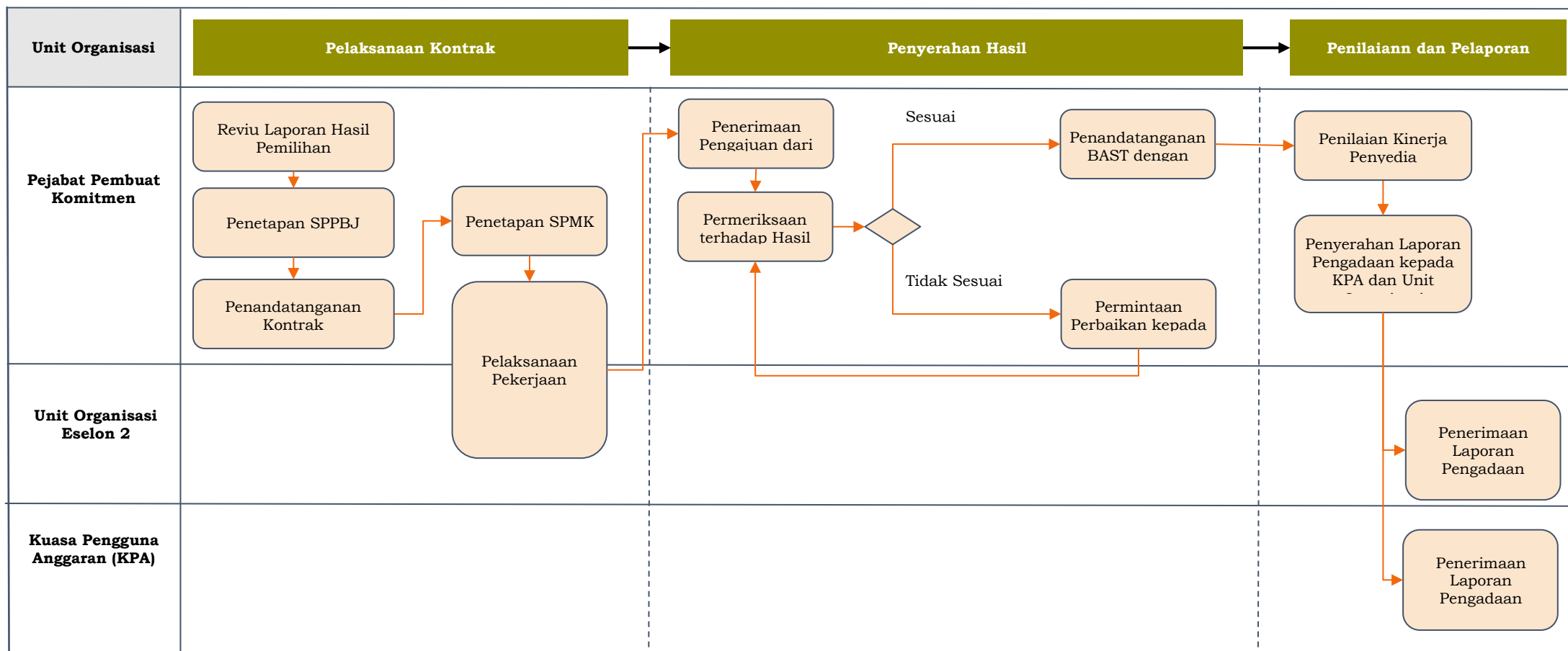
NOMOR	LKPP.PP.L2.PENGADAAN/2023.13-01	HALAMAN	1
PROSES	PELAYANAN PENGADAAN	LEVEL	2
SUB-PROSES	PENGADAAN MELALUI PENYEDIA		



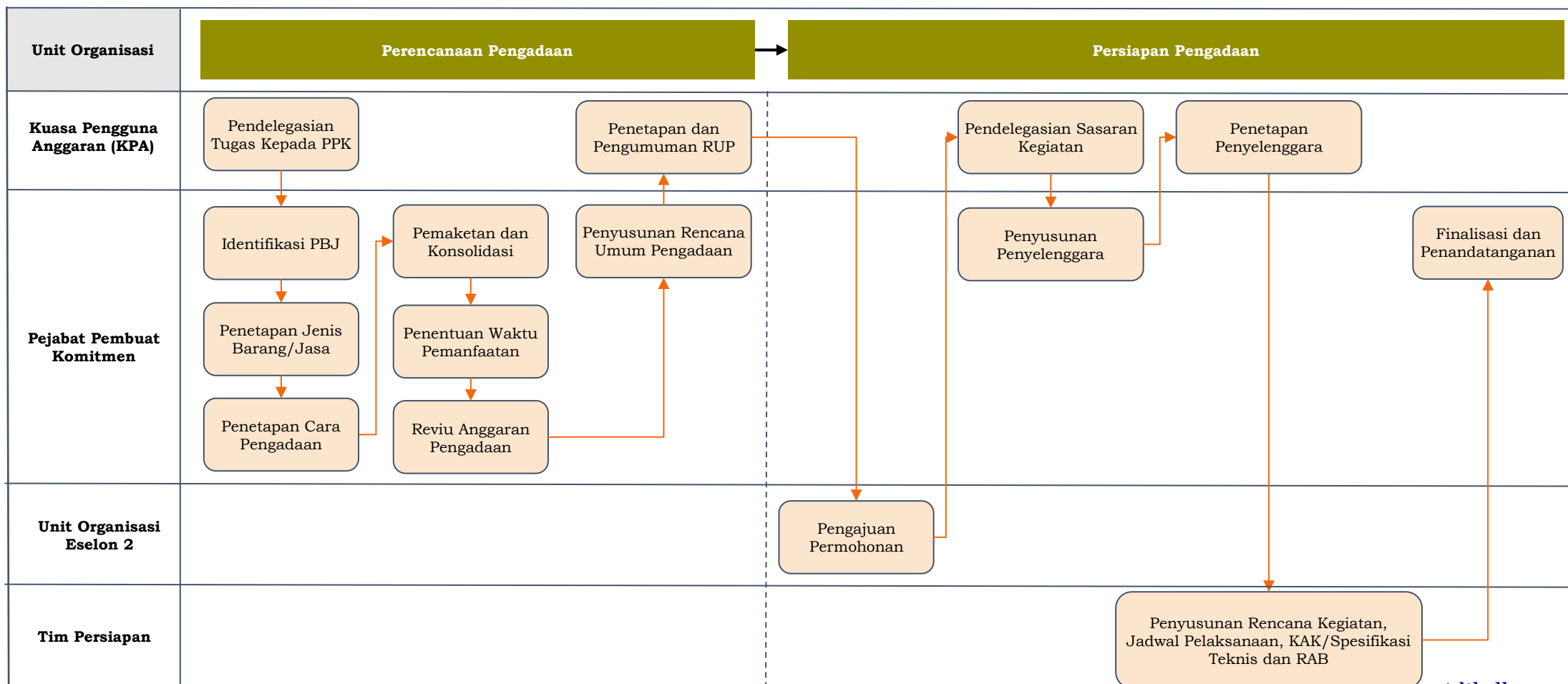
NOMOR	LKPP.PP.L2.PENGADAAN/2023.13-01	HALAMAN	2
PROSES	PELAYANAN PENGADAAN	LEVEL	2
SUB-PROSES	PENGADAAN MELALUI PENYEDIA		



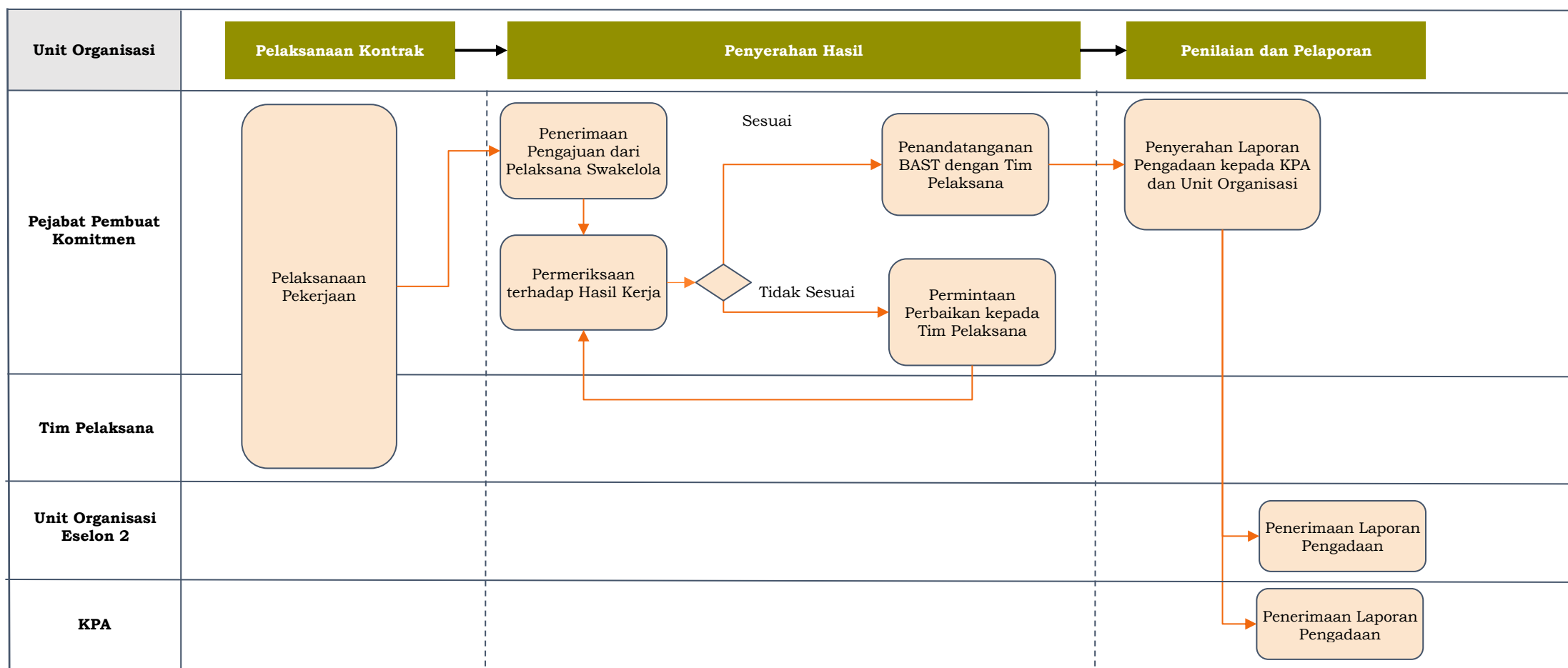
NOMOR	LKPP.PP.L2.PENGADAAN/2023.13-01	HALAMAN	3
PROSES	PELAYANAN PENGADAAN	LEVEL	2
SUB-PROSES	PENGADAAN MELALUI PENYEDIA		



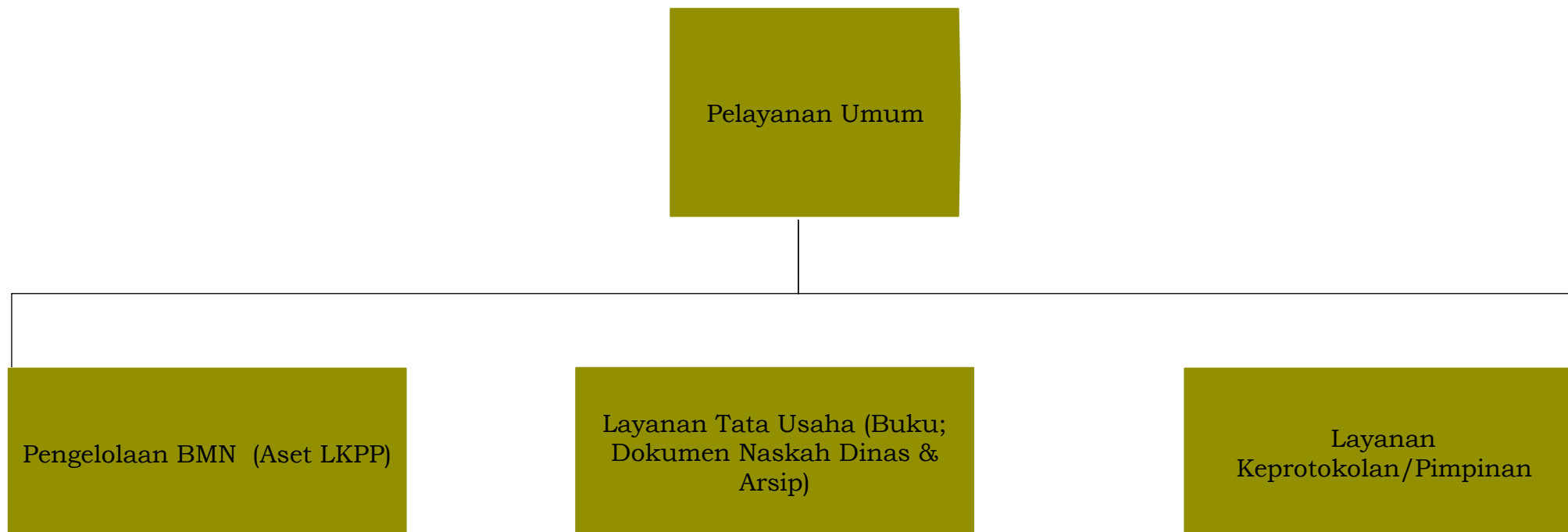
NOMOR	LKPP.PP.L2.PENGADAAN/2023.12-02	HALAMAN	1
PROSES	PELAYANAN PENGADAAN	LEVEL	2
SUB-PROSES	PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA		



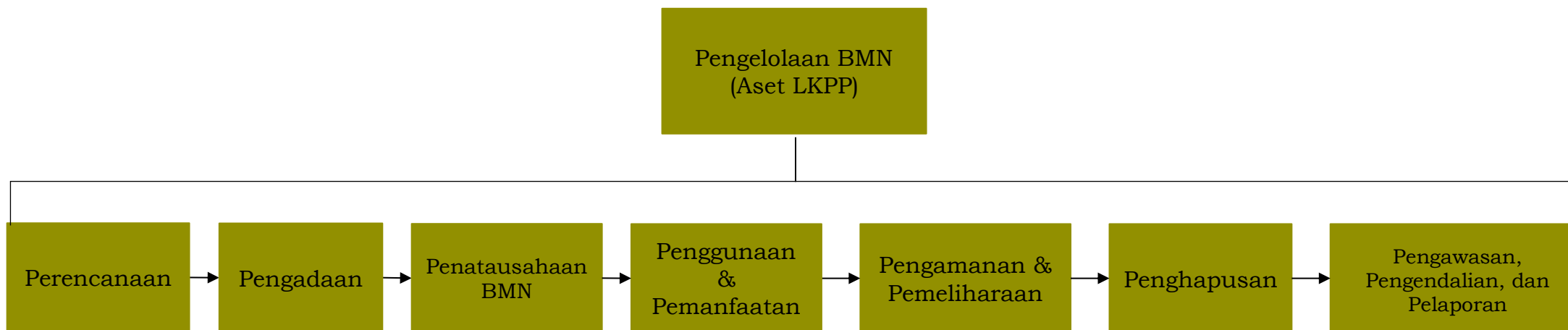
NOMOR	LKPP.PP.L2.PENGADAAN/2023.12-02	HALAMAN	2
PROSES	PELAYANAN PENGADAAN	LEVEL	2
SUB-PROSES	PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA		



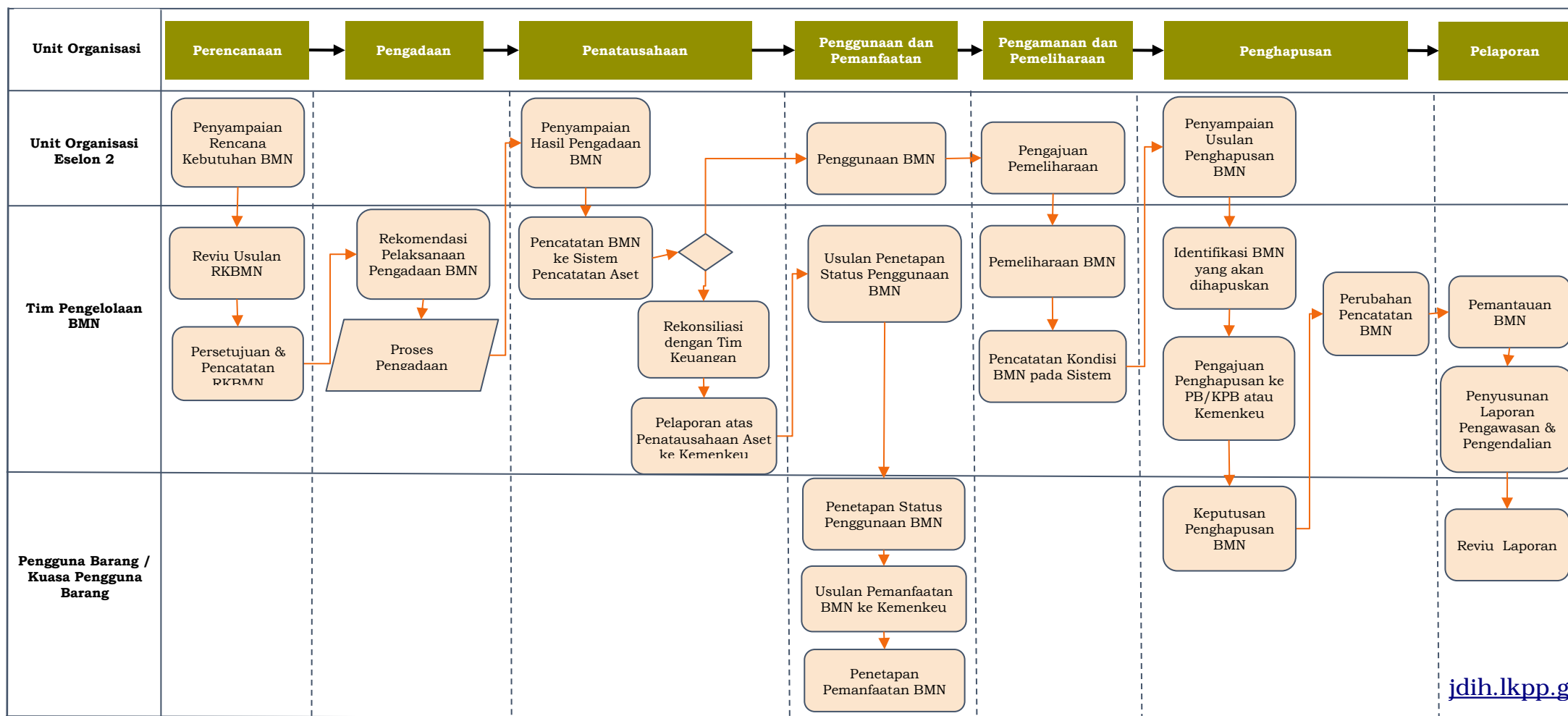
NOMOR	LKPP.PP.L1.PUMUM/2023.13		
PROSES	PELAYANAN UMUM	LEVEL	1
MULAI	-	OUTPUT	Beragam tergantung dari masing-masing proses turunannya
AKHIR	-		
KETERANGAN	Proses layanan umum terdiri dari proses pengelolaan BMN (asset LKPP); proses layanan tata usaha (buku, dokumen naskah dinas, dan arsip); serta proses layanan keprotokolan/pimpinan)		



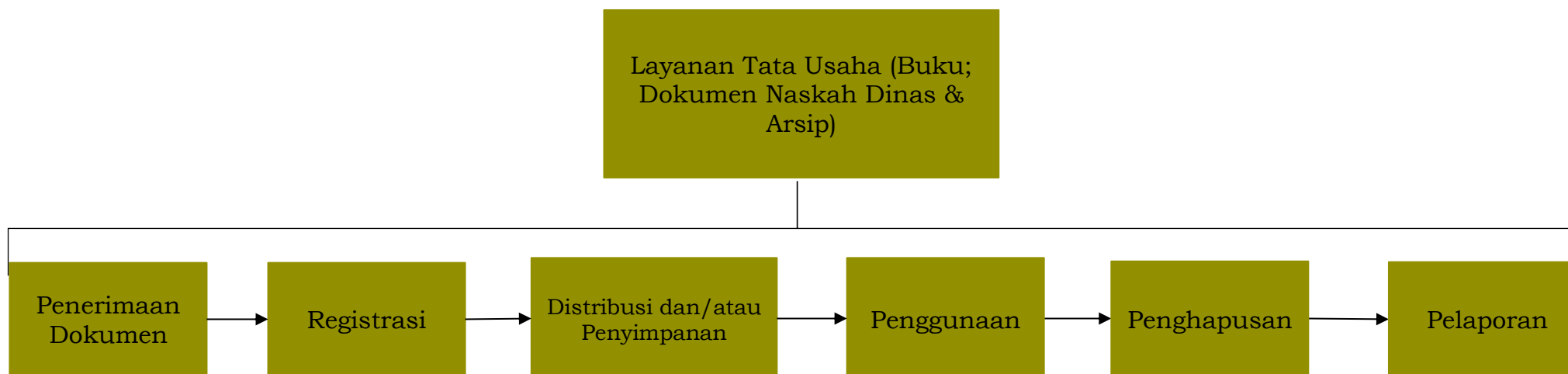
NOMOR	LKPP.PP.L1.PUMUM/2023.13-01		
PROSES	PELAYANAN UMUM	LEVEL	1
SUB-PROSES	PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)		
MULAI	Perencanaan	OUTPUT	Laporan BMN
AKHIR	Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan		
KETERANGAN	Proses pengelolaan BMN mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan		



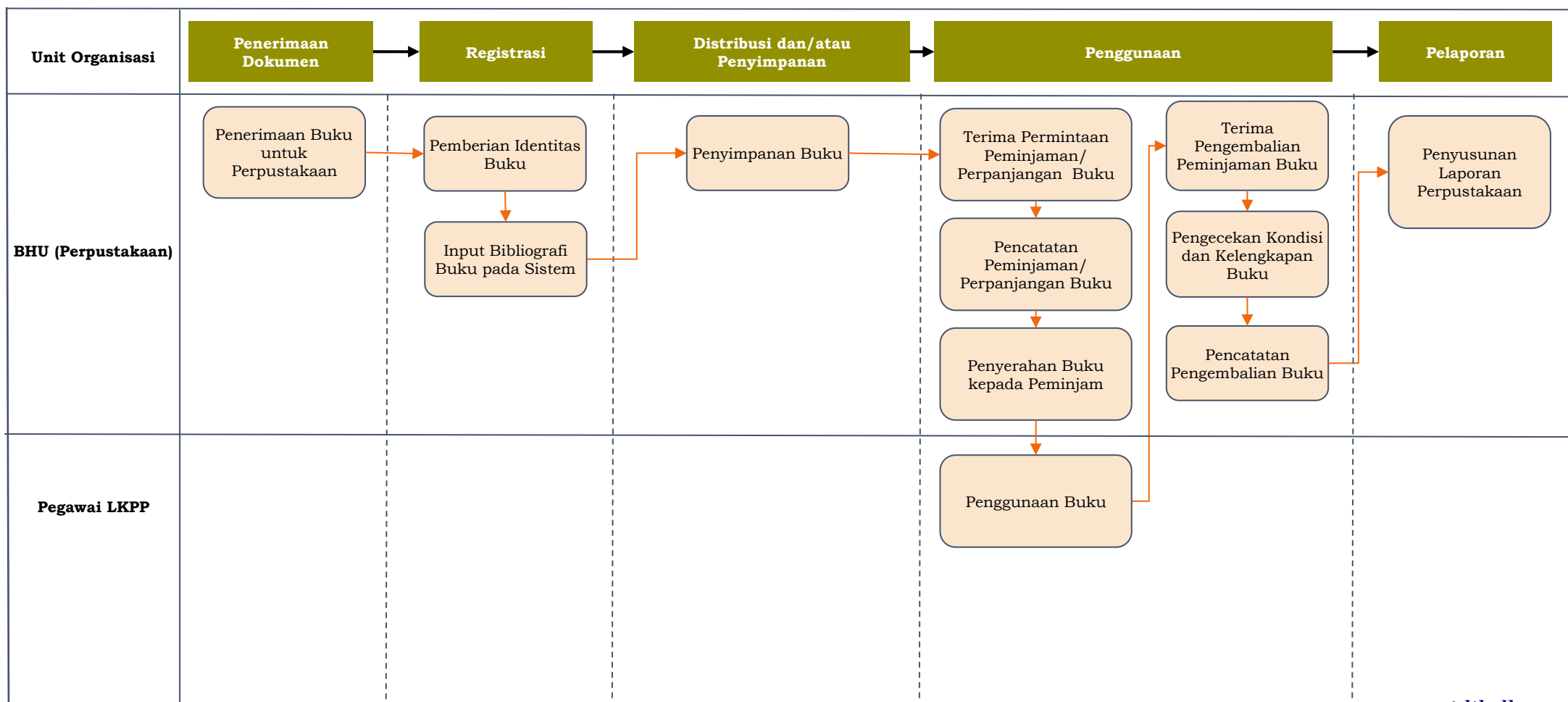
NOMOR	LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-01		
PROSES	PELAYANAN UMUM	LEVEL	2
SUB-PROSES	PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)		



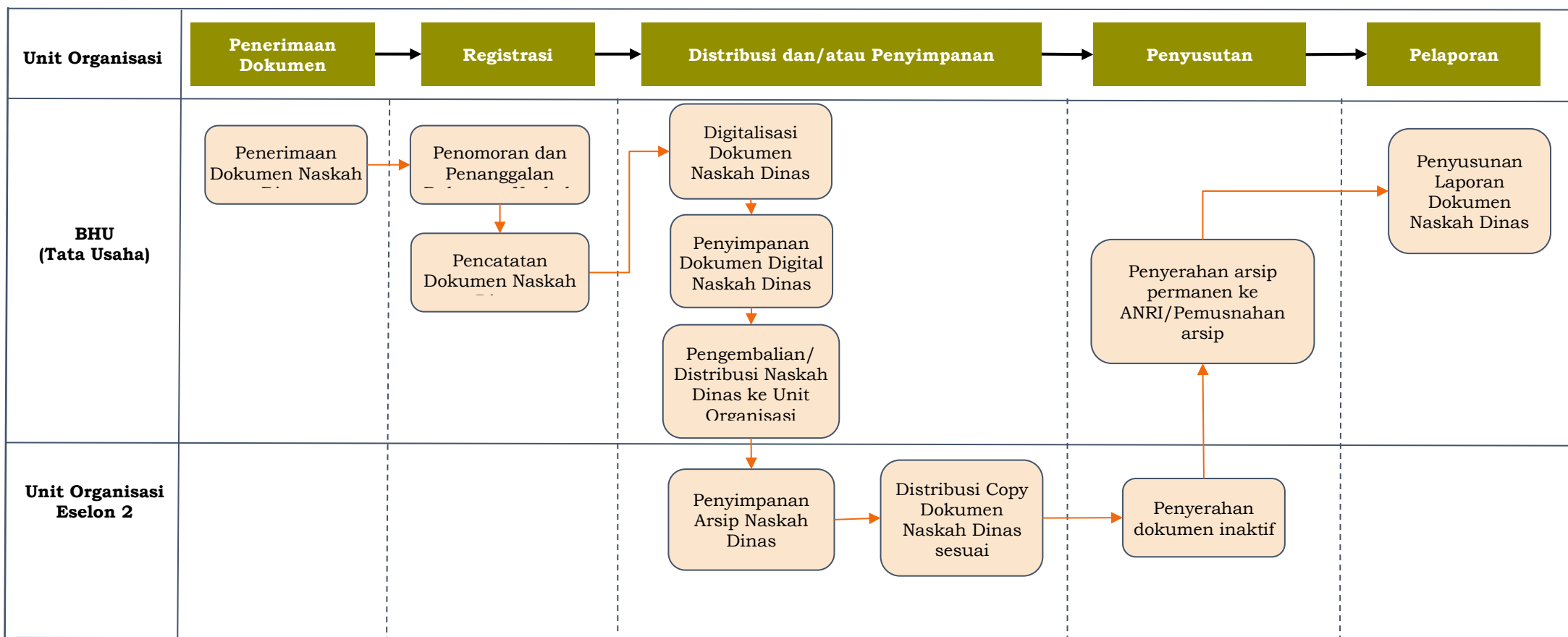
NOMOR	LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02		
PROSES	PELAYANAN UMUM	LEVEL	1
SUB-PROSES	LAYANAN TATA USAHA (BUKU, DOKUMEN NASKAH DINAS DAN ARSIP)		
MULAI	Penerimaan Dokumen	OUTPUT	Antara lain adalah laporan kepustakaan, persuratan, dan pengarsipan.
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	Layanan tata usaha terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Layanan buku pada perpustakaan; - Layanan dokumen naskah dinas (surat masuk sampai surat keluar, laporan, surat tugas, surat keputusan, dan semua dokumen yang masuk dalam perarturan Tata Naskah Dinas); dan - Layanan arsip, baik arsip digital maupun non-digital. 		



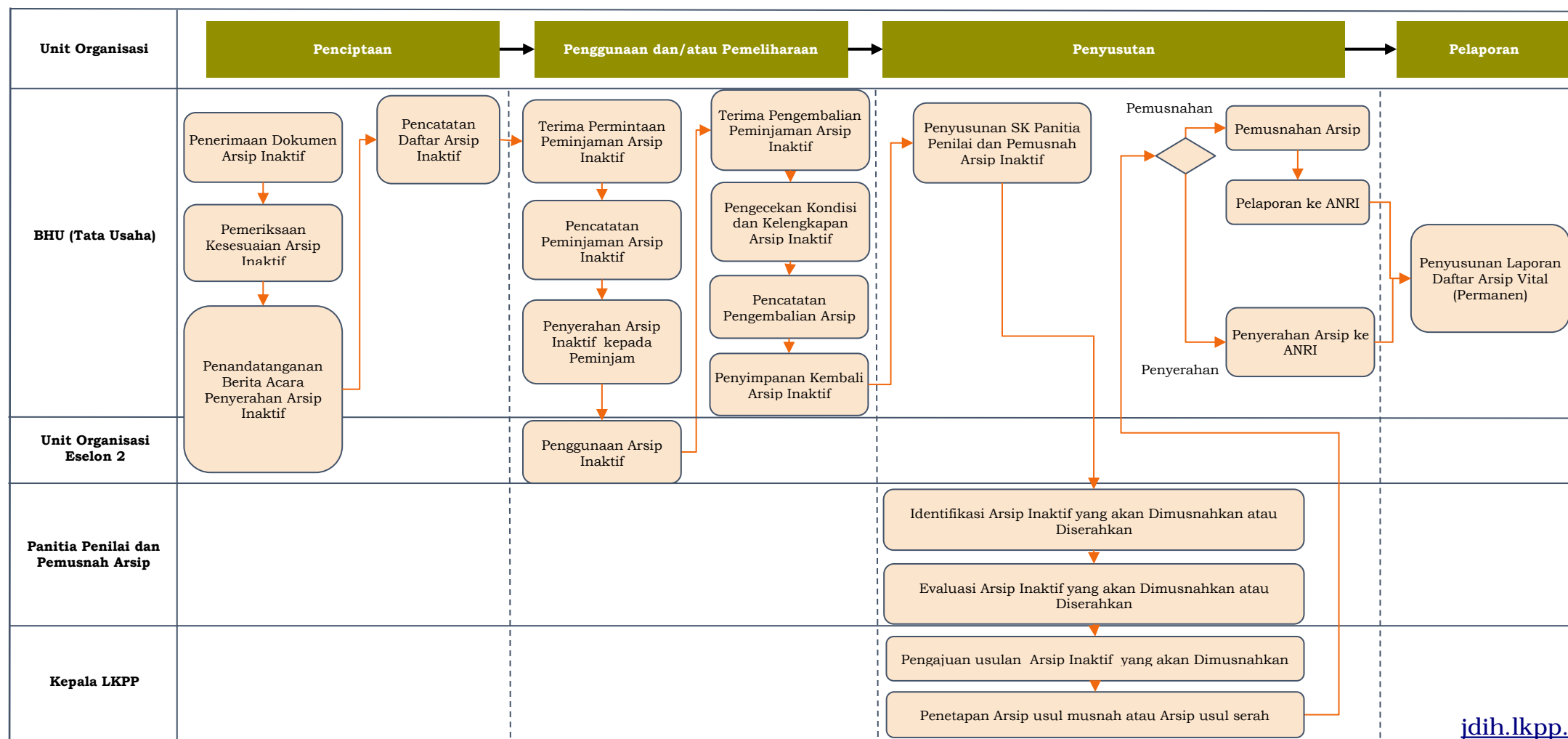
NOMOR	LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02A		
PROSES	PELAYANAN UMUM	LEVEL	2
SUB-PROSES	LAYANAN TATA USAHA: A. BUKU PERPUSTAKAAN		



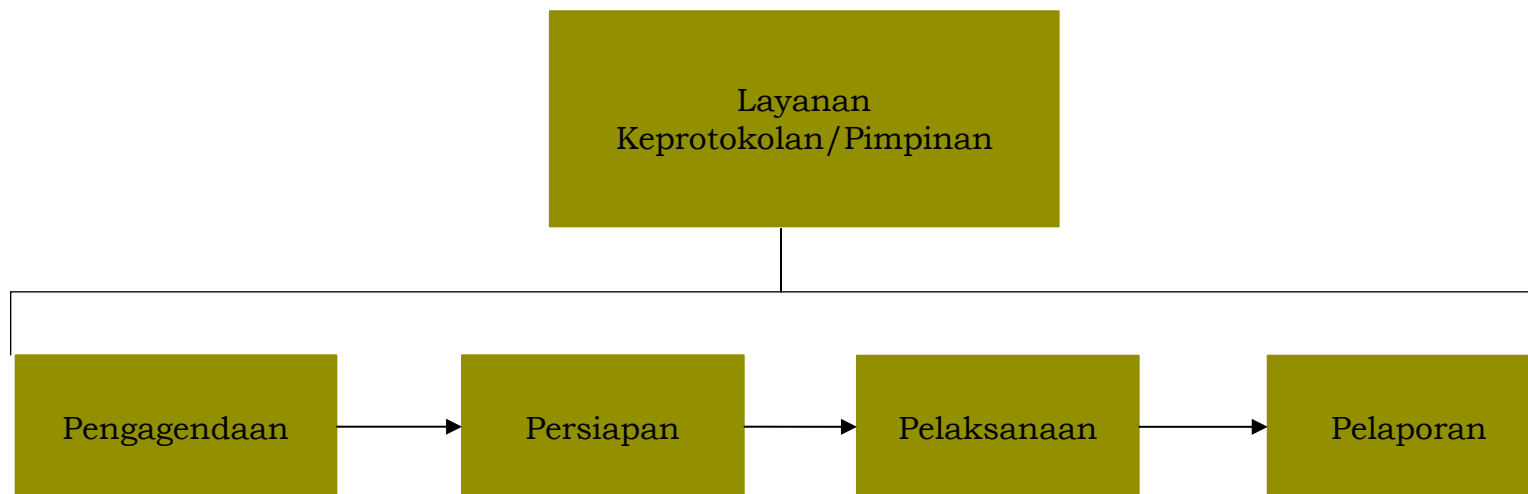
NOMOR	LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02B		
PROSES	PELAYANAN UMUM	LEVEL	2
SUB-PROSES	LAYANAN TATA USAHA: B. DOKUMEN NASKAH DINAS		



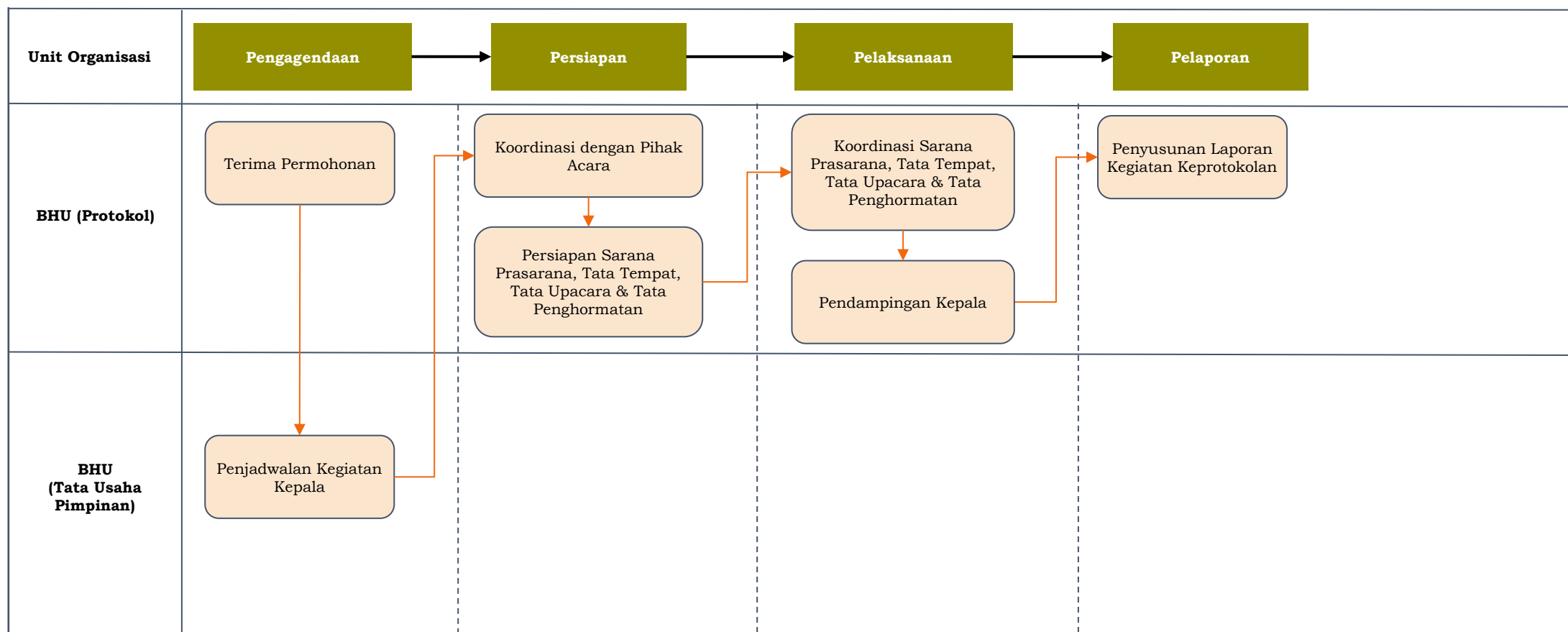
NOMOR	LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02C		
PROSES	PELAYANAN UMUM	LEVEL	2
SUB-PROSES	LAYANAN TATA USAHA: C. ARSIP		



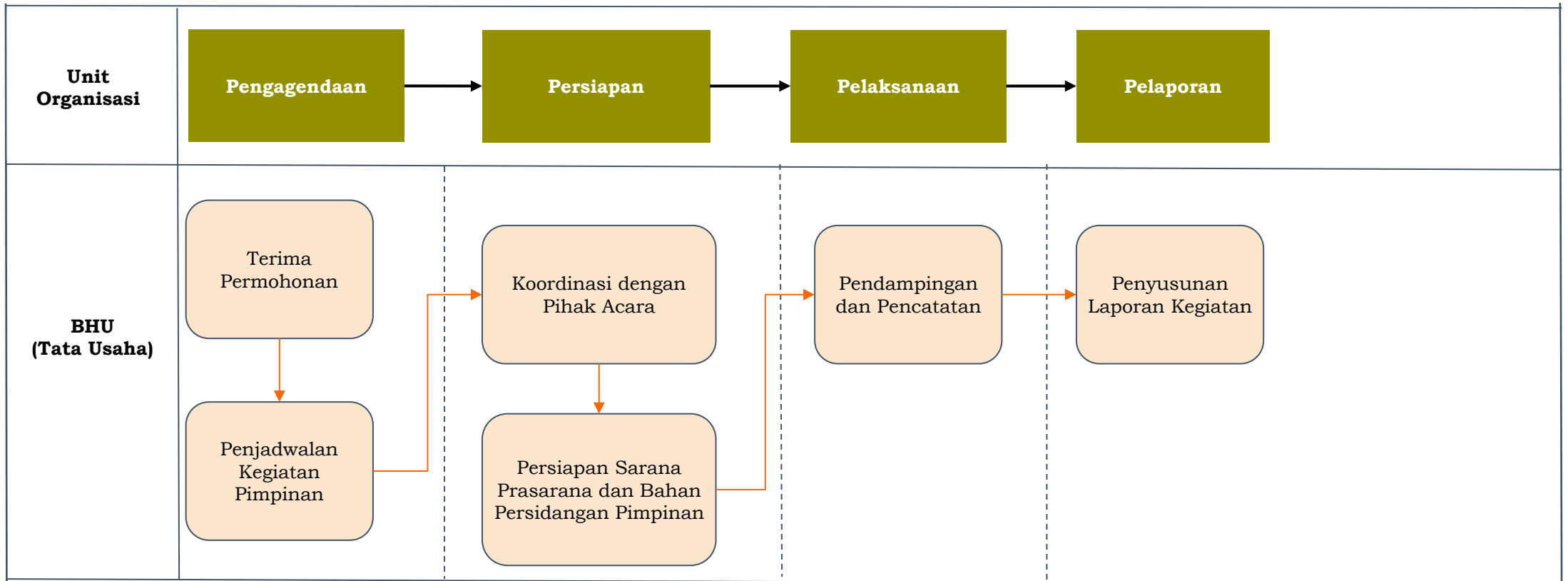
NOMOR	LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-03		
PROSES	PELAYANAN UMUM	LEVEL	1
SUB-PROSES	LAYANAN KEPROTOKOLAN DAN LAYANAN PIMPINAN		
MULAI	Pengagendaan	OUTPUT	Antara lain adalah layanan protokol Pimpinan dan pengurusan dokumen untuk kepentingan dinas Pimpinan
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	Proses layanan keprotokolan dan layanan Pimpinan menggambarkan proses untuk melayani Pimpinan dalam hal keprotokolan sesuai dengan regulasi terkait keprotokolan, dan melayani Pimpinan baik Pimpinan Lembaga, Eselon I maupun Eselon II dalam hal pengurusan dokumen kepentingan dinas Pimpinan.		



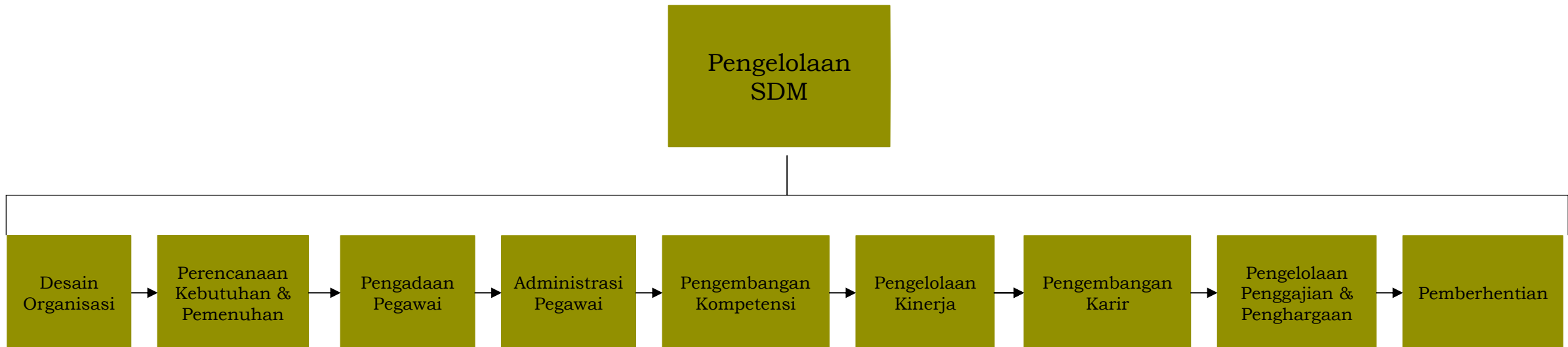
NOMOR	LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-03A		
PROSES	PELAYANAN UMUM	LEVEL	2
SUB-PROSES	LAYANAN KEPROTOKOLAN DAN LAYANAN PIMPINAN: A. LAYANAN KEPROTOKOLAN		



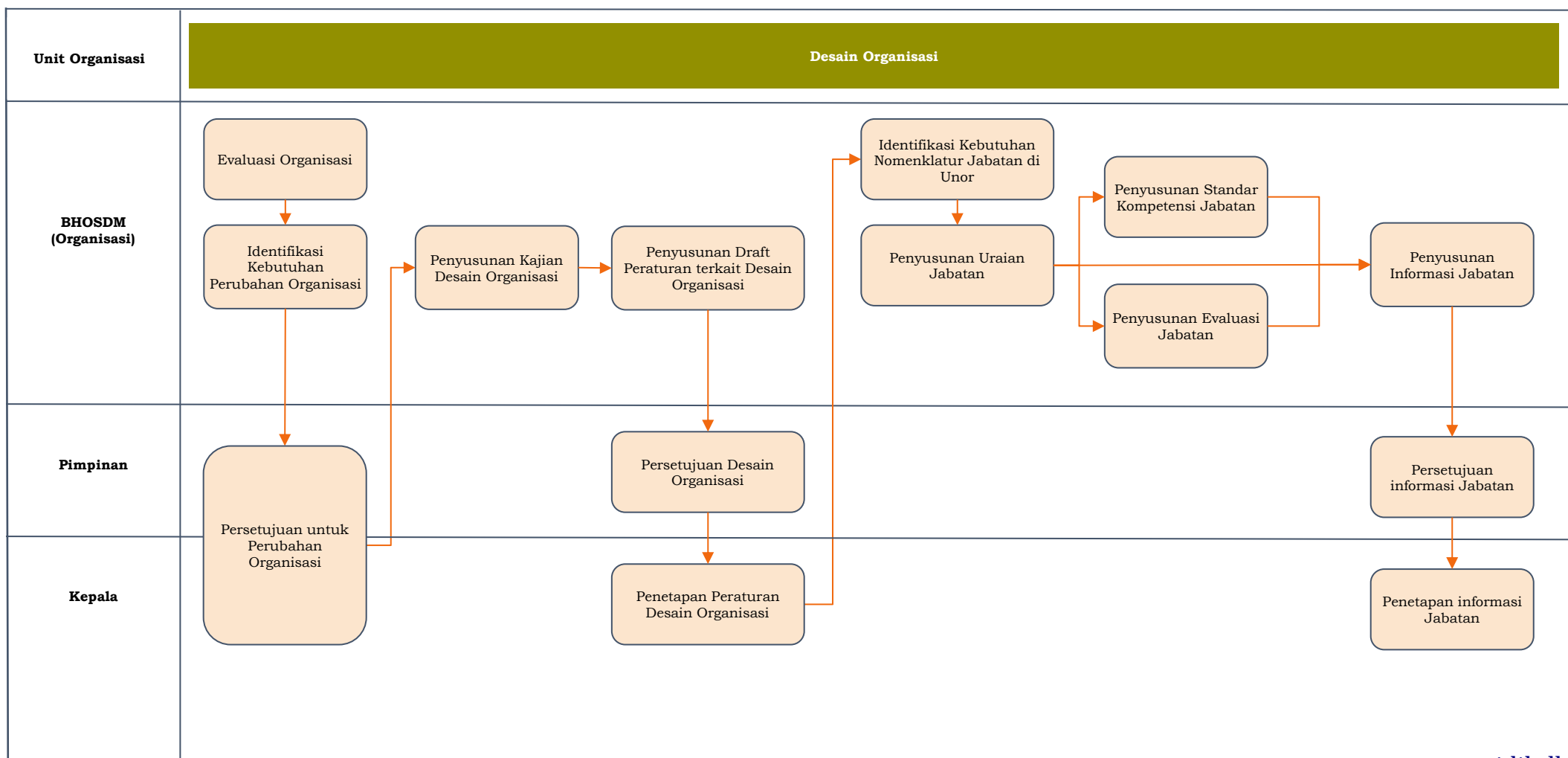
NOMOR	LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-03B		
PROSES	PELAYANAN UMUM	LEVEL	2
SUB-PROSES	LAYANAN KEPROTOKOLAN DAN LAYANAN PIMPINAN: B. LAYANAN PIMPINAN		



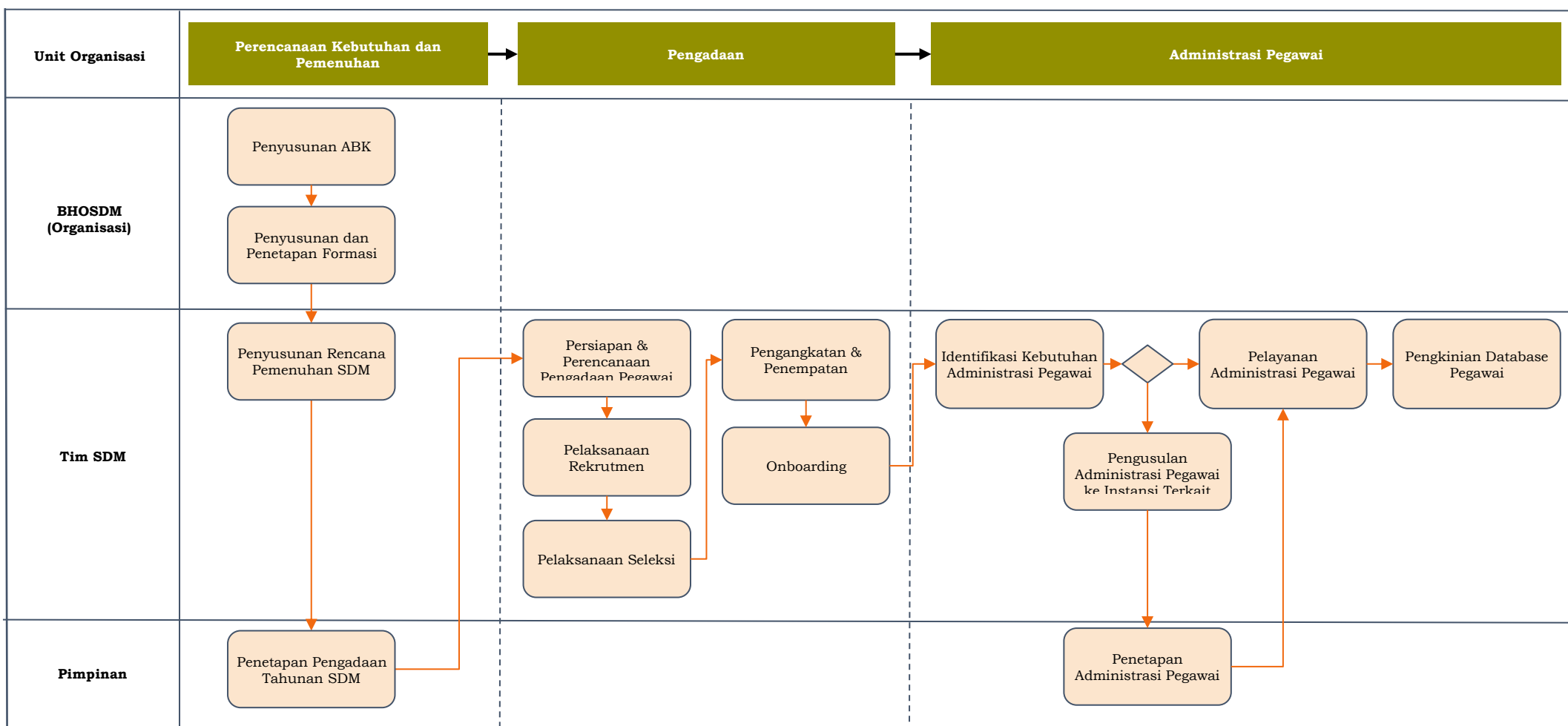
NOMOR	LKPP.PP.L1.PSDM/2023.14		
PROSES	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	LEVEL	1
MULAI	Desain Organisasi	OUTPUT	Implementasi sistem merit
AKHIR	Pemberhentian		
KETERANGAN	Proses pengelolaan SDM yang mencakup proses rekrutmen, budaya organisasi, struktur organisasi, pelatihan dan pengembangan, karir, dan remunerasi		



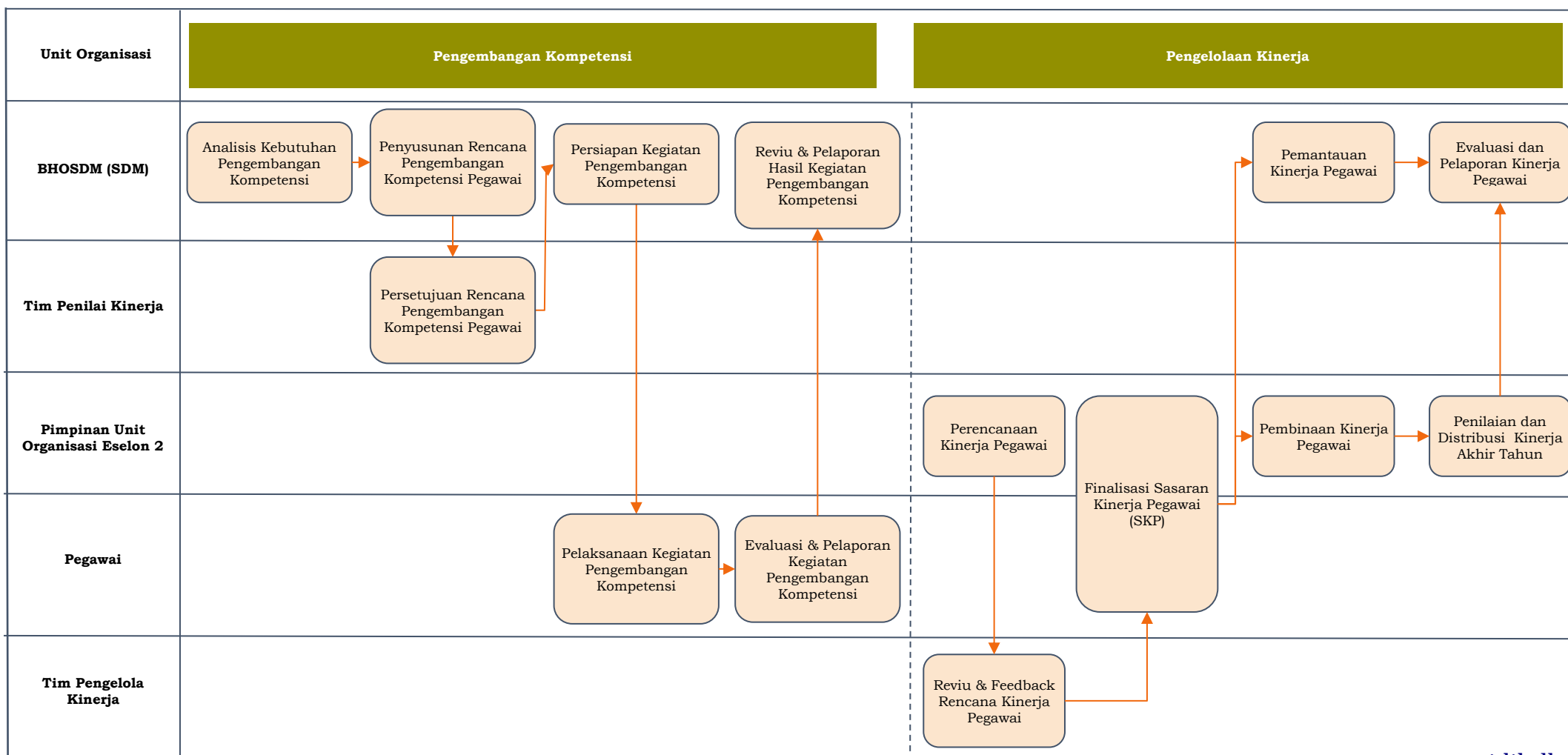
NOMOR	LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-01		
PROSES	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	LEVEL	2
SUB-PROSES	(1) DESAIN ORGANISASI		



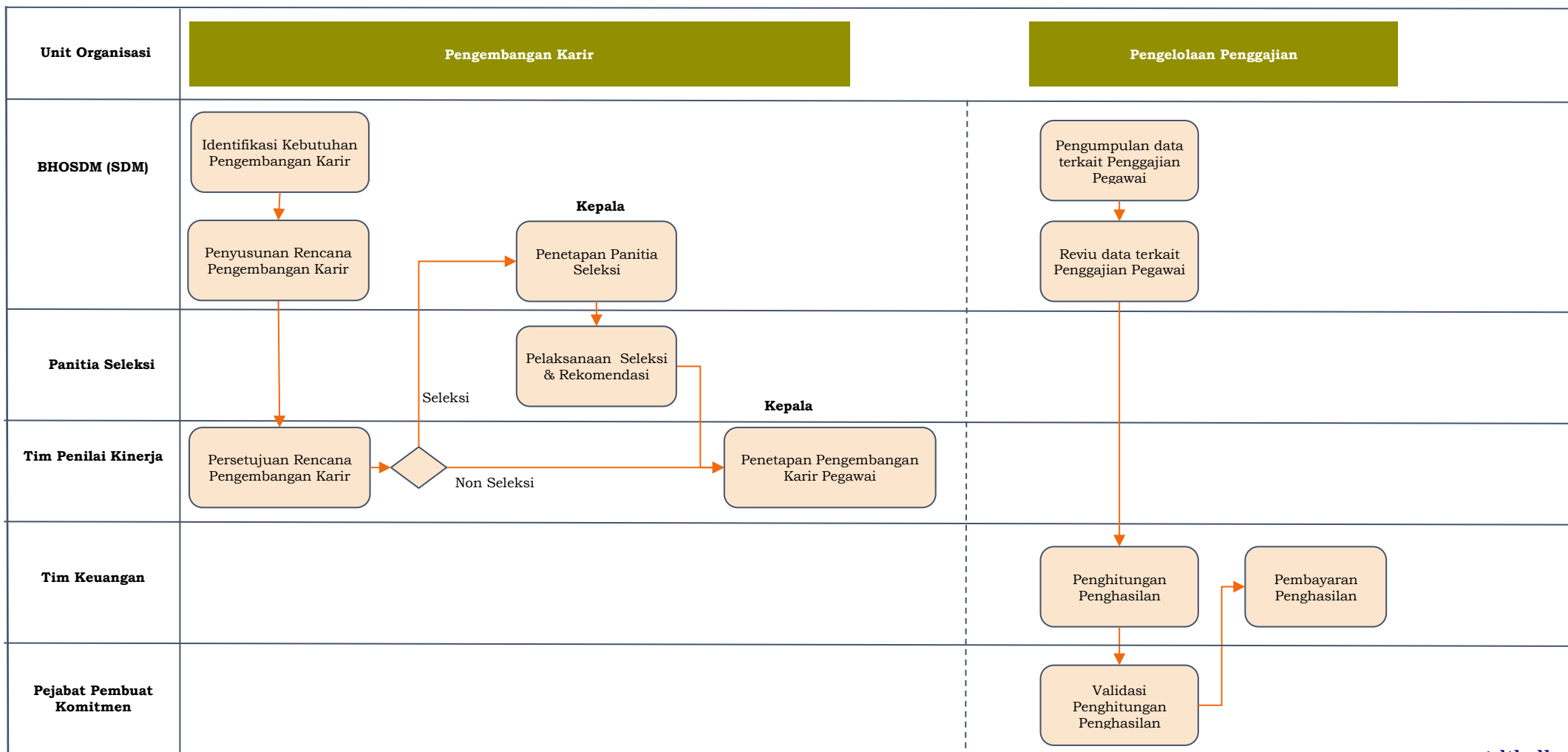
NOMOR	LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-02		
PROSES	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	LEVEL	2
SUB-PROSES	(2) PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMENUHAN; (3) PENGADAAN PEGAWAI; DAN (4) ADMINISTRASI PEGAWAI		



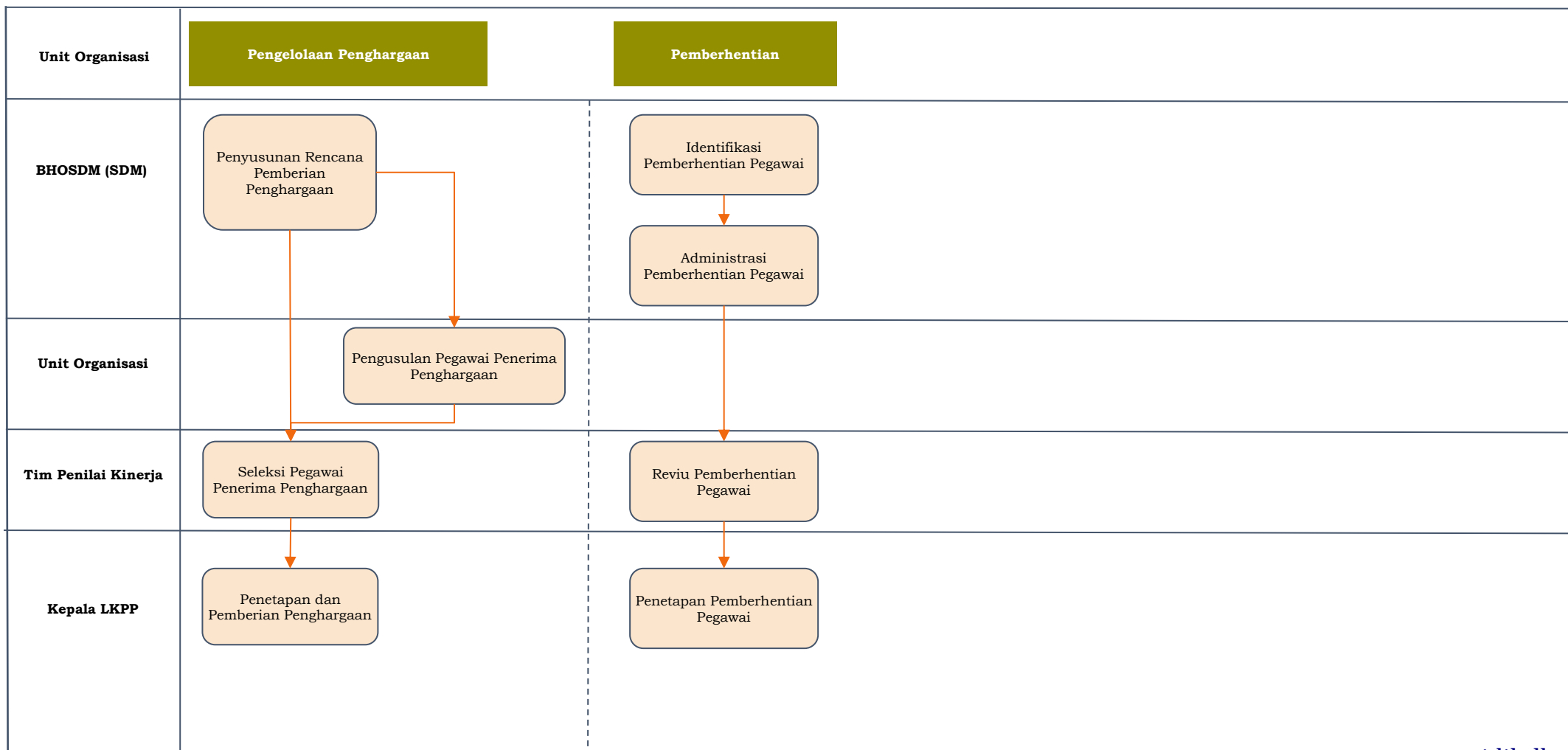
NOMOR	LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-03		
PROSES	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	LEVEL	2
SUB-PROSES	(5) PENGEMBANGAN KOMPETENSI; DAN (6) PENGELOLAAN KINERJA		



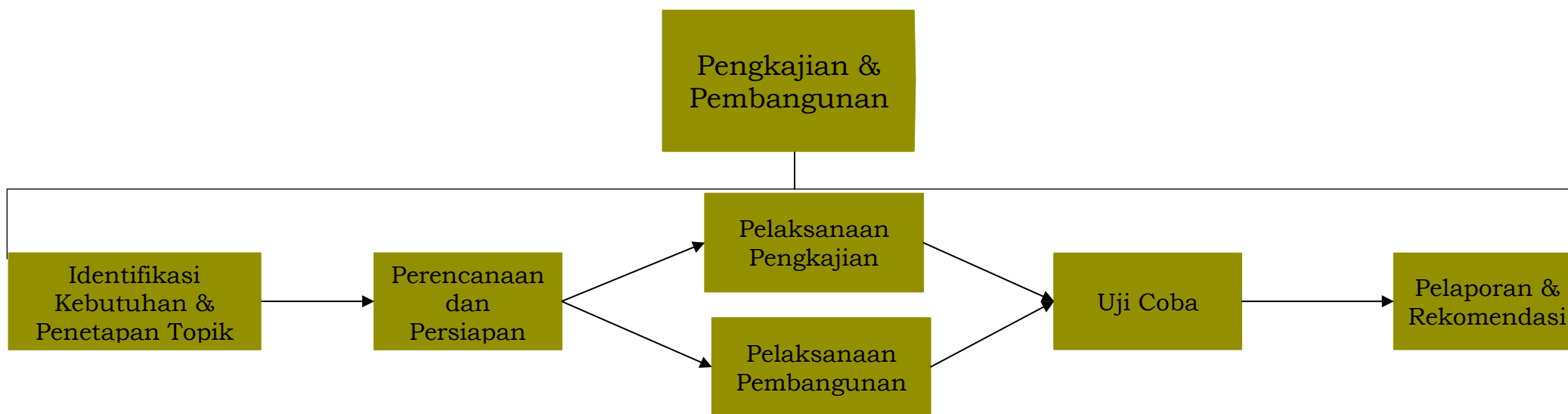
NOMOR	LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-04		
PROSES	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	LEVEL	2
SUB-PROSES	(7) PENGEMBANGAN KARIR; DAN (8) PENGELOLAAN PENGGAJIAN		



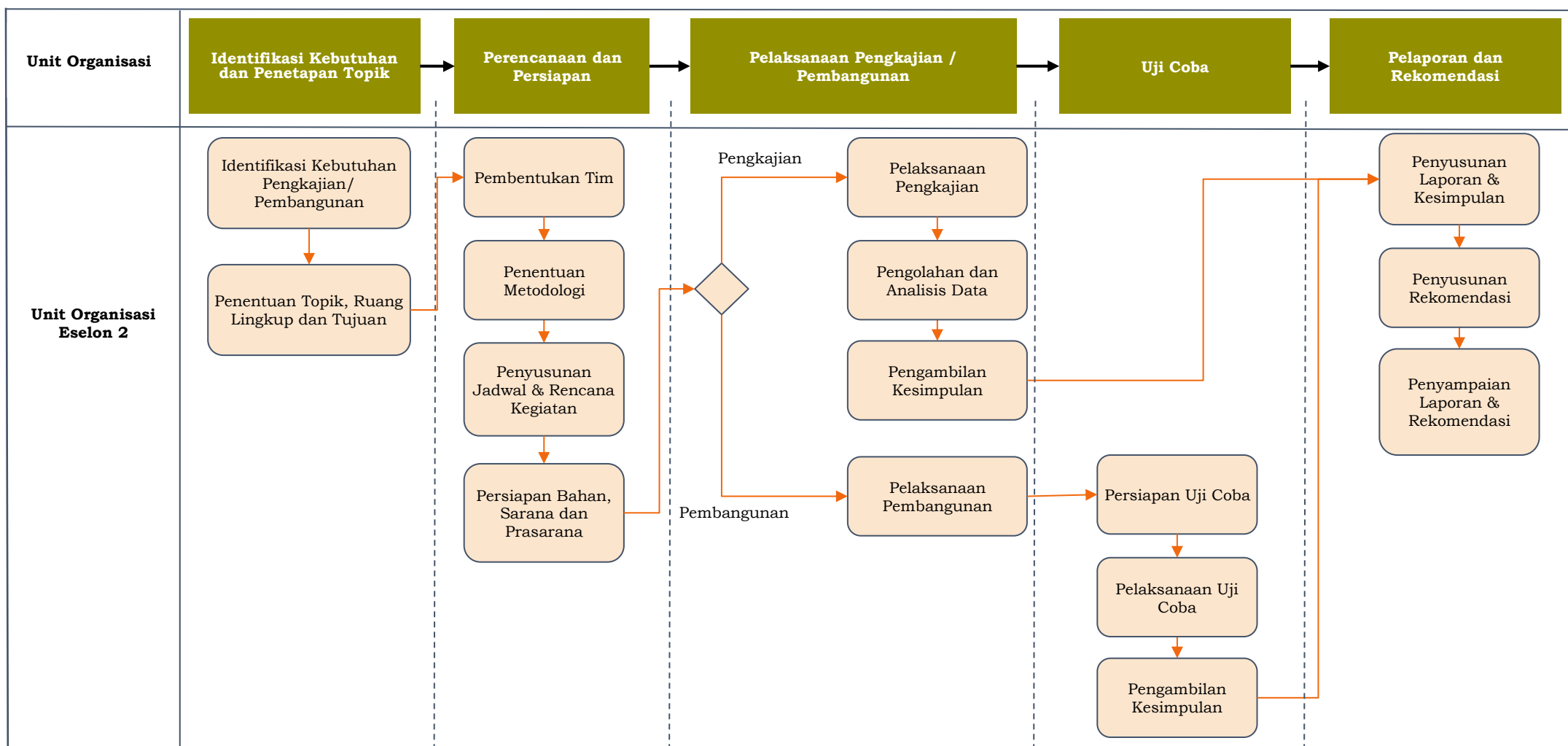
NOMOR	LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-05		
PROSES	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	LEVEL	2
SUB-PROSES	(9) PENGELOLAAN PENGHARGAAN; DAN (10) PEMBERHENTIAN		



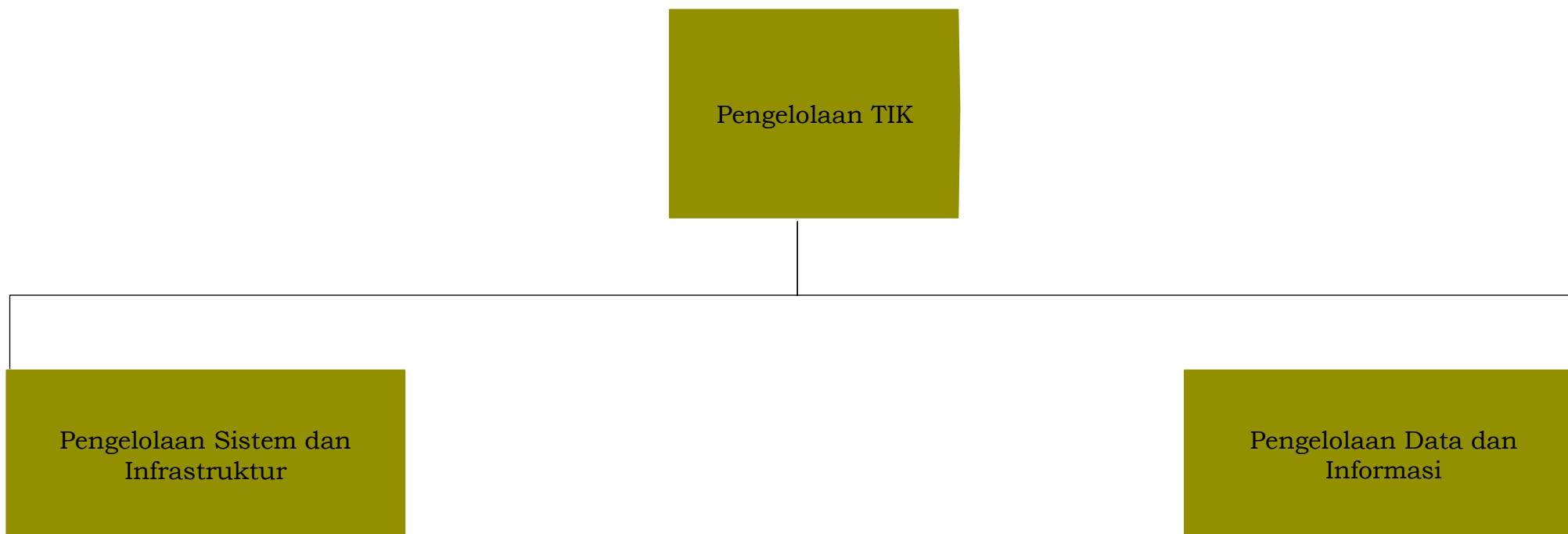
NOMOR	LKPP.PP.L1.RND/2023.15		
PROSES	PENGAJIAN & PEMBANGUNAN	LEVEL	1
MULAI	Identifikasi Kebutuhan & Penetapan Topik	OUTPUT	Kajian
AKHIR	Pelaporan & Rekomendasi		
KETERANGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengkajian dan pembangunan untuk menghasilkan kegiatan tata kelola pengadaan yang lebih efektif dan efisien • Pengkajian adalah studi/pembelajaran terhadap suatu konsep/sistem/metodologi/teori/fakta/peristiwa untuk menghasilkan suatu informasi/pengetahuan atau rekomendasi • Pembangunan adalah kegiatan menciptakan produk baru atau perubahan produk yang ada dengan tujuan penambahan nilai (<i>value added</i>) 		



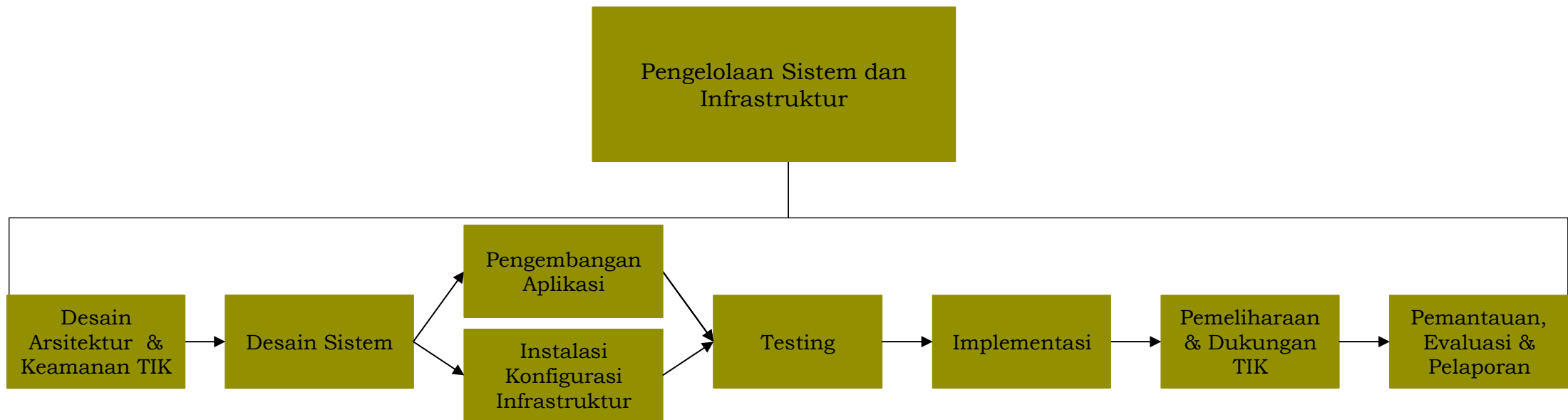
NOMOR	LKPP.PP.L2.RND/2023.15		
PROSES	PENGAJIAN & PEMBANGUNAN	LEVEL	2



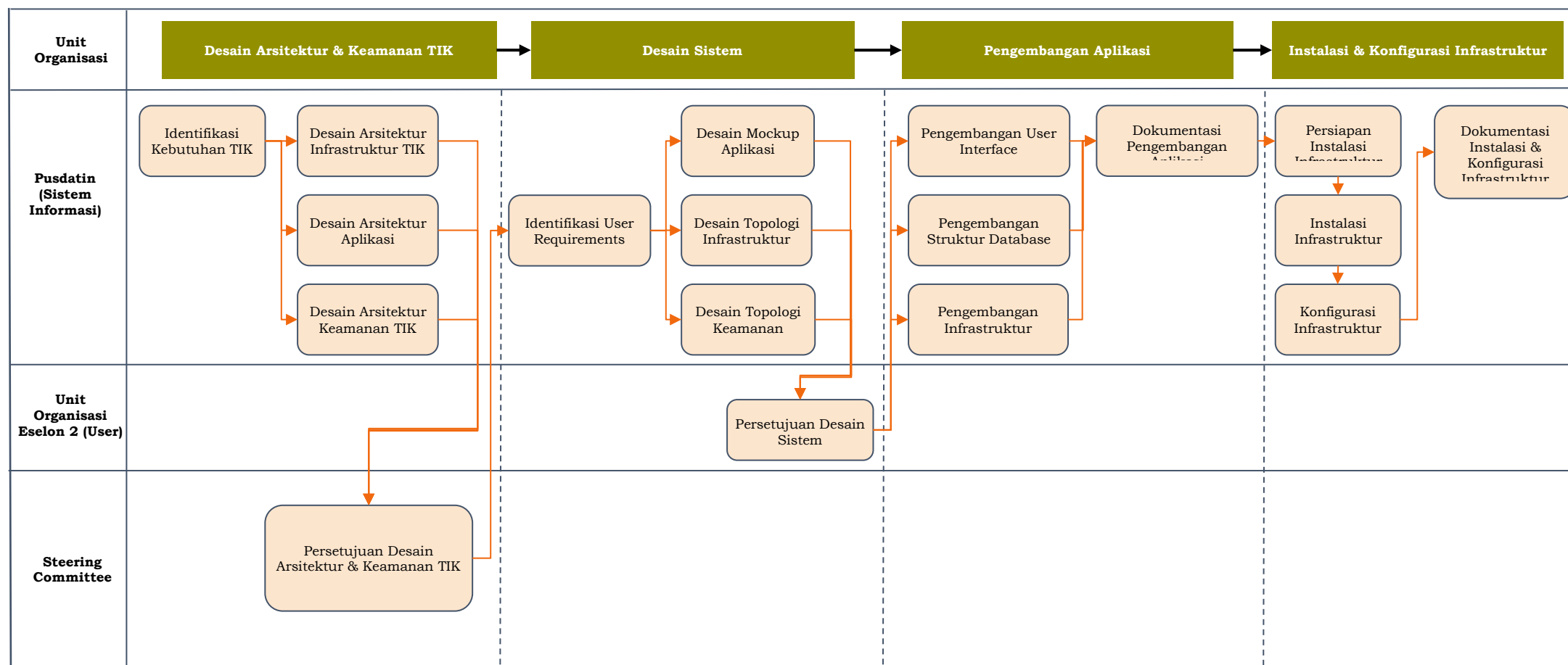
NOMOR	LKPP.PP.L1.TIK/2023.16		
PROSES	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	LEVEL	1
MULAI	Desain Arsitektur	OUTPUT	Ketersediaan sistem dan infrastruktur TIK, serta hasil analisis data dan informasi
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	Proses pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas 2 (dua) proses, yaitu pengelolaan sistem & infrastruktur, dan pengelolaan data & informasi		



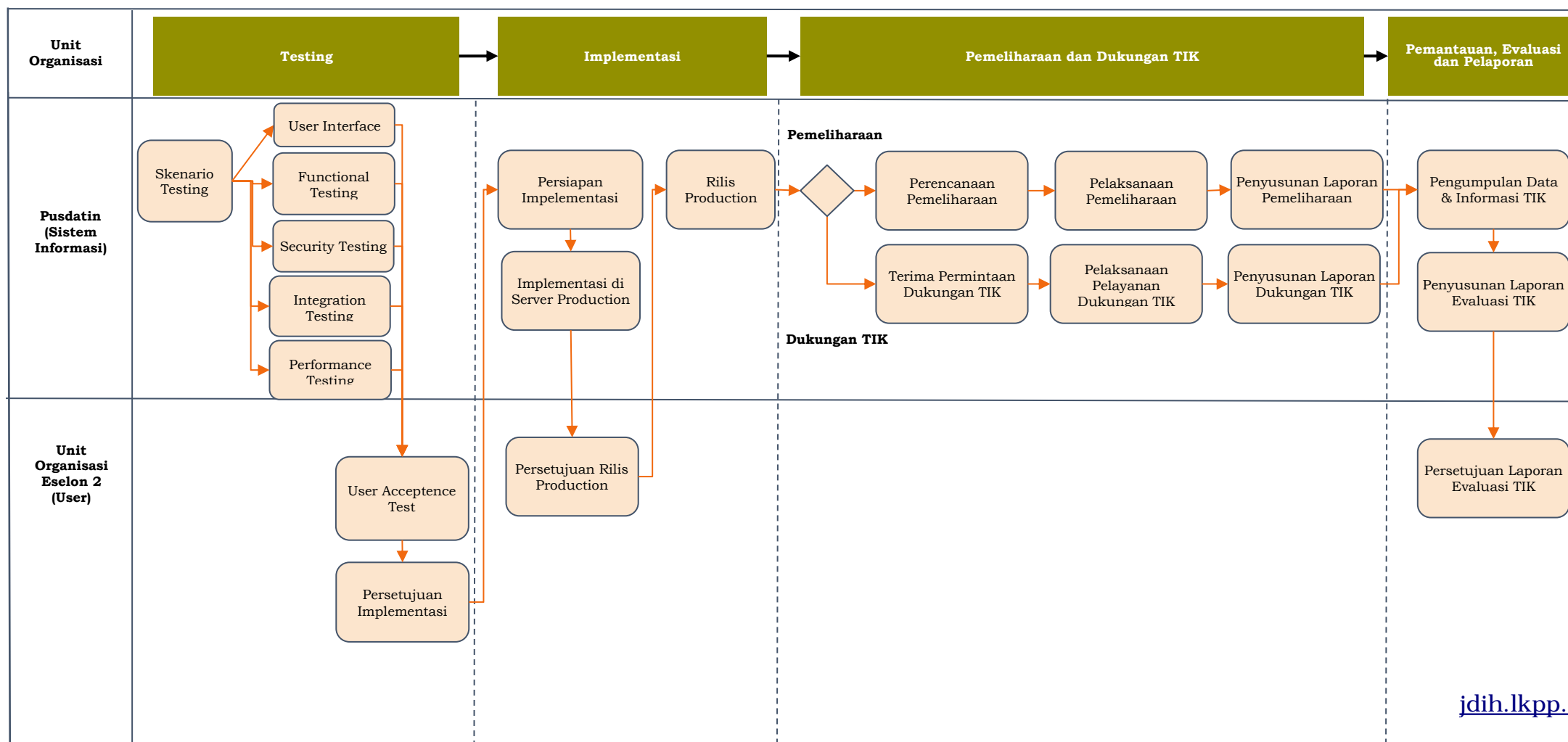
NOMOR	LKPP.PP.L1.TIK/2023.16-01		
PROSES	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	LEVEL	1
SUB-PROSES	PENGELOLAAN SISTEM DAN INFRASTRUKTUR		



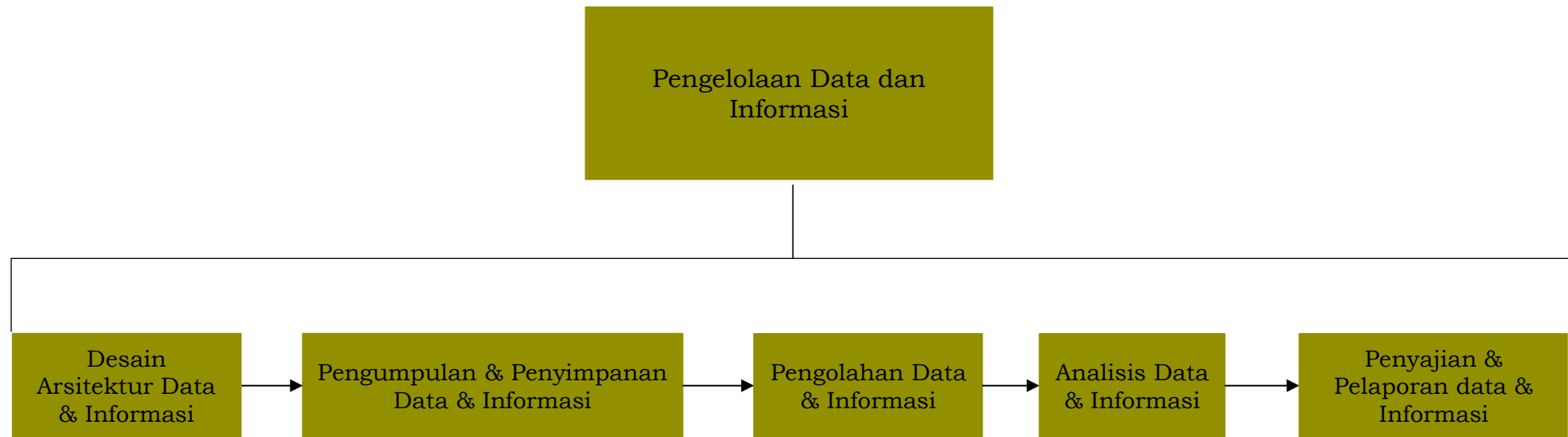
NOMOR	LKPP.PP.L2.TIK/2023.16-01	HALAMAN	1
PROSES	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	LEVEL	2
SUB-PROSES	PENGELOLAAN SISTEM DAN INFRASTRUKTUR		



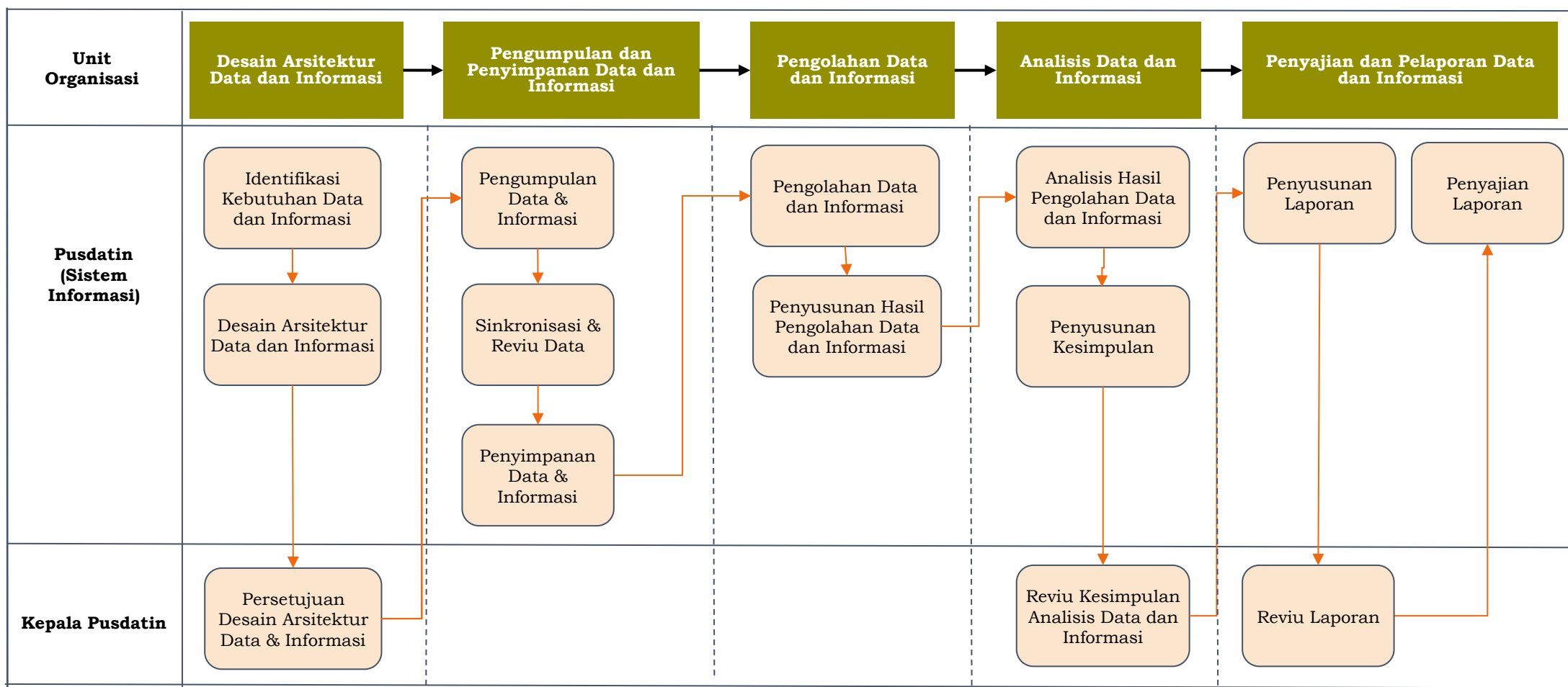
NOMOR	LKPP.PP.L2.TIK/2023.16-01	HALAMAN	2
PROSES	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	LEVEL	2
SUB-PROSES	PENGELOLAAN SISTEM DAN INFRASTRUKTUR		



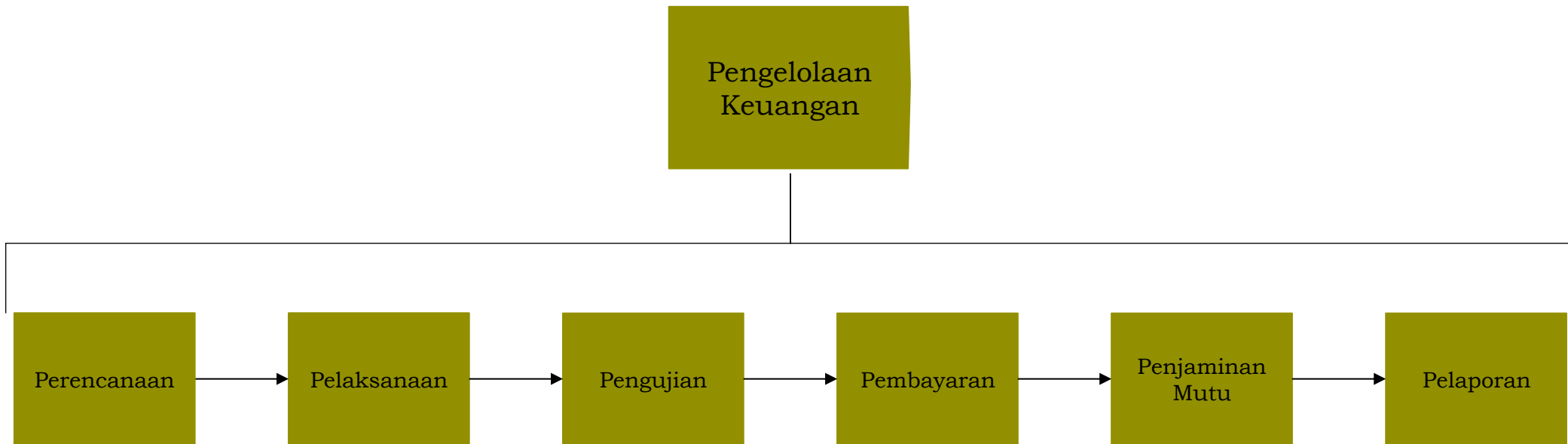
NOMOR	LKPP.PP.L1.TIK/2023.16-02		
PROSES	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	LEVEL	1
SUB-PROSES	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI		



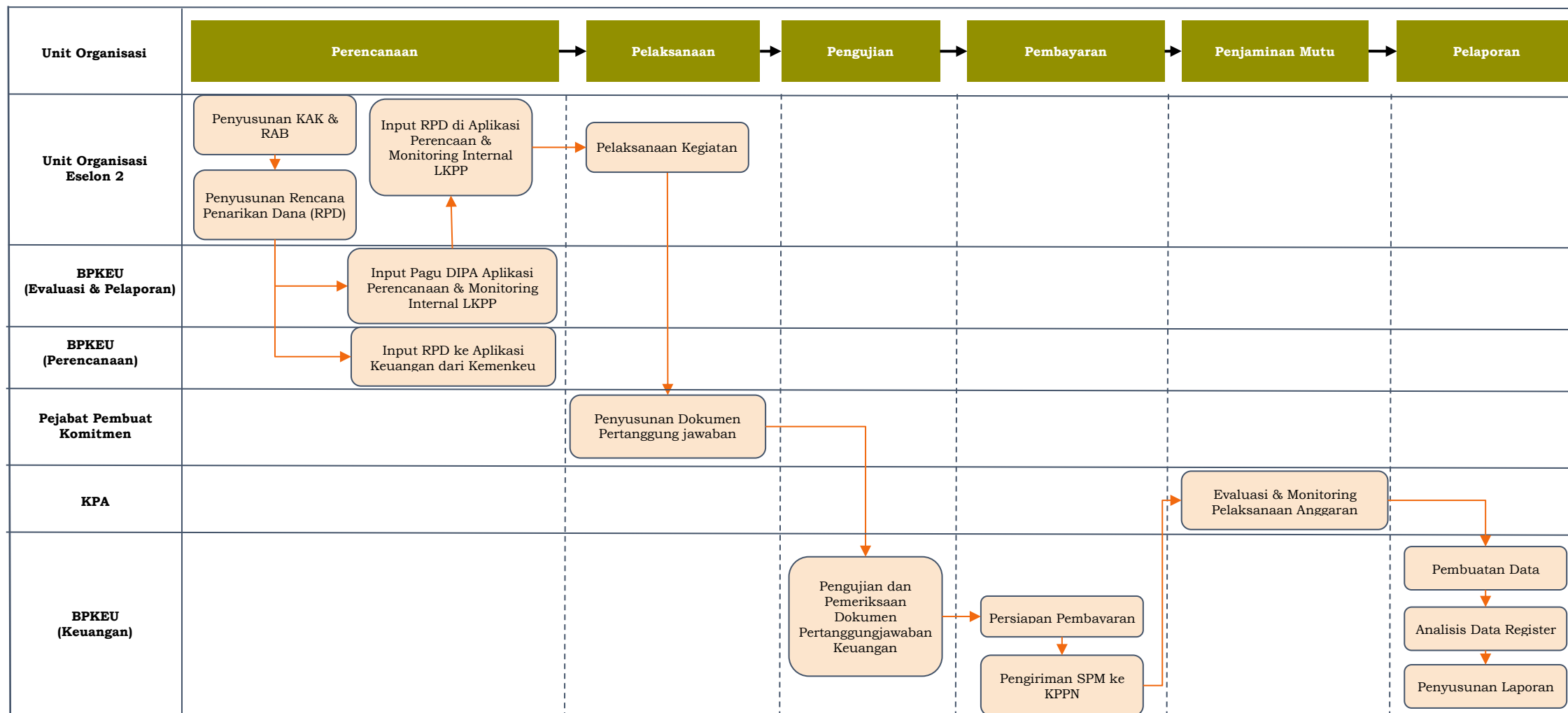
NOMOR	LKPP.PP.L2.TIK/2023.16-02		
PROSES	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	LEVEL	2
SUB-PROSES	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI		



NOMOR	LKPP.PP.L1.KEU/2023.17		
PROSES	PENGELOLAAN KEUANGAN	LEVEL	1
MULAI	Perencanaan	OUTPUT	Laporan keuangan
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	Proses pengelolaan keuangan organisasi		



NOMOR	LKPP.PP.L2.KEU/2023.17		
PROSES	PENGELOLAAN KEUANGAN	LEVEL	2



BAB VI

PENUTUP

Peta Proses Bisnis LKPP disusun agar kinerja organisasi berjalan efektif dan efisien dan bernilai tambah bagi pemangku kepentingan, yang disusun berdasarkan prinsip penyusunan Peta Proses Bisnis yang dimandatkan oleh Kementerian PANRB dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, diantaranya yaitu:

1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni orientasi pada pelanggan akhir penerima hasil dari proses;
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
6. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
7. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi.

Peta Proses Bisnis dapat berubah apabila strategi organisasi berubah dan perlu disusun kembali agar tujuan organisasi dan pelayanan kepada pemangku kepentingan tercapai dengan efektif dan efisien.

Demikian Peta Proses Bisnis ini disusun sebagai acuan dalam menjalankan proses kerja bagi seluruh unit organisasi LKPP.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI